



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507658

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Nomor : KP.904/3/12 /TJEN/2024
Klasifikasi :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Evaluasi atas Hasil
Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan Tahun 2024

Jakarta, 28 Juni 2024

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif melalui peningkatan mutu kapabilitas APIP, bersama ini disampaikan hasil penilaian yang kami lakukan terhadap kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024, dengan simpulan sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelola Sumber Daya Manusia	4	0,6300
2.	Praktik Profesional	4	0,7200
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2250
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,1800
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,4400
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2000
Simpulan Entitas		3	3,3950

Proses penilaian tersebut telah kami laksanakan melalui aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP (<https://apipl.bpkp.go.id/newpkapip/>).

Dalam mendukung simpulan hasil penilaian kami, terlampir kami sampaikan:

1. Surat pernyataan tanggung jawab oleh Pimpinan APIP;
2. Surat Tugas Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM);
3. Data Umum/Profil APIP;
4. Kertas Kerja PM;
5. Progres Pelaksanaan Rencana Aksi atas *Area of Improvement* atas Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023;
6. Rencana Aksi atas *Area of Improvement* atas Hasil Penilaian Mandiri Tahun 2024; dan

7. Seluruh *soft copy* bukti pendukung/evidence PM (dapat diakses melalui link <https://bit.ly/iacmkemenhub24>).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, kami mohon untuk dilaksanakan evaluasi oleh BPKP guna penetapan tingkat kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP.



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2024

LAPORAN PENILAIAN MANDIRI

KAPABILITAS APIP

“Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
Tahun 2024 mencapai skor 3,395 pada level 3”





DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

Pernyataan Tanggung Jawab

Surat Tugas Penilaian Mandiri

Profil APIP

Kertas Kerja Penilaian Mandiri

Simpulan Hasil Penilaian Mandiri

Area of Improvement Hasil Penilaian Mandiri

Monitoring Tindak Lanjut Hasil Evaluasi





RINGKASAN EKSEKUTIF

Penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 mencapai skor 3,395 pada level 4. Skor ini meningkat dari hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi tahun 2023. Peningkatan terdapat pada beberapa topik, antara lain:

1. Perencanaan SDM;
2. Perencanaan Pengawasan;
3. Program Penjaminan Kualitas;
4. Rencana Kerja dan Anggaran;
5. Pelaksanaan Anggaran;
6. Pelaporan kepada Manajemen;
7. Mekanisme Pendanaan;
8. Hubungan Pelaporan.



A. PELAKSANAAN PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, penilaian mandiri kapabilitas APIP dilakukan secara periodik setiap tahun pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan. Penilaian mandiri kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 38 Tahun tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024. Susunan Satuan Tugas terdiri atas Tim *Self Improvement* dan Tim *Self Assessment*.

Proses penilaian mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 telah melalui serangkaian kegiatan, di antaranya:

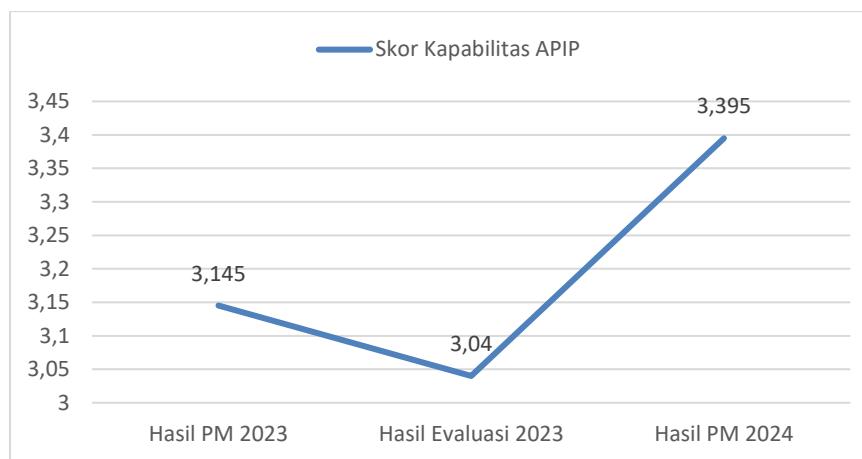
1. Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP melalui Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 38 Tahun tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
2. Rapat *Kick off* Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 pada tanggal 24 April 2024, dalam rapat tersebut dibahas susunan satgas kapabilitas APIP, strategi peningkatan kapabilitas APIP tahun 2024, mekanisme dan tata cara penilaian kapabilitas APIP tahun 2024, dan *timeline* penilaian kapabilitas APIP tahun 2024.
3. Bimbingan Teknis Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 15 s.d 17 Mei 2024 bersama narasumber dari BPKP, dengan agenda:
 - a. Overview hasil evaluasi atas kapabilitas APIP tahun 2023;
 - b. *Monitoring* pelaksanaan rencana aksi *area of improvement* penilaian kapabilitas APIP;
 - c. Pembahasan kertas kerja dan data dukung penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2024.
4. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024 oleh Tim *Self Assessment* pada tanggal 4 s.d 10 Juni 2024 sesuai Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor ST-ITJEN 175 Tahun 2024 tanggal 3 Juni 2024.
5. Pembahasan hasil sementara Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024 oleh tim *self assessment* pada tanggal 11 Juni 2024.
6. Asistensi dan Finalisasi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 bersama tim *self improvement* dan tim *self assessment* pada tanggal 23 s.d 25 Juni 2024 dengan agenda:
 - a. Asistensi Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2024 bersama BPKP;
 - b. Finalisasi Kertas Kerja Profil APIP dan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024;



- c. Perumusan *Area of Improvement* Kapabilitas APIP Tahun 2024;
- d. Pengisian Hasil Penilaian Mandiri melalui Aplikasi Kapabilitas APIP BPKP;
- e. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024.

B. UPAYA PENINGKATAN KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024

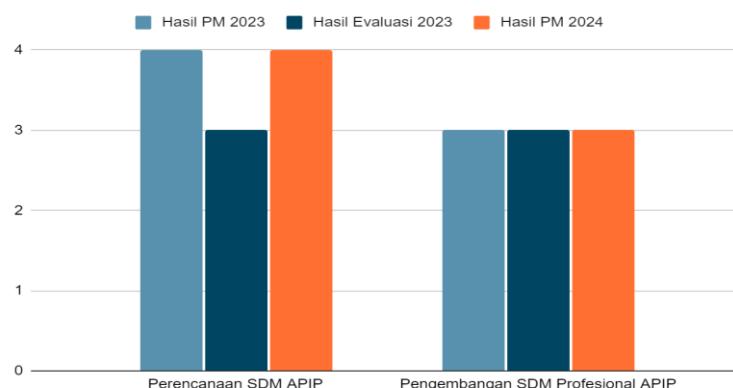
Dalam rangka upaya pencapaian level 4, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan optimalisasi pemenuhan indikator pada level 3 dan evaluasi perbaikan secara berkelanjutan terhadap kebijakan, implementasi dan hasil pada sebagian besar topik yang dapat mengungkit capaian level menuju level 4. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2024 dibandingkan dengan hasil penilaian mandiri dan hasil evaluasi tahun 2023. Rincian perbandingan hasil penilaian sebagai berikut.



Secara lebih detail, berikut upaya peningkatan kapabilitas APIP yang telah dilakukan pada masing-masing elemen.

1. Elemen Pengelolaan SDM

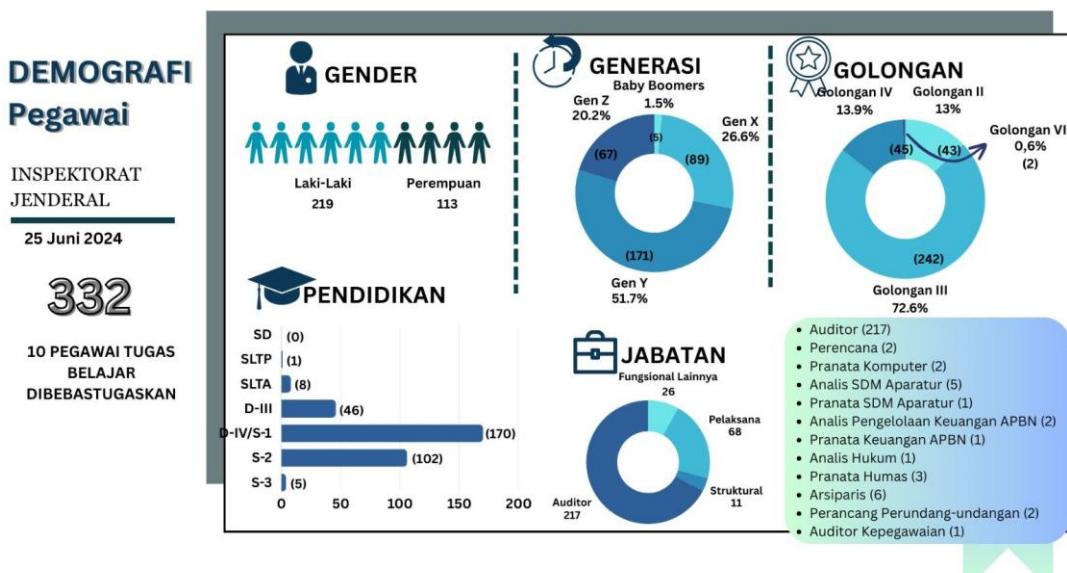
Hasil penilaian mandiri Elemen Pengelolaan SDM mendapatkan skor 0,630 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,540 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada Topik Perencanaan SDM APIP. Rincian skor per topik sebagai berikut:





a. Topik Perencanaan SDM APIP

Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan telah melaksanakan perencanaan SDM APIP sesuai dengan kebutuhan organisasi. Evaluasi dan perhitungan formasi SDM APIP di lingkungan Kementerian Perhubungan juga telah dilaksanakan secara berkelanjutan, berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian jabatan, serta kebutuhan organisasi. Formasi Kebutuhan APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal telah mendapatkan rekomendasi BPKP sebagai instansi pembina. Evaluasi atas komposisi JFA ditindaklanjuti dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP.102/KP.104/ITJEN-2016 tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal.



Dalam membangun konsep tiga lini pertahanan (*three line of defense*), Kementerian Perhubungan telah membentuk Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) pada Badan Layanan Umum (BLU) sebagai lini kedua, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 144 Tahun 2019 tentang Satuan Pemeriksaan Intern pada Badan Layanan Umum. Sebagai perkuatan lini kedua dan guna mengawal sistem pengendalian intern organisasi pada BLU, perlu adanya auditor intern yang memiliki sertifikasi auditor dalam organ SPI. Hal ini juga bertujuan agar pengawasan yang dilaksanakan oleh SPI sesuai dengan standar pengawasan intern. Inspektorat Jenderal, sebagai pembina jabatan fungsional auditor di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah melakukan perhitungan kebutuhan formasi auditor pada SPI BLU dan mendorong setiap BLU untuk memiliki formasi auditor pada organ SPI BLU. Formasi auditor pada 31 satker SPI BLU di lingkungan Kementerian Perhubungan telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian PAN&RB serta BPKP. Secara berkala, Inspektorat Jenderal juga telah melakukan pembinaan bagi organ SPI BLU/auditor pada SPI BLU, sebagaimana pada tahun 2024, telah dilakukan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor yang melibatkan seluruh pemangku jabatan JFA dan calon JFA, baik di lingkungan



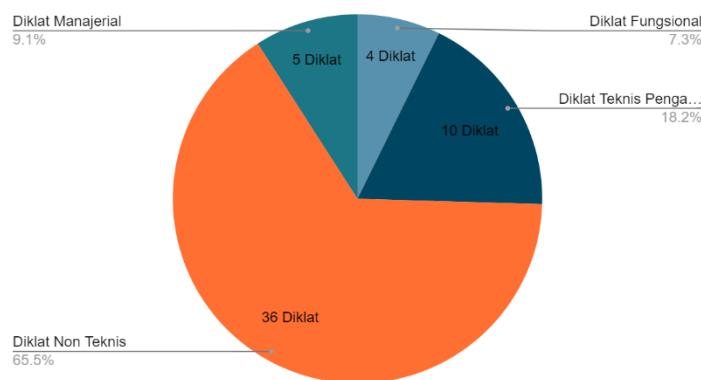
Inspektorat Jenderal maupun SPI BLU. Pemenuhan Formasi JFA pada SPI BLU saat ini menunggu penetapan revisi peta jabatan pada organ SPI BLU oleh Menteri Perhubungan.

Inspektorat Jenderal secara berkala melaksanakan analisis dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internalnya. Selain itu, Inspektorat Jenderal juga merupakan koordinator analisis dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal (BPK dan BPKP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemantauan tindak lanjut tersebut dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Hubungan Masyarakat, dimana salah satu tugasnya adalah penyiapan bahan pengelolaan laporan hasil pengawasan internal dan eksternal, penyiapan bahan koordinasi pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal, penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal serta penyiapan bahan penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan. Dalam meningkatkan kualitas pengelolaan hasil pengawasan, analisis dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan formasi JFA pada bagian tersebut. Hasil evaluasi kebutuhan formasi tersebut yaitu penambahan formasi JFA keahlian dan keterampilan pada Peta Jabatan, sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

b. Topik Pengembangan SDM APIP

- 1) Inspektorat Jenderal telah memiliki peta kompetensi dalam bentuk analisis *talent mapping* dan kalender diklat sesuai dengan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, selanjutnya Inspektorat Jenderal sedang menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang akan menghasilkan dokumen HCDP tahun 2024-2027 bagi seluruh Auditor;
- 2) Pengembangan kompetensi dan sertifikasi bagi seluruh pegawai dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi. Pada tahun 2023 s.d bulan Juni 2024, telah diselenggarakan 55 diklat bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal. Jenis diklat yang diselenggarakan sebagai berikut.

Rekapitulasi Diklat Tahun 2023 s.d Juni 2024





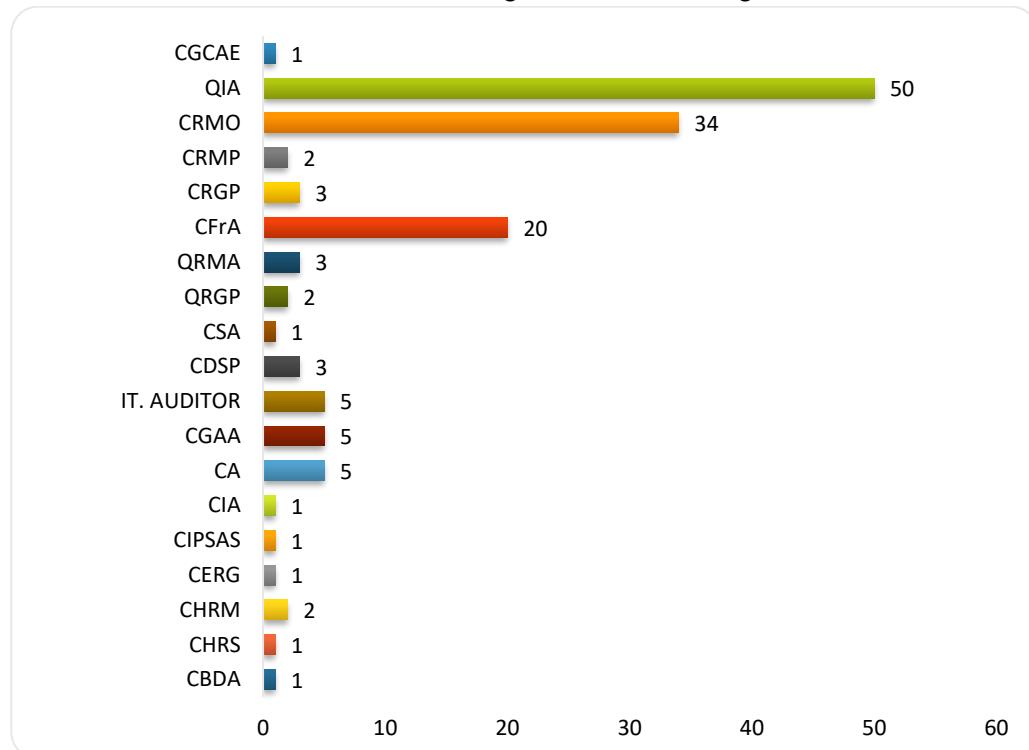
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Dalam rangka mendukung dan mendorong pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal khususnya dan Kementerian Perhubungan pada umumnya, pengembangan kompetensi SDM APIP juga difokuskan untuk menambah kompetensi terkait, di antaranya :

- a) Pelatihan Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
- b) Pelatihan *Certified Risk Management Officer* (CRMO);
- c) Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Risk Management Analyst* (QRMA);
- d) Pelatihan dan sertifikasi *Qualified Risk Governance Professional* (QRGP);
- e) Pelatihan Manajemen Risiko Sektor Publik for Executives;
- f) Pelatihan *Certified Government Risk Executive* (CGRE);
- g) *Workshop Optimizing Risk Management in Public Sector*; dan
- h) PKS Manajemen Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pengembangan kompetensi SDM APIP juga dilaksanakan melalui sertifikasi keahlian. Pada bulan Juni 2024, terdapat 141 pegawai Inspektorat Jenderal yang telah memiliki sertifikasi keahlian, dengan sebaran sebagai berikut.



- 3) Inspektorat Jenderal telah memiliki mekanisme penghargaan individu dan tim antara lain melalui penghargaan kepada tim audit terbaik dan penghargaan terhadap hasil telaah sejawat terbaik;
- 4) Inspektur Jenderal menjadi anggota eksekutif tidak tetap dan beberapa auditor menjadi anggota komite dalam Susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintahan Indonesia (AAIPI) periode Tahun 2021-2024. Selain itu, auditor juga aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan AAIPI, baik dalam komite pengembangan profesi maupun komite telaah sejawat. Kebijakan komite telaah sejawat juga telah diinternalisasi dalam pelaksanaan telaah



sejawat internal, baik tata cara pelaksanaannya maupun instrumen yang digunakan. Sejak tahun 2022, pelaksanaan telaah sejawat sudah dilakukan *quality control* oleh tim independen Inspektorat Jenderal;

- 5) Adanya komite kode etik sejak tahun 2023 yang bertujuan melakukan monitoring implementasi kode etik auditor serta membentuk Majelis Kode Etik untuk tindak lanjut adanya dugaan pelanggaran kode etik;
- 6) SDM Inspektorat Jenderal menjadi *role model* bagi pengembangan SDM di Kementerian Perhubungan melalui *coaching clinic* aplikasi SIMARKO, inisiasi implementasi dan pendampingan manajemen risiko, inisiasi penyusunan HCDP dan audiensi Komite Audit dengan Menteri.

2. Elemen Praktik Profesional

Hasil penilaian mandiri Elemen Praktik Profesional mendapatkan skor 0,72 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,540 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada seluruh topik pada elemen ini. Rincian skor per topik sebagai berikut:

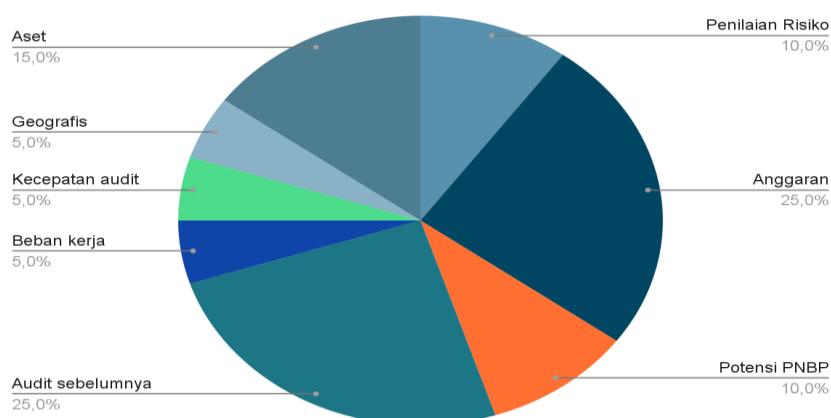


a. Topik Perencanaan Pengawasan

- 1) PKPT telah dilaksanakan evaluasi secara berkelanjutan dari tahun 2021 s.d 2024, baik evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil. Evaluasi atas kebijakan penyusunan PKPT, telah dilaksanakan evaluasi SOP Penyusunan PKPT 044/SOP/ITJEN/12/2019 tanggal 26 Desember 2019. Evaluasi atas PKPT telah dilaksanakan dari tahun 2021-2022 secara tahunan dan mulai tahun 2023 dilaksanakan secara triwulan. Sebagai upaya agar aktivitas pengawasan intern yang dilakukan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang konkret bagi *key stakeholder* dan rekomendasi yang berdampak bagi organisasi, Inspektorat Jenderal menginisiasi penyusunan PKPT tahun 2024 dengan Agenda Utama Pengawasan (AUP). AUP disusun dengan menyelaraskan (*cascade*) kinerja organisasi secara *top-down* dan hasil pengawasan akan disintesakan secara *bottom up* berupa informasi hasil pengawasan (Insilwas) terhadap isu strategis dan fokus pengawasan.



- 2) Pengawasan intern Inspektorat Jenderal yang direncanakan dengan mempertimbangkan informasi profil risiko seluruh audit di tahun 2024 (593), isu strategis, *highlight* kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan atau hal-hal yang menjadi fokus dan direktif langsung pimpinan. Penentuan profil dan skala risiko audit dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.



Implementasi manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2023-2024 telah dilakukan secara intensif. Sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko di Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Menindaklanjuti pedoman tersebut, telah ditetapkan:

- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Selera Risiko pada Tingkat Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan; dan
- Piagam Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan.

Selain itu, dalam rangka digitalisasi proses manajemen risiko untuk tingkat entitas Eselon I, Eselon II Pusat dan UPT Mandiri, telah dibangun Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO). Inspektorat Jenderal secara intensif melakukan upaya-upaya untuk mendorong percepatan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan, melalui:

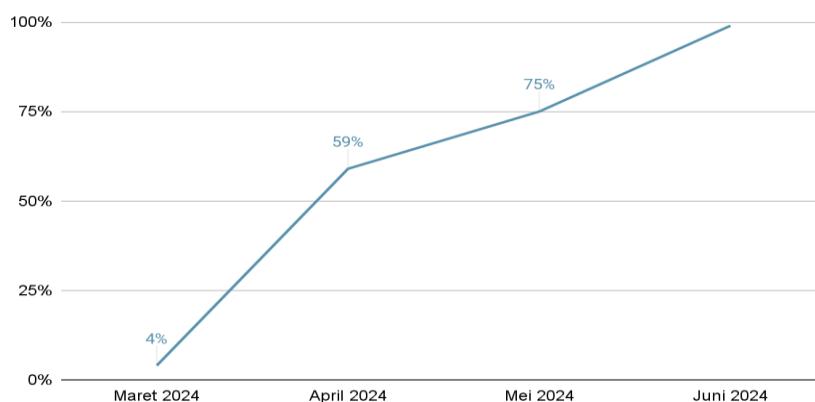
- Mengadakan Pelatihan Teknis Substansi Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) dan Sertifikasi *Certified Government Risk Executive*



(CGRE) bagi pimpinan Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- b) Pendampingan penyusunan manajemen risiko pada audit, baik di lingkup kantor pusat Kementerian Perhubungan maupun UPT;
- c) Sosialisasi dan *coaching clinic* Aplikasi SIMARKO.

Perkembangan digitalisasi manajemen risiko melalui aplikasi SIMARKO di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dilihat melalui grafik berikut.



b. Topik Penjaminan dan Peningkatan Kualitas

Penjaminan dan peningkatan kualitas APIP dilaksanakan melalui telaah sejawat dan survei kepuasan pengawasan. Pelaksanaan penjaminan kualitas tersebut telah dilakukan secara berkala setiap tahun, serta dilakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasilnya.

Telaah sejawat Inspektorat Jenderal telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Telaah Sejawat AAIP, baik dari segi instrumen, indikator dan mekanisme penilaianya. Mekanisme penilaian telaah sejawat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap penilaian oleh tim telaah sejawat antar Inspektorat dan tahap *quality control* oleh tim *quality control* yang independen. Setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil telaah sejawat, sebagai rangkaian dalam persiapan telaah sejawat tahun berikutnya.

Survei kepuasan pengawasan dilaksanakan untuk menilai kepuasan *stakeholder* terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Survey kepuasan telah dilaksanakan kepada Menteri Perhubungan, pejabat Eselon I dan perwakilan pegawai audit. Setiap tahun dilaksanakan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil survei kepuasan pengawasan, sebagai rangkaian dalam persiapan survei kepuasan pengawasan tahun berikutnya.

3. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

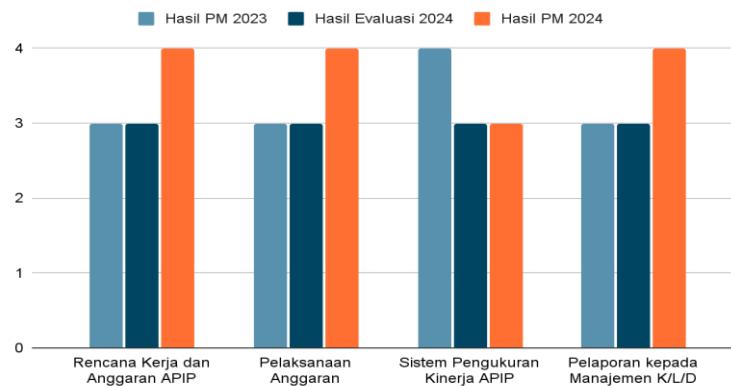
Hasil penilaian mandiri Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mendapatkan skor 0,2250 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,1950 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada Topik Rencana Kerja dan Anggaran



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



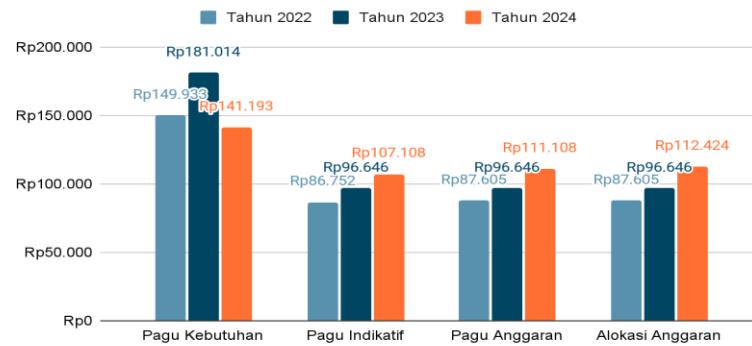
APIP, Topik Pelaksanaan Anggaran dan Topik Pelaporan kepada Manajemen K/L/D.
Rincian skor per topik sebagai berikut:



a. Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP

Rencana kerja dan anggaran (RKA) APIP telah disusun secara konkret sesuai isu dan kebijakan pimpinan, kegiatan berisiko tinggi, penyelesaian temuan berulang, dan masalah aktual lainnya. Penyusunan rencana kerja dan anggaran juga mempertimbangkan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan. Rencana kerja dan anggaran (RKA) APIP serta rencana kerja organisasi telah dievaluasi secara berkelanjutan tiga tahun berturut-turut. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti pada penyusunan RKA periode berikutnya. Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan terhadap nilai anggaran APIP dari tahun 2022-2024 sebagai berikut.

Perkembangan RKA APIP (dalam juta rupiah)

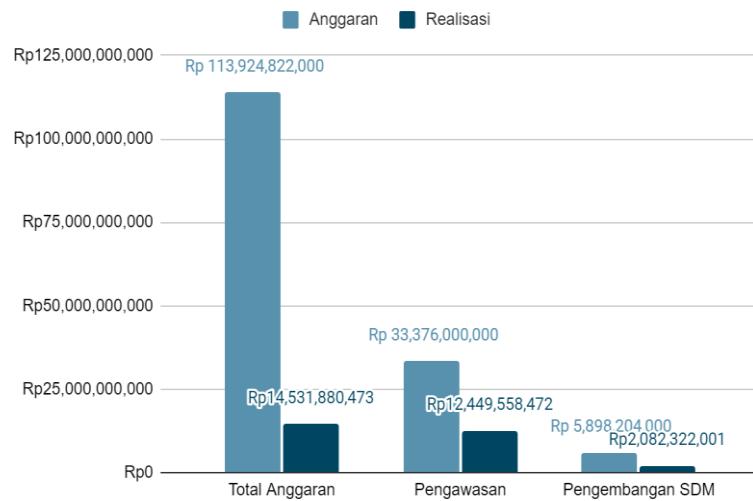


b. Topik Pelaksanaan anggaran

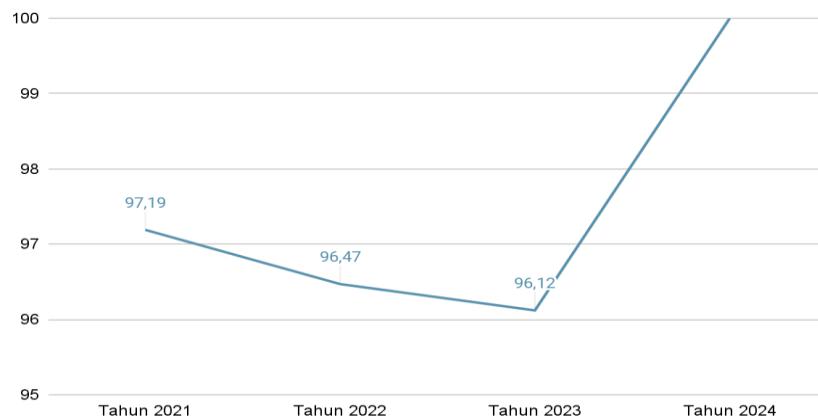
Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dilaksanakan secara memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien. Komposisi dan realisasi anggaran Inspektorat Jenderal posisi TW II tahun 2024 sebagai berikut.



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



Inspektorat Jenderal mengembangkan Aplikasi SiAU modul keuangan, sebagai media digitalisasi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sistem pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran APIP telah dilakukan evaluasi secara berkala, melalui rapat monitoring pelaksanaan anggaran triwulan dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran juga telah dimanfaatkan dalam pelaksanaan anggaran periode berikutnya. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran juga ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai IKPA selama 4 tahun berturut-turut, sebagaimana grafik berikut.



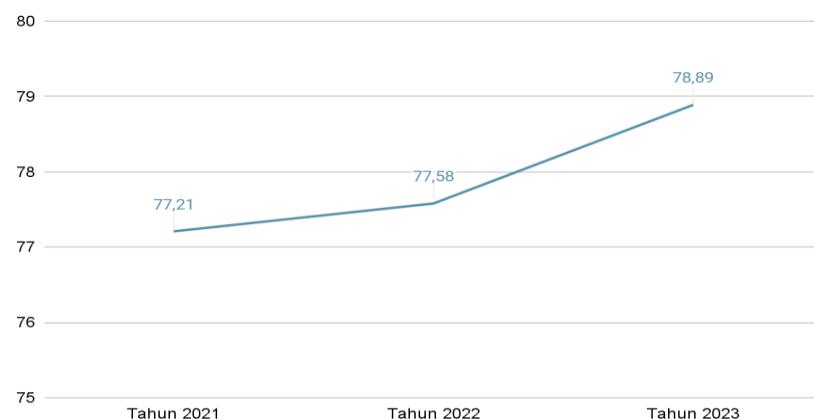
c. Topik Sistem Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja APIP dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja APIP telah meng-cascade dari kinerja Kementerian Perhubungan dan pengukuran kinerja organisasi ini telah dilakukan cascading sampai dengan level individu (SDM APIP). Implementasi pengukuran kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan memanfaatkan aplikasi e-performance dan pengukuran kinerja individu di lingkungan Kementerian



Perhubungan memanfaatkan aplikasi *e-kinerja*. Aplikasi *e-performace*, *e-kinerja* dan *e-monitoring* (aplikasi pengukuran kinerja anggaran) telah terintegrasi, sehingga sudah ada keterkaitan langsung antara ketercapaian kinerja organisasi, kinerja keuangan dan kinerja individu.

Sistem pengukuran kinerja telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan 3 tahun berturut-turut melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi yang dilaksanakan telah meningkatkan dukungan terhadap pencapaian tujuan serta mewujudkan akuntabilitas APIP, sebagaimana ditunjukkan dalam hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal tahun 2021-2023 yang mengalami peningkatan, sebagaimana grafik berikut.



Selain itu, pedoman pelaksanaan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan evaluasi dan sedang direvisi guna menyesuaikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi pelaksanaan evaluasi SAKIP juga dilaksanakan yang mana salah satu hasilnya adalah sedang dibangun Aplikasi MySAKIP, guna digitalisasi pelaksanaan evaluasi SAKIP, yang ditargetkan dapat dimanfaatkan pada tahun 2025.

d. Topik Pelaporan kepada Manajemen

Inspektorat Jenderal secara berkala melaporkan kinerja organisasi, baik secara triwulan melalui Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) dan tahunan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pelaporan tersebut telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui evaluasi SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP terkait pelaporan kinerja telah ditindaklanjuti guna perbaikan kinerja organisasi ke depan.

4. Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi

Hasil penilaian mandiri Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi mendapatkan skor 0,1800 pada level 3, hasil yang sama dengan evaluasi tahun 2023. Rincian skor per topik sebagai berikut:



INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



a. Topik Pengelolaan Komunikasi Intern APIP

Inspektorat Jenderal telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi/ aplikasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal untuk mendukung kinerja organisasi, serta berbagai kegiatan yang menjadi wadah berbagi informasi, rencana pengawasan, dan hasil pengawasan internal Inspektorat Jenderal melalui dialog kinerja, apel pagi, evaluasi capaian kinerja, laporan harian, jiwa korsa, rapat manajemen, rapat dinas, dan survei kepada auditor. APIP telah mengembangkan pengelolaan komunikasi intern yang lebih efektif dan dinamis melalui aplikasi Sistem Informasi Audit (SiAU) yang menampilkan secara *real-time* kegiatan pengawasan seperti Audit, dan Reviu sebagaimana dokumentasi komunikasi intern pada aplikasi Siau terlampir.

Dalam rangka melakukan pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan komunikasi internal di Inspektorat Jenderal, telah dilaksanakan survei kepuasan terhadap pola hubungan komunikasi internal di Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan yang menghasilkan saran dan masukan sebagai bahan evaluasi pola hubungan internal APIP.

Salah satu tindak lanjut evaluasi kebijakan pola koordinasi dan sistem komunikasi internal dilaksanakan melalui evaluasi terhadap perubahan PM 41 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, yang telah diubah dengan PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern.

b. Topik Hubungan APIP dengan Manajemen

Inspektorat Jenderal berpartisipasi secara aktif dalam forum bersama manajemen di Kementerian Perhubungan untuk memberikan nilai tambah, antara lain melalui keterlibatan sebagai anggota Satgas tingkat Kementerian (Monitoring Angkutan Lebaran dan Angkutan Natal dan Tahun Baru, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Peningkatan Kapabilitas APIP), narasumber, dan pendampingan, dll. Partisipasi APIP dalam Satgas di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilakukan evaluasi, antara lain evaluasi terkait keterlibatan Inspektorat Jenderal pada Satgas Monitoring Angkutan Lebaran.

APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam



pengawasan intern dan proses bisnis kepada Satker di Kementerian Perhubungan, antara lain melalui *coaching clinic* aplikasi SIMARKO, pendampingan implementasi MR kepada unit kerja, dan *coffee morning* pembahasan kegiatan pengawasan dengan seluruh unit kerja.

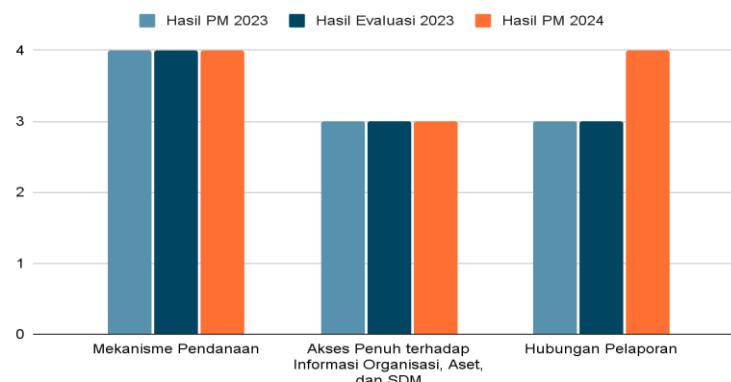
- c. Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan
- APIP telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang dituangkan ke dalam PKPT Inspektorat Jenderal.

APIP telah melakukan kegiatan koordinasi dan berbagi informasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan seperti KPK, BPK dan BPKP, serta pihak lainnya, sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dengan BPK RI dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK agar tidak terjadi duplikasi dengan pengawasan Itjen;
- 2) Koordinasi dengan KPK dan stakeholder lembaga/ pemda lain terkait kegiatan Stranas PK, Itjen sebagai *focal point*, serta terkait pelaksanaan SPI;
- 3) Koordinasi dengan BPK RI dan BPKP terkait tindak lanjut hasil pengawasan, dll;
- 4) Perjanjian Kerja Sama Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan di Lingkungan Kementerian Perhubungan antara Kementerian Perhubungan dan BPKP;
- 5) Penyusunan MoU bersama Ombudsman tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan;
- 6) Penyusunan MoU bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) tentang Perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan ahli dalam tindak pidana di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7) Perjanjian Kerja Sama antara KPK dengan Inspektorat Jenderal tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

5. Elemen Struktur Tata Kelola

Hasil penilaian mandiri Elemen Struktur Tata Kelola mendapatkan skor 0,4400 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,4000 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada Topik Hubungan Pelaporan. Rincian skor per topik sebagai berikut:





a. Topik Mekanisme Pendanaan

Alokasi anggaran Inspektorat Jenderal disusun dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (*assurance and consulting services*), dan diusulkan melalui aplikasi e-planning, SAKTI, dan KRISNA, serta telah dilakukan reviu oleh APIP. Rencana kerja dan anggaran (RKA) APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan tiga tahun berturut-turut. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti pada penyusunan RKA periode berikutnya.

b. Topik Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM

Kebijakan dalam Piagam Audit, PM 41 Tahun 2019 dan SOP Audit telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan. Kebijakan dapat mengakses informasi dalam Piagam Audit, telah diimplementasikan dalam setiap penugasan melalui penyampaian surat Permintaan Dokumen/Data, Permintaan Akses SPSS, dan Pemberitahuan Audit Kinerja. Dalam pelaksanaan penugasan, APIP dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM secara penuh dan informasi tersebut telah dilampirkan dalam KKA dan data umum LHA.

Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap kebijakan pelaksanaan aktivitas pengawasan tanpa pembatasan akses dan intervensi melalui evaluasi terhadap PM 41 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, dan diubah menjadi PM 13 Tahun 2022 namun pada perubahan di tahun 2022 tidak mengubah pasal 39 (a) tentang akses informasi karena dianggap masih relevan dan evaluasi terhadap piagam pengawasan internal.

c. Topik Hubungan Pelaporan

Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dilaporkan kepada Menteri Perhubungan melalui laporan agenda utama pengawasan triwulan, Ikhtisar Hasil Audit Triwulan, Laporan Pengawasan Semester, laporan kinerja tahunan Inspektorat Jenderal, pelaporan bulanan melalui *e-performance*, laporan monitoring capaian kinerja triwulan serta laporan hasil pengawasan strategis.

Inspektorat Jenderal melakukan evaluasi pada pelaporan kegiatan pengawasan secara berkala melalui kegiatan seperti Reviu Laporan Kinerja Tahunan, Evaluasi SAKIP Tahunan serta evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan dan Semesteran (IHAT dan LAPSEM).

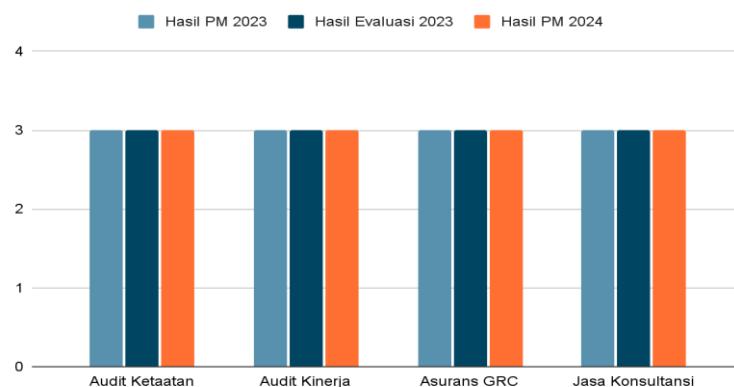
6. Elemen Peran dan Layanan

Hasil penilaian mandiri Elemen Peran dan Layanan mendapatkan skor 3,00 pada level 3, hasil yang sama dengan evaluasi tahun 2023. Rincian skor per topik sebagai berikut:



INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



a. Topik Audit Ketaatan (*Compliance Auditing*)

Pelaksanaan audit ketaatan Inspektorat Jenderal berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;
- 2) PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern;
- 3) KP-ITJEN 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 4) SOP Pelaksanaan Audit dengan Tujuan Tertentu.

Pedoman tersebut telah dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa pedoman pelaksanaan audit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku. Pada triwulan I tahun 2024, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit dengan tujuan tertentu dan audit tematik, dan hasil audit telah memberikan rekomendasi sesuai isu strategis organisasi dan *highlight* kegiatan prioritas Kementerian Perhubungan, sebagai berikut.

No	Sasaran	Isu	Fokus	Objek
1.	Terwujudnya Konektivitas Nasional (SS1)	Penyelenggaraan Subsidi Dukungan Kawasan Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Efektivitas pemberian subsidi dukungan KSPN dan IKN	<ul style="list-style-type: none"> • BPTD Kelas III Provinsi DIY • BPTD Kelas II Provinsi NTB • BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Timur
		Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Efektivitas, efisiensi, ekonomis serta risiko <i>fraud</i> dalam pelaksanaan pekerjaan infrastuktur konektivitas prasarana perkeretaapian	BTP Kelas I Bandung
2.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan (SS2)	Pekerjaan Kontraktual pada Tahun 2023 yang tidak terselesaikan	Ketidakterjadinya <i>fraud</i> atas pekerjaan terlambat	<ul style="list-style-type: none"> • BPTD Kelas II Sumatera Utara • KSOP Kelas IV Probolinggo • UPP Kelas III Masalembu • UPP Kelas III Bade • UPP Kelas III Rembang

- 1) Perencanaan audit ketaatan telah:

- a) Dikomunikasikan kepada *stakeholder/auditee/manajemen K/L*;



- b) Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan;
 - c) Menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama.melalui penyusunan PKPT;
 - d) Mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit (termasuk PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel).;
 - e) Dikembangkan Program Kerja Audit (PKA).
- 2) Pelaksanaan audit ketaatan telah:
- a) Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit;
 - b) Mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA);
 - c) Mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh;
 - d) Mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (*abuse*).
 - e) Melalui supervisi dan reviu berjenjang;
 - f) Membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.
- 3) Hasil pengawasan audit ketaatan telah memberikan rekomendasi atas sasaran/program/kegiatan prioritas K/L sebagaimana telah dilaporkan melalui Laporan Agenda Utama Pengawasan (AUP) dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh *stakeholders*.

b. Topik Audit Kinerja (Performance Auditing)

Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko Inspektorat Jenderal berpedoman pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan *pilot* audit kinerja berbasis risiko pada 6 UPT yang telah menerapkan manajemen risiko, setelah dilakukan pendampingan penyusunan manajemen risiko secara intensif. Pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko pada UPT berikut:

No	Nomor ST	Auditi
1.	ST-ITJEN I/1-157 Tahun 2023	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
2.	ST-ITJEN I/1-158 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VIII
3.	ST-ITJEN I/1-159 Tahun 2023	Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IX
4.	ST-ITJEN I/1-142 Tahun 2023	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
5.	ST-ITJEN I/1-143 Tahun 2023	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran
6.	ST-ITJEN I/1-143A Tahun 2023	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Berdasarkan PKPT Tahun 2024, telah ditetapkan 18 UPT yang menjadi *pilot project* penerapan Manajemen Risiko, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, dan Audit Kinerja Berbasis Risiko yang ditargetkan selesai pada TW IV Tahun 2024.

- 1) Perencanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko telah:



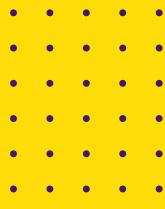
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



- a) Dikomunikasikan kepada *stakeholder/auditee/manajemen K/L*;
 - b) Mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit;
 - c) Mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit;
 - d) Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati;
 - e) Dikembangkan Program Kerja Audit (PKA) Pendahuluan dan Program Kerja Audit (PKA) Pengujian.
- 2) Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko telah:
- a) Dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja;
 - b) Mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian;
 - c) Mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut;
 - d) Mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA);
 - e) Melalui supervisi dan reviu berjenjang;
 - f) Membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.
- 3) Hasil pengawasan audit kinerja berbasis risiko telah memberikan rekomendasi atas sasaran/program/kegiatan prioritas K/L sebagaimana telah dilaporkan melalui Laporan Agenda Utama Pengawasan (AUP) dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan oleh *stakeholders*.
- c. Topik Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L (*Assurance on GRC*)
- Pelaksanaan asurans atas GRC dilaksanakan melalui kegiatan penjaminan kualitas SPIP yang berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D. Penjaminan kualitas SPIP dilaksanakan pada 140 satker yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan minimal 40% dari total nilai anggaran Kemenhub, 3 sasaran strategis dan 4 satker wajib. Sebagai upaya meningkatkan hasil penjaminan kualitas SPIP telah dilakukan bimbingan teknis kepada Tim Penjaminan Kualitas SPIP Inspektorat Jenderal dan monitoring pelaksanaan *area of improvement* secara berkala.
- d. Topik Jasa Konsultansi (*Consulting Services*)
- Inspektorat Jenderal telah memberikan jasa konsultansi, berupa asistensi, pendampingan, sosialisasi, bimbingan teknis, *coaching clinic* dan pemberian konsultasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberian jasa konsultansi berpedoman pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor PR-ITJEN 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Konsultasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. Inspektorat Jenderal memiliki Aplikasi Sistem Tanya dan Konsultasi (SITAKON) sebagai media bagi *stakeholder APIP* untuk melaksanakan konsultasi. Hasil pemberian jasa konsultansi Inspektorat Jenderal telah dimanfaatkan oleh auditi sebagaimana terlihat dalam perkembangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan.



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



Laporan Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Kemenhub Tahun 2024



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP

Bersama ini kami menyatakan bahwa kami telah melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP dengan simpulan sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelola Sumber Daya Manusia	4	0,6300
2.	Praktik Profesional	4	0,7200
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,2250
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,1800
5.	Struktur Tata Kelola	4	0,4400
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,2000
Simpulan Entitas		3	3,3950

Kami telah membangun infrastruktur (berupa Kebijakan, SOP, Pedoman, Petunjuk Teknis, dsb) dan mengimplementasikan setiap topik Kapabilitas APIP secara berkelanjutan selaras dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia sehingga terwujud peran APIP yang efektif.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP, kami perlu terus menerus melaksanakan dan menginternalisasi dengan baik seluruh infrastruktur yang didukung dengan evidence pemenuhan kapabilitas APIP secara berkesinambungan termasuk melakukan peran dan layanan dalam rangka mencegah, menangkal, dan mendeteksi tindak penyimpangan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Demikian pernyataan ini dibuat, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

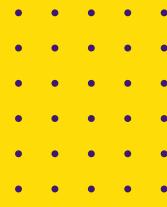
Jakarta, 28 Juni 2024

Inspektur Jenderal,



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.



SURAT TUGAS PENILAIAN MANDIRI TAHUN 2024

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL		
JL. MERDEKA BARAT II JAKARTA 16110	TEL. (021) 3456919 3813154 3807656	FAX : (021) 3813154 TLX : 44310 DEPHUB IA	FAX :
<p style="text-align: center;">Surat Tugas Nomor : ST-1000/111 TAHUN 2024</p> <p>Dasar : Surat Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor KP-ITJEN 38 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan TA 2024</p> <p>Memberi Tugas</p> <p>Kepada : Tim Self Assessment Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah TA 2024 (daftar terlampir)</p> <p>Untuk : 1. Melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 pada: Tanggal : 4 s.d 10 Juni 2024 2. Melaporkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal</p> <p>Tembusan 1. Inspektor Jenderal; 2. Inspektor I; 3. Inspektor II; 4. Inspektor III; 5. Inspektor IV; 6. Inspektor Investigasi.</p> <p style="text-align: right;"></p>			





KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JI. MERDEKA BARAT 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3456919
3813154
3507656

FAX : (021) 3813154
TLX : 44310 DEPHUB IA
FAX :

Surat Tugas

Nomor : ST-ITJEN 175 TAHUN 2024

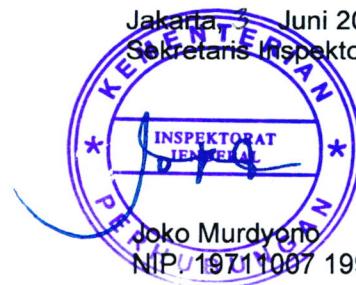
Dasar : Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 38 Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024 Tentang Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan TA.2024

Memberi Tugas

Kepada : Tim *Self Assessment* Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah TA.2024 (daftar terlampir)

Untuk :
1. Melakukan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Perhubungan Tahun 2024 pada:
Tanggal : 4 s.d 10 Juni 2024
2. Melaporkan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Perhubungan Tahun 2024 kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal

Jakarta, 1 Juni 2024
Sekretaris Inspektorat Jenderal



Tembusan

1. Inspektur Jenderal;
2. Inspektur I;
3. Inspektur II;
4. Inspektur III;
5. Inspektur IV;
6. Inspektur Investigasi.

Lampiran Surat Tugas Sekretaris Inspektorat Jenderal
Nomor : ST-ITJEN 175 TAHUN 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

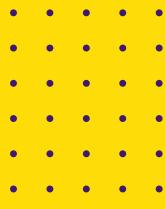
Daftar Nama Tim *Self Assessment* Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah TA.2024

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. Maizar Radjin, S.E., M.Ak., QIA., QRMA.	198203302008121001	IV/a	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi
2	Wahyu Sunyoto Hari Adi, S.Ip, M.T.	198005182008121001	III/d	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
3	Lukman Gunadi, S.SiT, M.MTr	198202282005021001	III/d	Auditor Muda
4	Dodi Tresna Yudiatna, S.E., M.Sc., CRMO., CRMP.	198001242006041001	III/d	Auditor Muda
5	Roy Bernardo Simanjuntak, S.Si.T., M.Sc. CRMO	198202192006041001	III/d	Auditor Muda
6	Hera Novianti, S.E., M.Ak., CRMO	197411232006042001	III/d	Auditor Muda
7	Nyoman Hartati, SAB., C.Fr.A	197308121993032001	III/c	Auditor Muda
8	Ayis Suti Wibowo, S.Psi. M.A.P.	198302272009121001	III/c	Auditor Muda
9	Bonar Wahyu Hidayat, S.T.	199512092020121002	III/a	Auditor Pertama
10	Alfida Rahmadani, A.Md.	199611172020122009	II/c	Auditor Terampil
11	Meyla Ekana Putri, A.Md.Tra.	200005262021122001	II/c	Auditor Terampil
12	Safira Astrinita, A.Md.	199601012022032030	II/c	Auditor Terampil
13	Raras Alifa Harmiati, A.Md.	199606092016122001	II/d	Analis Organisasi/Ketua Tim Penataan Organisasi dan Tata Laksana
14	Putri Ajeng Pratiwi, S.Ak.	199401102016122001	III/a	Analis Organisasi
15	Iwan Sumarlin, S.T.	199209012018021002	III/a	Pengelola Tata Usaha





INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PROFIL APIP

TAHUN 2023



Laporan Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Kemenhub Tahun 2024

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN APIP TAHUN 2023

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Anggaran K/L/D	Anggaran APIP					
		Total Anggaran APIP	% Total Anggaran APIP	Operasional	% Anggaran	Program Peningkatan	% Anggaran Program
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / (2)	(5)	(6) = (5) / (3)	(7)	(8) = (7) / (3)
Triwulan I	Rp 36.686.586.653.000	Rp 96.646.131.000	0,26%	Rp 29.974.682.000	31,01%	Rp 5.107.935.000	5,29%
Triwulan II	Rp 36.686.586.653.000	Rp 96.646.131.000	0,26%	Rp 29.974.683.000	31,01%	Rp 5.229.935.000	5,41%
Triwulan III	Rp 36.686.586.653.000	Rp 96.646.131.000	0,26%	Rp 30.167.952.000	31,21%	Rp 5.229.935.000	5,41%
Triwulan IV	Rp 36.686.586.653.000	Rp 101.814.783.000	0,28%	Rp 28.661.743.000	28,15%	Rp 5.014.935.000	4,93%

Posisi	Realisasi Anggaran				Realisasi Operasional Pengawasan			
	Operasional Pengawasan		Program Peningkatan SDM		Assurance		Consulting	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(9)	(10) = (9) / (5)	(11)	(12) = (11) / (7)	(13)	(14) = (13) / (9)	(15)	(16) = (15) / (9)
Triwulan I	Rp 4.006.389.162	13,37%	Rp 1.788.229.329	35,01%	Rp 3.783.424.675	94,43%	Rp 222.964.487	5,57%
Triwulan II	Rp 10.120.229.314	33,76%	Rp 2.601.658.840	49,75%	Rp 9.480.151.844	93,68%	Rp 640.077.470	6,32%
Triwulan III	Rp 18.648.962.018	61,82%	Rp 3.788.135.087	72,43%	Rp 17.233.315.040	92,41%	Rp 1.415.646.978	7,59%
Triwulan IV	Rp 27.923.600.076	97,42%	Rp 5.013.598.629	99,97%	Rp 25.905.198.110	92,77%	Rp 2.018.401.966	7,23%

*Assurance (Audit Kinerja ADTT Reviu Evaluasi Pemantauan Pengawalan dan supervisi Pengawasan dan pengendalian penerimaan CPNS Laporan PK atas Penilaian Mandiritas SPIP Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP)

Consulting (Pemutakhiran TLHA Pencegahan KKN (Stranas PK UPG) Pengelolaan Zona Zi Laporan Hasil Reviu RKBMN Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan)

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN APIP TAHUN 2023

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Jumlah Realisasi Penugasan Kegiatan Asurans							
	Audit Ketaatan	Audit Kinerja	Asurans atas	Audit	Audit dengan	Reviu	Evaluasi	Pemantauan/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Triwulan I	15	23	2	0	5	58	54	34
Triwulan II	0	42	2	0	12	9	46	27
Triwulan III	0	43	1	0	10	63	12	18
Triwulan IV	6	35	1	0	10	112	12	27

Posisi	Jasa Konsultansi			
	Asurans	Bimtek	Pendampingan	Jasa
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Triwulan I	1	4	5	17
Triwulan II	0	5	1	3
Triwulan III	0	3	2	1
Triwulan IV	0	2	13	9

PERAN APIP DALAM PENGAWASAN TAHUN 2023

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Jenis Pengawasan	Jumlah Objek Pengawasan	Nilai Kegiatan yang Diawasi	Temuan		Ditindaklanjuti		% Temuan yang Ditindaklanjuti (9) = (8) / (6)
				Jumlah Kejadian	Nilai	Jumlah Kejadian	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Triwulan I	Audit Ketaatan	15	Rp 226.548.051.429	56	Rp 36.745.637.969	5	Rp -	- 0,00%
	Audit Kinerja	23	Rp 8.966.118.317.220	24	Rp -	0	Rp -	- -
	Asurans atas GRC	2	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	- -
Triwulan II	Audit Ketaatan	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	- -
	Audit Kinerja	42	Rp 11.173.867.587.366	26	Rp 535.202.364	0	Rp -	- 0,00%
	Asurans atas GRC	2	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	- -
Triwulan III	Audit Ketaatan	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	- -
	Audit Kinerja	43	Rp 7.278.401.811.692	51	Rp 404.954.135	4	Rp -	- 0,00%
	Asurans atas GRC	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	- -
Triwulan IV	Audit Ketaatan	8	Rp 3.543.041.400.970	8	Rp -	0	Rp -	- -
	Audit Kinerja	35	Rp 3.980.161.696.047	38	Rp -	2	Rp -	- -
	Asurans atas GRC	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	- -

PERAN DAN LAYANAN APIP AKTIVITAS PENGAWASAN ATAS KETAATAN

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual	Inspektorat Investigasi	1. Pekerjaan Pengembangan Container Yard Pelabuhan Tual TA. 2022	Rp 726.040.367.000.000,00	PS.104/1/2/ITJEN/2023 10 Februari 2023	10103	3	Rp 99.762.096.710.000,00
2	Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas II Umbu Mehang		Pembangunan Terminal Baru Termasuk Interior Bandar Udara Umbu Mehang Kunda-Waingapu	Rp 683.831.080.000.000,00		10103	2	Rp 59.595.816.770.000,00
3	Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XVII Provinsi		Pekerjaan Rehaabilitasi Pelabuhan Penyebrangan Sei	Rp 143.448.570.180.000,00		10103	2	Rp 15.143.078.410.000,00
4	Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara	Inspektorat Investigasi	Pekerjaan Pembangunan Cadet Dormitory Building 5 Lantai Type Break	Rp 37.960.705.000,00	PS.101/1/1/ITJEN/2023 30 Januari 2023	20203	1	Rp 3.895.159.540.000,00
5	BTP Semarang Provinsi Jawa Tengah		Pembangunan JPO, Sterilisasi, Peron di Stasiun Purwosari dan Shelter di Stasiun Gawok	Rp 16.813.412.000,00		20201	1	Rp 172.343.341.420.000,00
6	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Ambon Provinsi Maluku		ADTT atas Pelayanan Kapal dan Barang pada Pelabuhan yang Menerapkan Sistem INAPORTNET	Rp 65.352.502.000,00		20302	1	Rp 1.403.661.100.000,00
7	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat Investigasi	ADTT atas Pelayanan Kapal dan Barang pada Pelabuhan yang Menerapkan Sistem INAPORTNET	Rp 14.890.352.870,00	PS.104/1/8/ITJEN/2023 27 Maret 2023	30305	1	Rp 2.060.608.250.000,00
8	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Bontang Provinsi Kalimantan Timur		ADTT atas Pelayanan Kapal dan Barang pada Pelabuhan yang Menerapkan Sistem INAPORTNET	Rp 10.055.193.000,00		1. 01.04	1	Rp 289.809.265,04
9	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau		ADTT atas Pelayanan Kapal dan Barang pada Pelabuhan yang Menerapkan Sistem INAPORTNET	Rp 8.231.056.340,00		1. 01.01	1	Rp 752.374.350,67
10	KSOP Kelas IV Tanjung Pandan Provinsi Bangka Belitung	Inspektorat Investigasi	ADTT atas Pelayanan Kapal dan Barang pada Pelabuhan yang Menerapkan Sistem INAPORTNET	Rp 14.556.979.000,00	PS.104/1/13/ITJEN/2023 3 Maret 2023	20301	1	Rp -
11	BPTD WIL.III Prov.Sumatera Barat		Audit Tematik terkait Tata Kelola UPPKB	Rp 130.805.563.520.000,00		20302	1	Rp -
						20203	1	
						20207	1	
						10406	1	
						20105	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	BPTD WIL.IX Prov.Jawa Barat	Inspektorat I	Audit Tematik terkait Tata Kelola UPPKB		PS.003/1/1/ITJEN/2023 16 Maret 2023	10301	1	
						20305	1	
						20301	1	
						20302	1	
						30305	2	
						20101	1	
						30307	2	
13	BPTD WIL.VII Prov.Sumatera Selatan	Inspektorat I	Audit Tematik terkait Tata Kelola UPPKB	Rp 1.530.920.000.000,00	PS.003/1/4/ITJEN/2023 27 Maret 2023	20301	1	
						30304	1	
						10207	1	
14	BPTD WIL.X Prov.Jawa Tengah & DIY	Inspektorat I	Audit Tematik terkait Tata Kelola UPPKB	Rp 32.082.843.590.000,00	PS.003/1/2/ITJEN/2023 16 Maret 2023	20301	1	
						20207	1	
						20303	1	
						20304	1	
						30302	1	
15	BPTD WIL.XI Prov.Jawa Timur	Inspektorat I	Audit Tematik terkait Tata Kelola UPPKB		PS.003/1/3/ITJEN/2023 16 Maret 2023	20201	3	
						20302	2	
						20207	1	
16	BTP Kelas I Medan	Inspektorat II	Audit Tematik Terkait Dukungan Manajemen, Angkutan Perintis, Belanja Barang dan Tata Kelola BMN Pada BTP Kelas I Medan TA.2023	Rp 1.013.110.350.000,00	PS.006/1/8/ITJEN/2023 30 November 2023	01.04	4	-
						01.01	2	Rp67.092.590,00
						02.02	2	
						02.03	1	
						03.03	1	
17	BTP Kelas II Padang	Inspektorat II	Audit Tematik Terkait Dukungan Manajemen, Angkutan Perintis, Belanja Barang dan Tata Kelola BMN Pada BTP	Rp 506.421.458.000,00	PS.106/1/6/ITJEN/2023 28 November 2023	02.03	2	
						03.02	2	
18	BTP Kelas I Surabaya	Inspektorat II				02.03	4	
		Audit Tematik Dukungan Manajemen, Belanja Barang dan Tata Kelola BMN Pada BTP	Rp 996.633.417.000,00	PS.106/1/7/ITJEN/2023 15 Desember 2023 LHA No. 22/LHA/IT.II/XI/2023	02.02	1		
					02.01	1		
19	BPKA Sulawesi Selatan	Inspektorat II	Audit Tematik Dukungan Manajemen, Belanja Barang dan Tata Kelola BMN Pada BPKA-SS	Rp 743.114.072.000,00	PS.006/1/9/ITJEN/2023 22 Desember 2023 LHA No. 23/LHA/IT.II/XI/2023 20 Desember 2023	01.02	1	
						01.04	2	
						02.02	3	
						02.03	3	
						03.03	1	
20	ADTT PSO PT PELNI dan Perintis Tahun 2023 pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut & KSOP Kelas III Tarakan di Provinsi DKI Jakarta Kalimantan Utara dan	Inspektorat III	Pelaksanaan ADTT dilakukan untuk mendapatkan data secara riil dilapangan atas penyelenggaraan angkutan laut perintis yang meliputi:	Rp 127.932.627.921,00	PS.104/2/3/ITJEN/2023 24 November 2023 LHA No. 09/LHA/IT.III/X/2023 31 Oktober 2023			
21	ADTT PSO PT PELNI dan Perintis Tahun 2023 pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut - KSOP Kelas II Kendari - KSOP Kelas II Bau Bau di Provinsi DKI Jakarta Sulawesi	Inspektorat III	- Kelengkapan / kelaikan kapal dan crew kapal - penjadwalan dan trayek kapal - Administrasi Pembayaran subsidi angkutan laut perintis	Rp 155.829.476.049,00	PS.104/2/3/ITJEN/2023 24 November 2023 ND 28/IT.III/X/2023 Oktober 2023			

PERAN DAN LAYANAN APIP AKTIVITAS PENGAWASAN ATAS KINERJA

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Direktorat Prasarana Perkeretaapian	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 2.730.880.443.000,00	SPL no. PS.306/2/2/ITJEN/2023 27 Maret 2023 LHA No. 01/LHA/IT.II/III/2023 24 Maret 2023	101	3	-
						102	1	-
						104	1	-
						202	2	-
						203	1	-
						301	1	-
						103	1	-
2	Politeknik Pelayaran Banten	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 253.366.642.000,00	SPL no. PS.104/1/7/ITJEN/2023 17 Maret 2023 LHA No. 02/LHA/IT.II/III/2023 17 Maret 2023	101	2	Rp 19.980.350,00
						202	3	-
						201	3	Rp 7.250.000.000,00
						104	1	-
						203	4	-
						104	2	-
3	Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 222.458.393.000,00	SPL no. PS.306/1/20/ITJEN/2023 16 Maret 2023 LHA No. 03/LHA/IT.II/III/2023 15 Maret 2023	101	1	Rp 52.748.280.000,00
						202	3	-
						201	1	-
						203	2	-
						104	2	-
4	Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 3.247.520.646.000,00	SPL no. PS.006/1/1/ITJEN/2023 28 April 2023 LHA No. 04/LHA/IT.II/IV/2023 27 April 2023	101	2	Rp 297.956.416,34
						203	1	-
						104	1	-
						202	1	-
						201	2	-
						303	1	-
						104	3	-
5	Politeknik Pelayaran Surabaya	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 402.520.520.000,00	SPL no. PS.008/1/1/ITJEN/2023 18 April 2023 LHA No. 05/LHA/IT.II/IV/2023 17 April 2023	101	1	-
						203	1	-
						202	1	-
						201	1	-
						104	1	-
6	Politeknik Penerbangan Surabaya	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 192.962.796.000,00	SPL no. PS.008/1/3/ITJEN/2023 28 April 2023 LHA No. 06/LHA/IT.II/IV/2023 27 April 2023	101	3	Rp 78.503.004,00
						201	2	-
						202	2	-
						203	2	-
						301	1	-
						303	1	-
						104	1	-
7	UPBU Gusti Sjamsir Alam	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 660.662.220.000,00	SPL no. PS.005/1/3/ITJEN/2023 7 Maret 2023 LHA No. 01 /LHA/IT.IV/II/2023	02.03	1	-
						01.07	1	-
						02.02	1	-
						01.03	1	-

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	UPBU Tebelian	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 218639037000.00	SPL no.PS.005/1/2/ITJEN/2023 7 Maret 2023	01.02	2	Rp 930.005.017,45
						01.07	3	-
						02.02	2	-
9	UPBU Rahadi Oesman	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 25599565480.00	SPL no.PS.005/1/5/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 03 /LHA/IT.IV/II/2023 7 Maret 2023	01.04	1	-
						01.07	1	-
						01.03	1	Rp 756.002.659,00
10	UPBU Kasiguncu	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 52269856000.00	SPL no.PS.005/1/4/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 04 /LHA/IT.IV/II/2023 7 Maret 2023	01.01	1	-
						01.07	1	Rp 600.000,00
						02.01	2	-
11	UPBU Morowali	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 75994594000.00	SPL no.PS.005/1/1/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 05 /LHA/IT.IV/II/2023	01.02	1	-
						01.04	2	-
12	Otoritas Bandar Udara Wilayah V	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 224828022000.00	SPL no.PS.005/1/8/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 07/LHA/IT.IV/II/2023 7 Maret 2023	01.02	1	
						01.04	4	
						01.03	3	
13	UPBU Komodo	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 282344254740.00	SPL no.PS.005/1/7/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 06/LHA/IT.IV/II/2023 7 Maret 2023	01.05	4	
						02.01	1	
						02.02	6	
14	UPBU Mali Alor	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 20545553000.00	SPL no.PS.005/1/9/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 08/LHA/IT.IV/II/2023 7 Maret 2023	03.03	6	
						01.07	2	
						03.01	1	
15	UPBU Sultan Muhammad Salahuddin - Bima	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 46784670000.00	SPL no.PS.005/1/7/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 10/LHA/IT.IV/II/2023	03.03	1	
						01.04	1	
						01.05	2	
						02.02	3	
						01.07	2	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	UPBU Sultan Muhammad Kaharuddin -Sembawa	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp 69074692000.00	SPL no.PS.005/1/10/ITJEN 2023 7 Maret 2023 LHA No. 09/LHA/IT.IV/II/2023 7 Maret 2023	01.04	2	
						01.07	3	
						01.05	1	
						01.03	2	
						02.02	1	
17	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo di Provinsi Maluku	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 137.926.686.000,00	SPL no.PS.004/1/5/ITJEN 2023 30 Maret 2023 LHA No. 05/LHA/IT.III/III/2023 28 Maret 2023	01.01	5	
						01.04	1	
						02.01	3	
						02.03	1	
						03.03	1	
18	Disnav Ambon di provinsi Maluku	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 296.033.525.000,00	SPL no.PS.004/1/6/ITJEN 2023 30 Maret 2023 LHA No. 06/LHA/IT.III/III/2023 28 Maret 2023	01.01	3	
						01.02	1	
						01.04	1	
						02.02	2	
						03.01	1	
						03.03	5	
19	Disnav Tual di provinsi Maluku	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 60.014.863.000,00	SPL no.PS.004/1/4/ITJEN 2023 30 Maret 2023	03.03	1	
						02.01	1	
						02.03	4	
20	Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 62.520.727.000,00	SPL no.PS.004/1/8/ITJEN 2023 31 Maret 2023	01.01	1	
						01.03	1	
						02.03	1	
21	UPP Jampea di provinsi Sulawesi Selatan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 22.136.374.000,00	SPL no.PS.004/1/1/ITJEN 2023 20 Maret 2023 LHA No. 01/LHA/IT.III/III/2023 15 Maret 2023	01.01	1	
						01.04	3	
						02.02	1	
						02.03	1	
						03.03	1	
22	UPP Kolonedale di Provinsi Sulawesi Tengah	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 1.312.550.010.000.000,00	SPL no.PS.004/1/3/ITJEN 2023 24 Maret 2023 LHA No. 02/LHA/IT.III/III/2023	01.04	1	
						02.02	4	
						02.03	1	
						03.02	2	
23	Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Balikpapan di provinsi Kalimantan Timur	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 124.375.235.000,00	SPL no.PS.004/1/7/ITJEN 2023 31 Maret 2023 LHA No. 07/LHA/IT.III/III/2023 29 Maret 2023	01.01	1	
						01.02	1	
						01.03	1	
						01.04	4	
						02.01	1	
						02.04	1	
						02.03	3	
						03.02	1	
						03.03	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Distrik Navigasi Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 150.030.256.000,00	SPL no.PS.004/1/10/ITJEN 2023 18 April 2023 LHA No. 02/LHA/IT.III/IV/2023	01.04 02.01 02.02 02.03	3 1 1 1	
25	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 58.866.557.000,00	SPL no.PS.004/1/10/ITJEN 2023 18 April 2023	02.01 02.03 03.01	3 3 1	
26	Unit Penyelenggara Pelabuhan Kendawangan di Provinsi Kalimantan Barat	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 76.372.770.000,00	SPL no.PS.004/1/11/ITJEN 2023 18 April 2023 LHA No. 04/LHA/IT.III/IV/2023	01.04 02.01 02.03 03.01	1 5 2 1	
27	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kotabaru - Batulicin di Provinsi Kalimantan Selatan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 218.239.426.000,00	SPL no.PS.004/1/12/ITJEN 2023 28 April 2023 LHA No. 06/LHA/IT.III/IV/2023 18 April 2023	01.01 01.04 02.01 02.02 03.01 03.03	2 1 1 1 1 4	
28	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 171.306.341.000,00	SPL no.PS.004/1/9/ITJEN 2023 14 April 2023	01.04 02.01 02.03	3 3 2	
29	Distrik Navigasi Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 113.510.313.000,00	SPL no.PS.004/1/13/ITJEN 2023 02 Mei 2023	02.01 02.03	2 6	
30	PIP Makassar	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 286.414.969.000,00	SPL no.PS.008/1/6/ITJEN/2023 12 Juni 2023 LHA No. 07/LHA/IT.II/VI/2023 8 Juni 2023	01.01 01.04 02.01 02.02 02.03 03.03	3 1 1 2 1 1	Rp 28.480.261,00
31	Politeknik Pelayaran Barombong	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 373.890.231.000,00	SPL no.PS.008/1/7/ITJEN/2023 12 Juni 2023 LHA No. 08/LHA/IT.II/VI/2023 9 Juni 2023	01.04 02.03 02.02 02.01 03.03	3 1 2 1 1	-
32	PKTJ Tegal	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp 211.531.082.000,00	SPL no.PS.008/1/5/ITJEN/2023 5 Juni 2023 LHA No. 09/LHA/IT.II/VI/2023 4 Juni 2023	01.01 01.02 02.03 02.01 02.02	1 1 3 1 5	Rp 16.415.776,00 Rp 78.014.350,00
33	Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak di Provinsi Jawa Timur	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 232.247.839.000,00	SPL no.PS.004/1/23/ITJEN 2023 06 Juni 2023	01.04 02.01 03.03	1 4 1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Surabaya di Provinsi Jawa Timur	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 109.700.779.000,00	SPL no.PS.004/1/24/ITJEN 2023 06 Juni 2023	02.01	1	
35	Pangkalan Penjagaan Laut Dan Pantai Tanjung Priok di Provinsi DKI Jakarta					02.02	2	
36	Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Tanjung Intan di Provinsi Jawa					02.03	3	
37	Distrik Navigasi Tipe A Kelas II Tanjung Emas di Provinsi Jawa Tengah	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp 202.713.137.000,00	SPL no.PS.004/1/22/ITJEN 2023 06 Juni 2023 LHA No. 03/LHA/IT.III/VI/2023 05 Juni 2023	01.04	2	
38	Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Emas					02.01	1	
						02.02	3	
39	UPBU Japura	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp104.458.050.000.000,00	SPL no. PS.005/1/13/ITJEN/2023 31 Mei 2023 LHA No. 11/LHA/IT.IV/V/2023 25 Mei 2023	01.03	1	
40	UPBU Dabo					02.01	2	
						02.02	2	
41	UPBU Raja Haji Abdullah	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp1.074.025.560.000.000,00	SPL no. PS.005/1/15/ITJEN/2023 tanggal 31 Mei 2023 LHA No. 13/LHA/IT.IV/V/2023 25 Mei 2023	01.02	1	
42	UPBU Kelas II Binaka-Gunungsitoli					02.01	3	
						02.03	1	
43	UPBU Kelas III Silampari	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp770.596.570.000.000,00	SPL No. PS.005/1/16/ITJEN/2023 31 Mei 2023 LHA No 14/LHA/IT.IV/V/2023 25 Mei 2023	02.02	1	
						02.03	1	
						03.03	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	BPTD WII.X Jawa Tengah & DIY	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp1.289.006.337.140.000,00	SPL No. PS.004/1/14/ITJEN/2023 tanggal 18 April 2023 LHA No 07/LHA/IT. I/IV/2023 17 April 2023	01.01.02	1	
						01.02.02	1	
						01.04.06	1	
						02.01.01	1	
						20304	1	
						01.04.03	1	
						03.03.04	1	
45	BPTD WII.XI Jawa Timur	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp1.802.025.169.330.000,00	SPL No. PS.003/1/6/ITJEN/2023 tanggal 18 April 2023 LHA No 06/LHA/IT. I/IV/2023 17 April 2023	10408	2	
						10301	1	
						20201	1	
						20301	1	
						20105	1	
						30305	2	
46	BPTD WII.XV Kalimantan Selatan	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp643.794.760.000.000,00	SPL No. PS.003/1/7/ITJEN/2023 tanggal 18 April 2023 LHA No 08/LHA/IT. I/IV/2023 17 April 2023	01.01.04	6	
						10301	1	
						02.01.01	2	
						03.01.02	1	
47	UPP Jailolo	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp15.373.779.500.000,00	SPL No. PS.004/2/23/ITJEN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 LHA No. 05/LHA/IT.III/VIII/2023 09 Agustus 2023	10104	2	
						20101	2	
						20301	4	
						20305	1	
48	UPP Soasio					10201	1	
		Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp156.463.421.000,00	SPL No. PS.004/3/4/ITJEN/2023 tanggal 30 Agustus 2023 LHA No. 07/LHA/IT.III/2023 23 Agustus 2023	10103	1	
						10301	1	
						10401	1	
						20101	1	
						30305	2	
						30301	2	
						30306	2	
						30308	1	
49	UPP Babang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp238.256.421.000,00	SPL No. PS.004/2/25/ITJEN/2023 tanggal 16 Agustus 2023 LHA No. 06/LHA/IT.III/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023	10104	4	
						10107	2	
						10301	2	
						10401	1	
						20104	1	
						20102	1	
						20301	1	
						30306	1	
50	KSOP Jayapura	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp32.506.247.000,00	SPL No. PS.004/2/19/ITJEN/2023 tanggal 03 Agustus 2023 LHA No. 01/LHA/IT.III/VIII/2023 Tanggal 01 Agustus 2023	30307	3	
						10206	1	
						10408	1	
						10305	1	
						20102	2	
						20304	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	KSOP Ternate	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp107.821.177.000,00	SPL No. PS.004/2/22/ITJEN/2023 tanggal 14 Agustus 2023 LHA No. 04/LHA/IT.III/VIII/2023 09 Agustus 2023	20304	4	
						10401	1	
						10301	1	
						20101	1	
						10203	1	
52	KSOP Bima	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp175.669.043.000,00	SPL No. PS.004/2/24/ITJEN/2023 tanggal 16 Agustus 2023 LHANo. 03/LHA/IT.III/VIII/2023 08 Agustus 2023	10104	1	
						10201	1	
						20202	1	
						20102	2	
						20305	1	
						20207	1	
						20304	3	
53	Disnav Belawan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp241.669.274.000,00	SPL No. PS.004/3/10/ITJEN/2023 tanggal 11 September 2023 LHA No. 08/LHA/IT.III/VIII/2023 31 Agustus 2023	20201	1	
						10415	1	
						20302	1	
						20206	1	
						20105	1	
						20102	1	
54	UPP Sirombu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp60.847.544.000,00	SPL PS.004/3/12/ITJEN/2023 tanggal 18 September 2023 LHA No. 5/LHA/IT.III/IX/2023 15 September 2023	10107	1	
						10403	1	
						10103	1	Rp26.951.311,00
						20104	2	
						20102	1	
						20207	1	
						30305	1	
						30307	5	
55	OPU Belawan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp52.353.372.000,00	SPL No. PS.004/3/9/ITJEN/2023 tanggal 07 September 2023 LHA No. 03/LHA/IT.III/IX/2023 06 September 2023	10401	1	
						10208	1	
						10104	1	
						10107	1	Rp2.300.000,00
						20104	1	
						20302	1	
56	Disnav Sibolga	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp97.118.719.000,00	SPL No. PS.004/3/11/ITJEN/2023 tanggal 12 September 2023 LHA No. 04/LHA/IT.III/IX/2023 11 September 2023	10406	1	
						20104	1	
						20304	1	
						20304	3	
57	Disnav Teluk Bayur	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp81.225.248.000,00	SPL No. PS.004/3/8/ITJEN/2023 Tanggal 5 September 2023 LHA No. 05/LHA.IT.III/XII/2023 Tanggal 08 Desember 2023	20205	1	
						20101	1	
						20304	1	
						20303	1	
						20301	1	
						20305	2	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Disnav Palembang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp256.340.358.000,00	SPL No. PS.004/3/7/ITJEN/2023 tanggal 05 September 2023 LHA No. 01/LHA/IT.III/VII/2023 04 September 2023	10107 20101 20305 30306	1 2 2 3	
59	UPP Seba	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp320.723.123.000,00	SPL No. PS.004/3/21/ITJEN/2023 tanggal 11 Oktober 2023 LHA No. 04/LHA/IT.III/X/2023 05 Oktober 2023	10406 10102 10104 10202 10108 20201 20205 20207 30103	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
60	Disnav Kupang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp78.655.085.000,00	SPL No. 004/3/14/ITJEN/2023 tanggal 24 September 2023 LHA No. 07/LHA/IT.III/IX/2023 22 September 2023	10401 10109 10201 10403 20303 20101 20207	1 1 1 1 2 1 1	
61	KSOP Labuhan Bajo	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp11.642.427.000,00	SPL No. PS.004/3/17/ITJEN/2023 tanggal 03 Oktober 2023 LHA No. 01/LHA/IT.III/X/2023 02 Oktober 2023	10401 20103 20101 20301 20304	3 1 2 1 1	
62	KSOP Benoa	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp304.556.510.000,00	SPL No. PS.004/3/16/ITJEN/2023 tanggal 03 Oktober 2023 LHA No. 02/LHA/IT.III/X/2023 02 Oktober 2023	10104 10202 20304 20207 30307	2 1 1 1 1	
63	Disnav Benoa	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp204.662.678.000,00	SPL No. PS.004/3/19/ITJEN/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 LHA No. 03/LHA/IT.III/X/2023 Tanggal 04 Oktober 2023	10104 10107 20101 20207 20201 20101 20302 30302 30306 30102	2 1 1 1 1 1 1 2 1 1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	Disnav Tanjung Pinang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp193.864.363.000,00	SPL No. PS.004/3/13/ITJEN/2023 tanggal 25 September 2023 LHA No. 06/LHA/IT.III/IX/2023 20 September 2023	10102	1	
						10104	1	
						20201	1	
						20304	3	
						20207	2	
						20105	1	
						20201	1	
65	UPP Wonreli	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp151.148.689.000,00	SPL No. PS.004/3/24/ITJEN/2023 tanggal 31 Oktober 2023 LHA No. 07/LHA/IT.III/X/2023 31 Oktober 2023	10305	1	
						20305	2	
						20301	3	
						30307	1	
66	UPP Tual	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp78.856.218.000,00	SPL No. PS.004/3/22/ITJEN/2023 tanggal 31 Oktober 2023 LHA No. 05/LHA/IT.III/X/2023	20101	1	
						20305	4	
						30302	1	
67	UPP Saumlaki	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp223.374.427.000,00	SPL No. PS.004/3/25/ITJEN/2023 tanggal 02 November 2023 LHA No. 01/LHA/IT.III/XI/2023 02 November 2023	10406	1	
						10305	1	
						20104	1	
						20102	3	
						30302	1	
68	Distrik Navigasi Dumai	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp95.860.298.000,00	SPL No. PS.004/2/ITJEN/2023 07 November 2024	20304	3	
						20102	2	
						20302	2	
						10407	2	
69	UPP Atapupu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp147.786.062.000,00	SPL No. PS.004/3/23/ITJEN/2023 tanggal 31 Oktober 2023 LHA No. 06/LHA/IT.III/X/2023 30 Oktober 2023	10414	1	
						20101	2	
						20202	1	
						20301	2	
						20207	2	
70	UPP Bula	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp122.776.325.000,00	SPL No. PS.004/4/I/ITJEN/2023 tanggal 08 November 2023 LHA No. 02/LHA/IT.III/XI/2023 07 November 2023	10301	1	
						10407	1	
						20303	1	
						20101	1	
						20302	1	
						20301	1	
						20103	1	
71	Distrik Navigasi Bitung	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp297.052.145.000,00	SPL No. PS.004/4/10/ITJEN/2023 tanggal 15 Desember 2023 LHA No. 09/LHA/IT.III/XII/2023 14 Desember 2023	10301	1	
						10401	2	
						20301	2	
						20305	1	
						20302	1	
						20207	2	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	KSOP Teluk Bayur	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp169.284.857.000,00	SPL No. PS.004/4/5/ITJEN/2023 tanggal 13 Desember 2023 LHA No. 05/LHA/IT.III/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023	10104	2	
						20104	2	
						20205	1	
						20207	2	
						20301	2	
						20305	1	
						20304	4	
73	UPP Pelabuhan Ratu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp19.767.323.000,00	SPL No. PS.004/4/4/ITJEN/2023 tanggal 05 Desember 2023	20302	3	
						20201	2	
74	UPP Indramayu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp58.723.986.000,00	SPL No. PS.004/4/3/ITJEN/2023 tanggal 05 Desember 2023	20302	3	
						20201	2	
75	KSOP Kupang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp54.492.425.000,00	SPL No. PS.004/4/7/ITJEN/2023 tanggal 13 Desember 2023 LHA No. 03/LHA/IT.III/XII/2023 12 Desember 2023	10104	3	
						20101	1	
						20305	1	
						20101	2	
						30307	1	
						30307	3	
						10107	1	
76	KSOP Laurentius Say	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp236.806.340.000,00	SPL No. PS.004/4/9/ITJEN/2023 15 Desember 2023 LHA No. 06/LHA/IT.III/XII/2023 14 Desember 2023	10408	1	
						20304	1	
						20104	2	
						20207	2	
						30306	1	
						30307	3	
						10104	1	
77	KSOP Ende	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp18.938.915.000,00	SPL No. Ps. 004/4/8/ITJEN/2023 Tanggal 15 Desember 2023 LHA No. 07/LHA/IT.III/XII/2023 14 Desember 2024	10107	2	
						10108	1	
						20104	1	
						20207	1	
						20304	2	
						30306	1	
						30307	3	
78	KSOP Ambon	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp215.735.256.000,00	SPL No. PS.004/4/6/ITJEN/2023 tanggal 13 Desember 2023 LHA No. 04/LHA/IT.III/XII/2023 12 Desember 2023	02.01.01	1	
						02.02.05	2	
						02.03.02	2	
						02.03.04	3	
						03.03.05	1	
79	UPP Bulukumba	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp32.595.313.000,00	SPL No. PS.004/4/11/ITJEN/2023 tanggal 18 Desember 2023 LHA No. 08/LHA/IT.III/XII/2023 14 Desember 2023	01.03.01	1	
						02.02.05	1	
						02.02.02	1	
						02.02.07	1	
						02.03.01	1	
						02.01.02	1	
						03.01.03	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	KSOP Pulang Pisau	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp89.533.385.000,00	SPL NO. PS.004/1/2/ITJEN/2024 tanggal 04 Januari 2024 LHA No. 13/LHA/IT.III/XII/2023 27 Desember 2023	01.04.06	1	
						01.03.05	1	
						02.01.04	1	
						02.01.02	3	
						03.03.02	1	
81	UPP Tana Paser					01.03.01	2	Rp212.199.808
						01.04.07	1	
						02.03.01	1	
						02.01.01	2	
						02.02.01	1	
82	UPP Kuala Gaung	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp58.442.907.000,00	SPL No. PS.004/1/1/ITJEN/2024 tanggal 02 Januari 2024 LHA No. 12/LHA/IT.III/XII/2023 27 Desember 2023	01.04.08	1	
						01.01.04	1	
						01.02.05	1	
						02.01.01	1	
						02.02.05	1	
						02.02.07	1	
83	KSOP Teluk Palu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp44.752.466.000,00	SPL No. PS.004/4/13/ITJEN/2023 tanggal 27 Desember 2023 LHA No. 11/LHA/IT.III/XII/2023 22 Desember 2023	02.03.03	2	
						02.03.01	1	
						02.01.01	2	
						02.01.02	1	
						03.03.02	1	
						03.03.05	1	
84	API Banyuwangi	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp213.779.596.000,00	SPL No. PS.008/1/8/ITJEN/2023 tanggal 23 Juni 2023 LHA No. 10/LHA/IT.II/VI/2023 22 Juni 2023	01.01	3	Rp106.990.859,01
						01.03	1	-
						02.01	1	-
						02.02	3	-
						02.03	2	-
						03.03	2	-
85	Poltekpel Sumbar	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp420.607.821.000,00	SPL No. PS.008/1/11/ITJEN/2023 tanggal 21 Juli 2023 LHA No. 11/LHA/IT.II/VI/2023 20 Juli 2023	01.01	2	Rp34.039.511,00
						02.01	3	-
						02.02	2	-
						02.03	3	-
86	PTDI-STTD					01.01	1	Rp1.152.495.910,00
						01.04	1	-
						02.02	1	-
						02.03	3	-
						03.03	1	-

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	Poltekpel Malahayati	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp118.496.839.949,00	SPL No. PS.008/1/9/ITJEN/2023 tanggal 13 Juli 2023 LHA No. 13/LHA/IT.II/VII/2023 12 Juli 2023	01.04	3	-
88	BP2TD Mempawah					02.02	2	-
89	Poltekbang Makassar					02.03	2	-
90	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian					03.03	1	-
91	Direktorat Sarana Perkeretaapian					01.01	2	Rp83.853.200,00
92	Poltrada Bali	Inspektorat II	Audit Kinerja	Rp283.381.697.941,00	PS.006/1/5/ITJEN/2023 tanggal 31 Oktober 2023 LHA No. 16/LHA/IT.II/2023	01.04	3	-
93	PIP Semarang					02.01	2	-
94	STIP					02.02	1	-
95	UPBU Rokot	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp545.233.841.000,00	PS.005/2/8/ITJEN/2023 6 September 2023 LHA No. 26/LHA/IT.IV/IX/2023 4 September 2023	02.03	2	-
96	UPBU Aek Godang					01.01	1	Rp 103.812.683,89
97	UPBU Naha Tahuna					01.02	1	-
						01.04	1	-
						02.01	1	-
						02.02	2	-
						01.04	1	Rp 390.086.917,17
						02.02	1	-
						03.03	1	-
						01.02	3	Rp 1.293.128.516,69
						01.04	1	-
						02.02	1	-

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	UPBU Syukuran Aminuddin Amir - Luwuk	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp224.333.933.000,00	PS.005/2/11/ITJEN/2023 8 September 2023 LHA No. 29/LHA/IT.IV/IX/2023 7 September 2023	01.04	1	
						02.02	2	
						02.01	1	
						03.03	1	
						03.01	2	
99	UPBU Pogogul Buol	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp280.558.805.000,00	PS.005/2/12/ITJEN/2023 8 September 2023 LHA No. 30/LHA/IT.IV/IX/2023	01.02	1	
						01.04	1	
						03.03	2	
100	UPBU Arung Palaka	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp81.973.570.000,00	PS.005/2/13/ITJEN/2023 6 November 2023 LHA No. 31/LHA/IT.IV/X/2023 3 Oktober 2023	01.02	1	
						02.02	2	
						02.03	1	
						02.01	1	
						03.03	2	
101	UPBU Betoambari	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp20.828.040.000,00	PS.005/2/14/ITJEN/2023 6 Oktober 2023 LHA No.32/LHA/IT.IV/IX/2023 3 Oktober 2023	02.01	1	
						02.03	2	
						03.03	1	
						03.02	1	
						03.01	1	
102	UPBU Djalaluddin	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp133.050.764.000,00	PS.005/2/15/ITJEN/2023 6 Oktober 2023 LHA No.33/LHA/IT.IV/X/2023 3 Oktober 2023	01.01	1	Rp 141.000.443,00
						01.02	3	
						01.03	1	Rp 8.303.082.452,00
						02.01	1	
						02.03	1	
103	UPBU H. Aroppala	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp11.649.408.000,00	PS.005/2/16/ITJEN/2023 6 Oktober 2023 LHA No.34/LHA/IT.IV/X/2023	01.04	2	
						02.02	1	
						02.03	1	
104	UPBU Tampa Padang	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp28.585.325.000,00	PS.005/2/17/ITJEN/2023 6 Oktober 2023 LHA No.35/LHA/IT.IV/X/2023 3 Oktober 2023	01.01	1	
						01.02	2	Rp 4.622.123.377,81
						01.03	1	Rp 51.304.721,00
						01.04	5	
						02.01	1	
105	Direktorat Kelaikeudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp97.288.280.000,00	PS.005/2/19/ITJEN/2023 17 November 2023 LHA No.36/LHA/IT.IV/XI/2023	01.03	1	
						02.03	3	
						03.03	1	
106	UPBU Juwata	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp105.030.706.000,00	PS.005/2/20/ITJEN/2023 17 November 2023 LHA No.37/LHA/IT.IV/XI/2023 13 November 2023	01.02	1	Rp 29.040.000,00
						01.03	3	Rp 6.680.793.284,03
						01.04	1	
						03.03	1	
						03.03	1	
107	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp56.404.155.000,00	PS.005/2/21/ITJEN/2023 17 November 2023 LHA No.38/LHA/IT.IV/XI/2023 13 November 2023	01.04	1	
						02.02	1	
						02.03	3	
						03.03	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	UPBU Long Apung	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp160.232.197.000,00	PS.005/2/22/ITJEN/2023 17 November 2023 LHA No.39/LHA/IT.IV/XI/2023	01.03 01.02 03.03	1 1 1	Rp 3.585.378,00
109	UPBU Dewadaru	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp83.473.207.000,00	PS.005/2/23/ITJEN/2023 19 Desember 2023 LHA No.40/LHA/IT.IV/XI/2023 14 Desember 2023	01.02 02.01 20.02 03.03	1 2 1 2	
110	UPBU Tunggul Wulung	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp14.058.960.000,00	PS.005/2/24/ITJEN/2023 19 Desember 2023	01.04 02.02	1 2	
111	UPBU Trunojoyo	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp17.422.658.990,00	PS.005/2/25/ITJEN/2023 19 Desember 2023 LHA No.42/LHA/IT.IV/XII/2023 14 Desember 2023	01.04 01.01 02.03 03.03	2 1 1 1	
112	Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp36.242.403.000,00	PS.005/3/1/ITJEN/2023 19 Desember 2023 LHA No.43/LHA/IT.IV/XII/2023	01.02 02.03 02.01	1 2 2	
113	BPTD Kelas II Bali	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp256.599.679.236	PS.003/1/21/ITJEN/2023 18 Agustus 2023 LHA No.16/LHA/IT.I/VIII/2023 18 Agustus 2023	01.02 01.03 02.01 02.03 03.03	3 1 1 1 2	Rp365.995.460
114	BPTD Kelas II NTT	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp122.839.943.800	PS.003/1/18/ITJEN/2023 16 Agustus 2023 LHA No.15/LHA/IT.I/VIII/2023 16 Agustus 2023	01.03 01.04 02.02 03.03	1 3 1 2	Rp331.270.670
115	BPTD Kelas II Riau	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp102.260.712.134	PS.003/1/22/ITJEN/2023 24 Agustus 2023 LHA No.18/LHA/IT.I/VIII/2023	01.02 02.01 02.02	1 1 5	Rp83.391.462
116	BPTD Kelas II Sumsel	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp166.038.707.004	PS.003/1/19/ITJEN/2023 18 Agustus 2023 LHA No.17/LHA/IT.I/VIII/2023 18 Agustus 2023	01.01 01.04 02.01 02.02 02.03 03.03	1 2 1 2 1 2	Rp4.168.000
117	BPTD Kelas II Maluku	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp137.179.007.325	PS.003/1/25/ITJEN/2023 15 September 2023 LHA No.20/LHA/IT.I/IX/2023 15 September 2023	01.04 02.03 02.02 02.01 03.01	2 2 2 1 1	Rp63.596.560.527
118	BPTD Kelas II Maluku Utara	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp52.721.952.522	PS.003/1/24/ITJEN/2023 15 September 2023 LHA No.19/LHA/IT.I/IX/2023 15 September 2023	01.01 01.02 01.03 02.01 02.02	2 1 1 3 1	Rp35.740.620
119	BPTD Kelas II Papua Barat	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp256.599.679.236	PS.003/2/3/RHS/ITJEN/2023 26 September 2023 LHA No.23/LHA/IT.I/IX/2023 26 September 2023	01.01 02.01 03.02 03.01 03.03	1 1 1 2 1	Rp404.954.135

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	BPTD Kelas II Sulawesi Selatan	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp247.276.411.000	PS.003/2/2/ITJEN/2023 15 September 2023 LHA No.21/LHA/IT.I/IX/2023 21 September 2023	01.01 02.03 01.02 02.02 03.01	2 3 1 1 1	Rp234.519.459
121	BPTD Kelas II Sulawesi Utara	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp38.825.939.558	PS.003/2/1/ITJEN/2023 22 September 2023 LHA No.22/LHA/IT.I/IX/2023 22 September 2023	01.02 01.03 02.01 02.02 02.03 03.03	3 1 1 1 2 2	Rp168.461.680
122	BPTD Kelas II Banten	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp21.537.051.034	PS.003/2/5/ITJEN/2023 07 Desember 2023 LHA No.25/LHA/IT.I/XI/2023 30 November 2023	01.04 01.01 02.03 03.03	1 1 1 4	Rp91.942.587 Rp69.355.500
123	BPTD Kelas II Banten	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp10.378.513.000	PS.003/2/7/ITJEN/2023 07 Desember 2023 LHA No.24/LHA/IT.I/XI/2023	01.04 03.03 03.02	6 1 1	
124	BPTD Kelas II Jawa Barat	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp26.024.499.082	PS.003/2/6/ITJEN/2023 07 Desember 2023 LHA No.26/LHA/IT.I/XII/2023 01 Desember 2023	01.02 01.04 03.03 03.02	1 1 2 1	Rp214.190.247
125	Disnav Makassar	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp66.551.400.000,00				
126	KSU Makassar	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp50.838.517.000,00				
127	UPP Tilamuta	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp141.843.230.000,00				
128	KSOP Gorontalo	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp141.167.619.000,00				

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Disnav Jayapura	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp59.506.613.000,00				
130	KSOP Biak	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp39.594.682.000,00				
131	UPP Sungai Nyamuk	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp74.134.239.000,00				
132	Disnav Tarakan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp247.142.810.000,00				
133	Disnav Kendari	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp169.664.926.000,00				
134	KSOP Kendari	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp54.159.052.000,00				
135	KSOP Baubau	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp94.087.455.000,00				
136	UPP Lapuko	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp100.415.709.000,00				
137	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp60.597.785.323	PS.003/1/8/ITJEN/2023 26 Mei 2023 LHA No.10/LHA/IT.I/V/2023 25 Mei 2023	01.04 01.03 02.03 02.02 03.03	3 1 2 1 1	Rp10.071.600
138	BPTD Kelas II Sulawesi Tengah	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp29.844.113.000	PS.003/1/11/ITJEN/2023 07 Juni 2023 LHA No.11/LHA/IT.I/V/2023 06 Juni 2023	01.04 02.03 02.02 03.02 03.03	1 1 1 2 1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	BPTD Kelas II Kalimantan Tengah	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp69.624.919.454	PS.003/1/10/ITJEN/2023 26 Mei 2023 LHA No.09/LHA/IT.I/V/2023 25 Mei 2023	01.01	2	Rp197.724.472
						01.03	1	
						02.02	1	
						02.03	1	
						03.01	1	
						03.03	1	
140	BPTD Kelas II Kalimantan Timur & Kaltara					01.03	1	
		Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp35.323.020.000	PS.003/1/09/ITJEN/2023 26 Mei 2023 LHA No.08/LHA/IT.I/V/2023 25 Mei 2023	01.02	1	Rp21.152.800
						01.04	2	
						01.01	1	
						02.02	1	
						03.03	2	
141	BPTD Kelas II Aceh	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp75.864.426.303	PS.003/1/13/ITJEN/2023 27 Juni 2023 LHA No.12/LHA/IT.I/VI/2023 27 Juni 2023	01.04	2	
						01.03	1	
						02.03	2	
						02.02	3	
						03.03	2	
142	BPTD Kelas II Jambi	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp51.257.898.965	PS.003/1/15/ITJEN/2023 27 Juni 2023 LHA No.14/LHA/IT.I/VI/2023 27 Juni 2023	01.01	1	Rp6.112.000
						01.04	1	
						01.02	2	Rp217.515.020
						02.02	2	
						03.03	1	
143	BPTD Kelas II Sumut	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp72.304.578.887	PS.003/1/14/ITJEN/2023 27 Juni 2023 LHA No.13/LHA/IT.I/VI/2023 27 Juni 2023	01.01	4	
						01.03	1	
						02.01	1	
						02.02	1	
						02.03	1	
						03.01	1	

KOMPOSISI SDM APIP BERDASARKAN SERTIFIKAT PROFESI YANG DIMILIKI TAHUN 2023

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Sertifikasi Internasional					Keterangan Jenis dan Jumlah
	CIA	CGAP	CRMA	Lainnya	(6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Triwulan I	1	0	0	0	1	
Triwulan II	0	0	0	0	0	
Triwulan III	0	0	0	0	0	
Triwulan IV	0	0	0	0	0	

Posisi	Sertifikasi Nasional											Total Sertifikasi Profesi (19) = (2) + (3) + .. +(17)	
	CRMP	CRMO	CRGP	CSEP	QIA	SAAP	PBJ	CFrA	CGCAE	Akuntan	Lainnya	Keterangan Jenis dan	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (2) + (3) + .. +(17)
Triwulan I	2	34	2	0	26	0	28	22	3	4	8	1 orang QCRO 1 orang CSA 4 orang CGAA 1 orang QRMA 1 orang QGIA	130
Triwulan II	2	34	5	0	26	0	28	21	2	4	16	1 orang QCRO 1 orang CSA 5 orang CGAA 3 orang QRMA 1 orang QGIA 3 orang CDSP 2 orang IT. AUDITOR	138
Triwulan III	2	34	5	0	26	0	28	21	3	4	18	1 orang QCRO 1 orang CSA 5 orang CGAA 3 orang QRMA 3 orang CDSP 2 orang IT. AUDITOR 1 orang CBDA 2 orang QGRP	141
Triwulan IV	2	34	4	0	51	0	28	20	3	4	17	1 orang CSA 5 orang CGAA 3 orang QRMA 3 orang CDSP 2 orang IT. AUDITOR 1 orang CBDA 2 orang QGRP	163

**TREND INDIKATOR TATA KELOLA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TIGA TAHUN TERAKHIR**

Tahun	Level Kapabilitas APIP	Skor Maturitas SPIP	Opini LK	Predikat Skor SAKIP K/L/D	Penerapan WBS	Predikat WBK/WBBM	Skor dan Predikat RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
2020	2+	30000,00	WTP	755300,00	Ya	Ya	783900/(BB)
2021	2+	36900,00	WTP	772100,00	Ya	Ya	792000/(BB)
2022	3,00	34700,00	WTP	775800,00	Ya	Ya	784000/(BB)

STRUKTUR DAN KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APIP TAHUN 2023

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Total SDM	Jabatan Struktural	Jumlah PFA							Jabatan Lainnya
			Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Terampil	Auditor Mahir	Jumlah Auditor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) =	(10)
Triwulan I	337	10	4	29	50	67	9		159	168
Triwulan II	338	11	4	29	50	108	24	4	219	108
Triwulan III	334	10	4	28	49	110	24	4	219	105
Triwulan IV	339	11	3	28	49	110	24	4	218	110

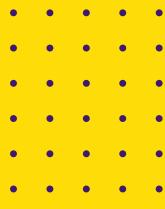
Posisi	Jumlah SDM sesuai Tingkat Pendidikan						SDM Berlatar Belakang Pendidikan Ekonomi/Akuntansi/ Manajemen
	S3	S2	S1/DIV	DIII	DI/DII	SLTA ke bawah	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Triwulan I	5	100	167	55	0	10	94
Triwulan II	5	104	165	54	0	10	87
Triwulan III	6	106	169	44	0	9	93
Triwulan IV	5	106	173	45	0	10	92

DUKUNGAN/PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI/APLIKASI APIP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi/Aplikasi	Nama Aplikasi	
	Kegiatan Manajerial APIP (digunakan untuk pengelolaan/manajemen APIP)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern (digunakan oleh Auditor/P2UPD untuk pengawasan)
(1)	(2)	(3)
Ya	Simpanan Berharga SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) E-Perfomance SMART SAKTI Krisna Renja E-Monev Website Skemaraja E-surat SIRUP (Sistem RUP) E-Planning E-Kinerja SIAU modul Keuangan	SIAU (Sistem Informasi Audit) SITAKON (Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi) SIMADU (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan) SIMPLE (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Eksternal) Aroma Kopi (Aplikasi API SIMADU dengan KPK)



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



PROFIL APIP

TAHUN 2024



Laporan Penilaian Mandiri
Kapabilitas APIP Kemenhub Tahun 2024

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN APIP TAHUN 2024

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Anggaran K/L/D	Anggaran APIP					
		Total Anggaran APIP	% Total Anggaran APIP	Operasional	% Anggaran	Program Peningkatan	% Anggaran Program
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) / (2)	(5)	(6) = (5) / (3)	(7)	(8) = (7) / (3)
Triwulan I	Rp 42.386.315.102.000	Rp 112.424.822.000	0,27%	Rp 31.876.000.000	28,35%	Rp 5.898.204.000	5,25%
Triwulan II	Rp 43.451.373.242.000	Rp 113.924.822.000	0,26%	Rp 33.376.000.000	29,30%	Rp 5.898.204.000	5,18%
Triwulan III							
Triwulan IV							

Posisi	Realisasi Anggaran				Realisasi Operasional Pengawasan			
	Operasional Pengawasan		Program Peningkatan SDM		Assurance		Consulting	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
(1)	(9)	(10) = (9) / (5)	(11)	(12) = (11) / (7)	(13)	(14) = (13) / (9)	(15)	(16) = (15) / (9)
Triwulan I	Rp 5.300.526.591	16,63%	Rp 1.263.562.994	21,42%	Rp 4.774.566.221	90,08%	Rp 525.960.370	9,92%
Triwulan II	Rp 12.449.558.472	37,30%	Rp 2.082.322.001	35,30%	Rp 11.446.730.427	91,94%	Rp 1.002.828.045	8,06%
Triwulan III								
Triwulan IV								

*Assurance (Audit Kinerja, ADTT, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Pengawalan dan supervisi, Pengawasan dan pengendalian penerimaan CPNS, Laporan PK atas Penilaian Mandiritas SPIP, Laporan evaluasi atas implementasi SAKIP)

Consulting (Pemutakhiran TLHA, Pencegahan KKN (Stranas PK, UPG), Pengelolaan Zona Zi, Laporan Hasil Reviu RKBMN, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan)

ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN APIP TAHUN 2024

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Jumlah Realisasi Penugasan Kegiatan Asurans							
	Audit Ketaatan	Audit Kinerja	Asurans atas GRC	Audit Investigasi	Audit dengan Tujuan Tertentu	Reviu	Evaluasi	Pemantauan/ Monitoring
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Triwulan I	8	28	1	0	9	43	10	6
Triwulan II	1	23	0	0	7	24	16	13
Triwulan III	0	0	0	0	0	0	0	0
Triwulan IV	0	0	0	0	0	0	0	0

Posisi	Jasa Konsultansi			
	Asurans	Bimtek	Pendampingan	Jasa
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Triwulan I	1	2	9	1
Triwulan II	0	0	6	1
Triwulan III	0	0	0	0
Triwulan IV	0	0	0	0

PERAN APIP DALAM PENGAWASAN TAHUN 2024

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Jenis Pengawasan	Jumlah Objek Pengawasan	Nilai Kegiatan yang Diawasi	Temuan		Ditindaklanjuti		% Temuan yang Ditindaklanjuti (9) = (8) / (6)
				Jumlah Kejadian	Nilai	Jumlah Kejadian	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Triwulan I	Audit Ketaatan	8	Rp 198.012.082.108	12	Rp 4.467.284.201	0	Rp -	0,00%
	Audit Kinerja	28	Rp 2.311.249.416.391	26	Rp 299.058.738	0	Rp -	0,00%
	Asurans atas GRC	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
Triwulan II	Audit Ketaatan	1	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
	Audit Kinerja	0	Rp 1.719.389.400.273	2	Rp 1.863.766.949	0	Rp -	0,00%
	Asurans atas GRC	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
Triwulan III	Audit Ketaatan	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
	Audit Kinerja	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
	Asurans atas GRC	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
Triwulan IV	Audit Ketaatan	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
	Audit Kinerja	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-
	Asurans atas GRC	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -	-

PERAN DAN LAYANAN APIP AKTIVITAS PENGAWASAN ATAS KETAATAN

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi		Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
					(Rp)		Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PPSDMP Udara	Inspektorat II	Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 61.997.010.000,00	PS.308/1/12/ITJEN/2024 25 April 2024	01.04	9	-	
2	PPSDMP Laut	Inspektorat II	Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp 52.652.807.000,00	PS.308/1/11/ITJEN/2024 22 April 2024	01.04	3	-	
3	PPSDMP Darat	Inspektorat II	Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		PS.308/1/13/ITJEN/2024 30 April 2024 002/LHA/IT.II/IV/2024	02.02 02.03 03.03	2 2 8	- - -	
4	Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Kontraktual Tahun Anggaran 2023 Yang Tidak Selesai	Inspektorat Investigasi	Peningkatan/Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Gunungsitoli Kabupaten Nias	Rp 20.023.259.000,00	PS.103/1/1/ITJEN/2024 07 Februari 2024 002/LHA/IT.INV/II/2024	3. 03.05 3. 03.05 2. 01.09	9 4 -	Rp 521.625.261,40	
5	Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Kontraktual Tahun	Inspektorat Investigasi	Pembangunan Gedung Operasional Pelayanan	Rp 7.108.476.907,50	PS.104/1/4/ITJEN/2024 19 Februari 2024	01.03 01.08	2 7	Rp 29.729.640,00 Rp 41.098.357,00	
6	Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Kontraktual Tahun Anggaran 2023 Yang Tidak Selesai dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2024 di Unit Penyelenggara	Inspektorat Investigasi	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Laut Keramaian	Rp 37.369.195.000,00	PS.104/1/2/ITJEN/2024 07 Februari 2024 004/LHA/IT.INV/II/2024 07 Februari 2024	2. 02.01 1. 01.02 1. 04.01	6 4 9	Rp 17.296.164,00	
7	Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Kontraktual Tahun Anggaran 2023 Yang Tidak Selesai dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2024 di UPP Kelas III Bade	Inspektorat Investigasi	Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pokok Pelabuhan	Rp 8.391.897.200,00	PS.104/1/3/ITJEN/2024 16 Februari 2024 003/LHA/IT.INV/II/2024 07 Februari 2024	1. 01.03 1. 02.01	15 2	Rp 759.098.833,68 Rp 152.202.836,72	
8	Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Pekerjaan Kontraktual Tahun Anggaran 2023 Yang Tidak Selesai dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2024 di UPP Kelas III	Inspektorat Investigasi	Rehabilitasi dan Penguatan Dermaga Fasilitas Pelabuhan Laut Rembang	Rp 10.469.437.000,00	PS.104/1/1/ITJEN/2024 07 Februari 2024 001/LHA/IT.INV/II/2024 07 Februari 2024	1. 02.01 1. 03.01 1. 01.04	3 4 2	Rp 2.626.555.391,72 Rp 71.762.618,21 Rp 336.973.880,00	
9	Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Atas Komponen Biaya Pemeliharaan/Perawatan Kapal Negara dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis pada Tahun	Inspektorat Investigasi	Pekerjaan Pemeliharaan Kapal Negara (KN) Sabuk Nusantara 49 dan (KN) Sabuk Nusantara 51		PS.104/1/16/ITJEN/2024 11 Juni 2024 010/LHA/IT.INV/VI/2024 10 Juni 2024	1. 04.01 2. 03.01	9 4	Rp 280.348.697,00 -	

PERAN DAN LAYANAN APIP AKTIVITAS PENGAWASAN ATAS KINERJA

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UPBU Fransiskux Xaverius Seda	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp68.857.836.000,00	SPL no. PS.005/1/3/ITJEN/2024 19 Maret 2024 LHA No. 01/LHA/IT.IV/III/2024	01.04	1	
						02.02	1	
						02.03	2	
2.	UPBU Kalumbang Tambolaka	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp160.012.071.000,00	SPL no. PS.005/1/5/ITJEN/2024 20 Maret 2024 LHA No. 02/LHA/IT.IV/III/2024 19 Maret 2024	01.01	1	Rp 13.349.750,00
						01.04	1	
						01.02	1	
						02.01	1	
						02.02	1	
3.	UPBU Frans Sales Lega	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp6.905.527.300,00	SPL no. PS.005/1/8/ITJEN/2024 21 Maret 2024 LHA No. 03/LHA/IT.IV/III/2024 19 Maret 2024	01.04	2	
						01.02	2	
						02.02	1	
						02.01	1	
4.	UPBU Tanjung Harapan	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp46.096.833.000,00	SPL no. PS.005/1/9/ITJEN/2024 22 Maret 2024 LHA No. 04/LHA/IT-IV/III/2024	01.03	1	
						02.02	1	
						03.03	2	
						01.03	1	
5.	UPBU Maratua	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp34.137.334.000,00	SPL no. PS.005/1/4/ITJEN/2024 20 Maret 2024 LHA No. 05/LHA/IT.IV/III/2024 19 Maret 2024	01.04	1	
						02.03	1	
						02.02	1	
						02.03	1	
						02.03	2	
6.	UPBU Pitu	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp68.902.808.000,00	SPL no. PS.005/1/6/ITJEN/2024 20 Maret 2024 LHA No. 06/LHA/IT.IV/III/2024 19 Maret 2024	02.02	2	
						02.01	2	
						01.04	1	
						03.03	1	
						02.03	2	
7.	KSOP Gresik	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp98.604.358.178,00	SPL No. PS.004/1/8/itjen/2024 Tanggal 4 Maret 2024 LHA No. 3/LHA/IT.III/III/2024 Tanggal 4 Maret 2024	10104	2	
						10301	1	
						20101	1	
						20207	1	
8.	KSOP Tanjung Pakis	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp90.404.541.890,00	SPL No. PS.004/1/5/ITJEN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 LHA No. 04/LHA/IT.III/III/2024	20304	1	
						20302	1	
						30306	1	
						20204	1	
9.	UPP Malawe	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp139.611.369.741,00	SPL No. PS.004/1/6/ITJEN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 LHA No. 01/LHA/IT.III/III/2024	20205	3	
						20301	1	
						20202	1	
10.	UPP Jepara	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp15.330.054.000,00	SPL No. PS.004/1/9/ITJEN/2024 Tanggal 15 Maret 2024 LHA No. 04/LHA/IT.III/III/2024	20102	1	
						20101	2	
						20302	2	
11.	KSOP Cilacap	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp165.552.919.909,00	SPL No. PS.004/1/1/ITJEN/2024 Tanggal 22 Maret 2024 LHA No. 06/LHA/IT.III/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024	10305	1	
						10401	1	
						20302	1	
						20101	1	
						20101	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	KSOP Talang Dukuh	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp48.342.998.000,00	SPL No. PS.004/1/10/ITJEN/2024 22 Maret 2024	10407 20202	4 1	
13.	KSOP Tanjung Redep	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp158.339.710.381,00	SPL No. PS.004/1/13/ITJEN/2024 2 April 2023 LHA No. 08/LHA/IT.III/III/2024 28 Maret 2024	10407 20202 20205 20302	1 1 1 1	
14.	UPP Kuala Samboja	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp104.455.048.626,00	SPL No. PS.004/1/17/ITJEN/2024 Tanggal 4 April 2024 LHA No. 06/LHA/IT.III/IV/2024 Tanggal 2 April	10407 20205 20202	1 1 1	
15.	KSOP Bontang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp214.623.642.386,00	SPL No. PS.004/1/20/ITJEN/2024 Tanggal 4 April 2024 LHA No. 09/LHA/IT.III/IV/2024 Tanggal 2 April	10301 20102 30305	1 1 1	
16.	UPP Sangkulirang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp195.719.229.557,00	SPL No. PS.004/1/23/ITJEN/2024 Tanggal 5 April 2024 LHA No. 08/LHA/IT.III/IV/2024 Tanggal 2 April 2024	10301 20102 20301 30305 20304	1 1 1 1 1	
17.	KSOP Tanjung Buton	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp122.449.118.051,00	SPL No. PS.004/1/19/ITJEN/2024 Tanggal 4 April 2024	20104 20304	2 2	Rp 163.238.370,00
18.	KSOP Pekanbaru	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp117.026.844.313,00	SPL. No. PS004/1/18/2024 tanggal 4 April 2024 LHA No.05/LHA/IT.III/IV/2014 tanggal 2 April	20104 20304	1 2	
19.	KSOP Palembang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp289.759.403.127,00	SPL. No PA.004/1/21/tjen/2024 Tanggal 5 April 2024 LHA No. 04/LHA/IT.III/IV/2024	20101 20207 20304	3 1 2	
20.	UPP Sungai Lumpur	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp22.566.302.632,00	SPL. No PA.004/1/22/tjen/2024 Tanggal 5 April 2024 LHA No. 03/LHA/IT.III/IV/2024	20101 20207 20304	2 1 1	
21.	KSOP Sampit	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp47.262.042.497,00	SPL. No. PS.004/1/12/ITJEN/2024 Tanggal 1 April 2024 LHA No.07/LHA/IT.III/III/2024 tanggal 28 Maret 2024	20101 20302 30301	2 1 1	
22.	KSOP Kumai	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp34.404.930.403,00	SPL No. PS.004/1/14/ITJEN/2024 Tanggal 3 April 2024 LHA No. 09/LHA/IT.III/III/2024 Tanggal 28 Maret 2024	10401 20205 20301 30302	1 2 1 1	
23.	KSOP Nunukan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp12.426.778.000,00	SPL. No. PS004/1/16/ITJEN/2024 Tanggal 4 April 2024 LHA No. 01/LHA/IT.III/IV/2024	20202 20205 20301	1 2 1	
24.	KSOP Pulau Bunyu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp14.399.255.000,00	SPL No. PS.004/1/15/ITJEN/2024 Tanggal 4 April 2024 LHA No. 02/LHA/IT.III/IV/2024	20202 20205 20301	1 2 1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi		Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
				(Rp)			Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25.	BPTD Kelas II Lampung	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 455.419.658.160,00	SPL No. PS.003/1/3/ITJEN/2024 Tanggal 20 Mei 2024 LHA No. 03/LHA/IT.I/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024		10104	1	Rp 128.302.327,00
							20101	1	
							20105	2	
							20201	1	
							20207	1	
							20301	1	
							10104	2	Rp 1.254.932.302,00
26.	BPTD Kelas II Kalimantan Barat	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 640.687.333.524,00	SPL No. PS.003/1/4/ITJEN/2024 Tanggal 01 April 2024 LHA No. 02/LHA/IT.I/IV/2024 Tanggal 01 April 2024		10201	1	
							10301	1	Rp 56.261.126,00
							20201	1	
							20207	1	
							30302	1	Rp 16.700.300,00
							30305	1	Rp 282.358.438,00
							10301	1	Rp 445.615.185,61
27.	BPTD Kelas II Sulawesi Tenggara	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 665.240.955.860,00	SPL No. PS.003/2/6/ITJEN/2024 Tanggal 05 April 2024 LHA No. 03/LHA/IT.I/IV/2024 Tanggal 05 April 2024		10108	1	
							10408	1	
							20206	2	Rp 1.013.872.449,38
							20207	1	Rp 1.106.600.000,00
							30305	1	
							10202	1	
							20104	1	
28.	BPTD Kelas II Sumatera Selatan	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 101.501.051.258,00	SPL No. PS.003/1/6/ITJEN/2024 Tanggal 05 April 2024 LHA No. 04/LHA/IT.I/IV/2024 Tanggal 05 April 2024		20201	2	
							20206	2	
							20207	1	
							20302	1	
							30304	2	
							10201	2	Rp 128.468.500,12
							20302	3	
29.	BPTD Kelas II Jawa Tengah	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 8.199.503.085,00	SPL No. PS.003/1/9/ITJEN/2024 Tanggal 20 Mei 2024 LHA No. 05/LHA/IT.I/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024		20305	1	
							20101	1	
							30302	1	
							30103	1	Rp 55.185.272,71
							10403	1	
							10301	1	
							10104	3	Rp 510.897.251,08
30.	BPTD Kelas II Jawa Timur	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 44.375.895.680,71	SPL No.PS.003/1/8/ITJEN/2024 Tanggal 20 Mei 2024 LHA No. 06/LHA/IT.I/IV/2024 Tanggal 20 Mei 2024		10406	1	Rp 11.980.000,00
							10201	2	Rp 1.202.776.813,00
							20201	1	
							20304	1	
							30305	1	
							30306	1	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	BPTD Kelas II Papua	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 65.313.466.957,51	SPL No. PS.003/1/12/ITJEN/2024 Tanggal 05 Juni 2024 LHA No.07/LHA/IT.I/VI/2024 Tanggal 05 Juni 2024	10301	1	
						10307	2	Rp 449.942.277,00
						20101	1	Rp 108.619.200,00
						20201	1	
						20207	1	
						30102	1	
						30305	1	Rp 1.808.581.676,00
32.	BPTD Kelas II Nusa Tenggara Timur	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 82.695.680.163,00	SPL No. PS.003/1/10/ITJEN/2024 Tanggal 05 Juni 2024 LHA No.08/LHA/IT.I/VI/2024 Tanggal 05 Juni 2024	10408	2	Rp 40.449.617,85
						20206	1	Rp 676.663.821,02
						20304	1	
						20301	1	
						20207	1	
						30302	1	
						30305	1	
33.	BPTD Kelas II Kalimantan Timur	Inspektorat I	Audit Kinerja	Rp 35.059.548.387,00	SPL No. PS.003/1/11/ITJEN/2024 Tanggal 05 Juni 2024 LHA No. 09/LHA/IT.I/VI/2024 Tanggal 05 Juni 024	10406	1	
						10407	2	
						20102	1	
						20101	1	
						20202	1	
						30202	2	
36.	UPBU Kelas II H. Hasan Aroeboesman	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp174.964.487.000,00	SPL No. PS.005/1/11/ITJEN/2024 Tanggal 28 Mei 2024 LHA No. 07/LHA/IT.IV/V/2024	01.04	1	
						02.02	2	
						02.03	1	
34.	UPBU Kelas III A.A Bere Tallo	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp43.358.949.000,00	SPL No. PS.005/1/12/ITJEN/2024 Tanggal 28 Mei 2024 LHA No. 08/LHA/IT.IV/V/2024 Tanggal 27 Mei 2024	01.01	1	
						01.02	1	
						01.03	1	
						01.04	1	
						02.02	2	
						03.03	2	
35.	UPBU Kelas III David Constantin Saudale Rote	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp48.834.895.000,00	SPL No. PS.005/1/13/ITJEN/2024 Tanggal 28 Mei 2024 LHA No. 09/LHA/IT.IV/V/2024	01.04	2	
37.	UPBU Kelas III Sultan Bantilan	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp41.742.865.000,00	SPL No. PS.005/1/15/ITJEN/2024 Tanggal 11 Juni 2024 LHA No. 10/LHA/IT.IV/V/2024	02.02	1	
						03.01	1	
						01.03	1	
						01.04	1	
						03.03	4	

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.	UPBU Kelas III Matahora	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp68.038.337.000,00	SPL No. PS.005/1/16/ITJEN/2024 Tanggal 11 Juni 2024 LHA No. 11/LHA/IT.IV/V/2024 Tanggal 5 Juni 2024	01.04	3	
						02.03	1	
39.	UPBU Kelas III Dobo	Inspektorat IV	Audit Kinerja	Rp97.869.915.000,00	SPL No. PS.005/1/17/ITJEN/2024 Tanggal 11 Juni 2024 LHA No. 12/LHA/IT.IV/V/2024 Tanggal 5 Juni 2024	01.01	2	Rp 30.033.600,00
						01.02	1	
						01.04	1	
						02.02	1	
						02.03	1	
40.	KSOP Panarukan	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp52.061.916.000,00	SPL No PS.004/2/I/ITJEN/2024 17 Mei 2024 LHA No. 04/LHA/IT.III/V/2024 16 Mei 2024	20207	1	
						20301	2	
						20205	1	
						20202	1	
						10103	1	
41.	UPP Lewoleba	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp145.478.790.000,00	PS.004/2/3/ITJEN/2024 21 Mei 2024 LHA No. 06/LHA/IT.III/V/2024 16 Mei 2024	10401	1	
						20301	1	
						20202	1	
						20302	1	
						30102	1	
42.	UPP Ba'a	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp45.786.182.000,00	SPL No. PS.004/2/4/ITJEN/2024 22 Mei 2024 LHA No. 03/LHA/IT.III/V/2024 16 Mei 2024	20301	1	
						20207	1	
						20202	1	
						20302	1	
						30102	1	
43.	UPP Kaimana	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp83.675.234.000,00	SPL No. PS.004/1/25/ITJEN/2024 17 Mei 2024 LHA No. 01/LHA/IT.III/V/2024 14 Mei 2024	10301	1	
						10407	4	
						10407	1	
						10103	1	
						20102	1	
44.	UPP Namlea	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp83.771.148.000,00	SPL No. PS.004/1/25/ITJEN/2024 17 Mei 2024 LHA No. 05/LHA/IT.III/V/2024 16 Mei 2024	10301	1	
						10407	4	
						10103	1	
						20102	1	
						20202	1	
45.	KSOP Jayapura	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp37.071.410.000,00	SPL No. PS.304/3/3/ITJEN/2024 10 Juni 2024 LHA No. 01/HA/IT.III/VI/2024 7 Juni 2024	20202	2	
						20303	1	
						20302	1	
						20201	1	
46.	KSOP Merauke	Inspektorat III	Audit Kinerja					

No.	Satker	Unit Kerja	Ruang Lingkup Ketaatan yang Diawasi	Nilai Kegiatan yang Diawasi (Rp)	Nomor dan Tanggal Laporan	Temuan		
						Kode	Jumlah Kejadian	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	KSOP Waingapu	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp52.047.432.000,00	SPL No. PS.004/2/11/ITJEN/2024 21 Juni 2024 LHA No. 06/LHA/IT.III/VI/2024 20 Juni 2024	10407	2	
						10401	1	
						10414	2	
						20301	2	
						20207	1	
						20302	1	
						20205	1	
						20101	1	
47.	KSOP Ternate	Inspektorat III	Audit Kinerja					
48.	KSOP Babang	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp41.170.152.000,00	SPL No. PS.004/2/9/ITJEN/2024 12 Juni 2024 LHA No. 03/LHA/IT.III/VI/2024 12 Juni 2024	20304	1	
46.	KSOP Sanana	Inspektorat III	Audit Kinerja	Rp45.111.578.000,00	SPL No. LHA No. 02/LHA/IT.III/VI/2024 10 Juni 2024	20301	1	
						10407	2	
						10103	1	

KOMPOSISI SDM APIP BERDASARKAN SERTIFIKAT PROFESI YANG DIMILIKI TAHUN 2024

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Sertifikasi Internasional					Keterangan Jenis dan Jumlah
	CIA	CGAP	CRMA	Lainnya		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Triwulan I	1	0	0	0		1
Triwulan II	1					
Triwulan III						
Triwulan IV						

**TREND INDIKATOR TATA KELOLA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TIGA TAHUN TERAKHIR**

Tahun	Level Kapabilitas APIP	Skor Maturitas SPIP	Opini LK	Predikat Skor SAKIP K/L/D	Penerapan WBS	Predikat WBK/WBBM	Skor dan Predikat RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
2021	2+	3,693	WTP	77,21	Ya	Ya	79,20/(BB)
2022	3,00	3,474	WTP	77,58	Ya	Ya	78,40/(BB)
2023	3,00	3,200	WTP	78,89	Ya	Tidak	77,45/(BB)

STRUKTUR DAN KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) APIP TAHUN 2024

APIP Kementerian Perhubungan

Posisi	Total SDM	Jabatan Struktural	Jumlah PFA								Jabatan Lainnya
			Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Pertama	Auditor Penyelia	Auditor Mahir	Auditor Terampil	Jumlah Auditor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)	(12)
Triwulan I	335	11	2	28	62	93	0	4	24	213	111
Triwulan II	332	11	2	27	60	99	1	4	24	217	104
Triwulan III										0	0
Triwulan IV										0	0

Posisi	Jumlah SDM sesuai Tingkat Pendidikan						SDM Berlatar Belakang Pendidikan Ekonomi/Akuntansi/ Manajemen
	S3	S2	S1/DIV	DIII	DI/DII	SLTA ke bawah	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Triwulan I	3	106	171	45	0	10	91
Triwulan II	4	109	164	45	0	10	90
Triwulan III							
Triwulan IV							

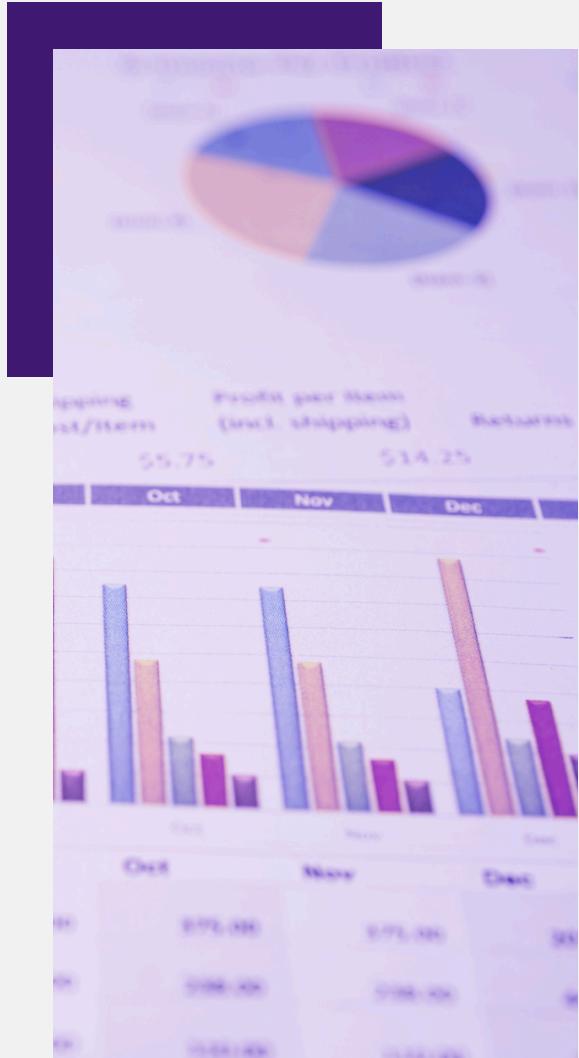
DUKUNGAN/PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI/APLIKASI APIP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Telah Memanfaatkan Teknologi Informasi/Aplikasi	Nama Aplikasi	
	Kegiatan Manajerial APIP (digunakan untuk pengelolaan/manajemen APIP)	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern (digunakan oleh Auditor/P2UPD untuk pengawasan)
(1)	(2)	(3)
Ya	Simpanan Berharga SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) E-Perfomance SMART SAKTI Krisna Renja E-Monev Website Skemaraja E-surat SIRUP (Sistem RUP) E-Planning E-Kinerja SIAU modul Keuangan	SIAU (Sistem Informasi Audit) SITAKON (Sistem Informasi Tanya dan Konsultasi) SIMADU (Sistem Informasi Manajemen Pengaduan) SIMPLE (Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Eksternal) Aroma Kopi (Aplikasi API SIMADU dengan KPK) SIMARKO (Sistem Informasi Manajemen Risiko)



KERTAS KERJA PENILAIAN MANDIRI

TAHUN 2024





ELEMEN PENGELOLAAN SDM

Hasil penilaian mandiri Elemen Pengelolaan SDM mendapatkan skor 0,630 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,540 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada Topik Perencanaan SDM.

No	ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
	ELEMEN PENGELOLAAN SDM	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan SDM APIP Keterangan: Identifikasi kebutuhan, rekrutmen SDM telah memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Terdapat kebijakan/peraturan tentang analisis jabatan.	Y	Kementerian Perhubungan telah memiliki: 1. PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 2. PM 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan	https://drive.google.com/drive/folders/1MG4_vxX18n483yQOUYsJu8zOrF5Oq7T7usp=drive_link
				Y	Kebijakan/panduan rekrutmen SDM di Kementerian Perhubungan, sebagai berikut: 1. Panduan rekrutmen PNS Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 2. Setiap tahunnya Kementerian Perhubungan menetapkan pengumuman tentang Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berisi Formasi yang dibutuhkan beserta persyaratan dan mekanisme pendaftaran sebagai contoh kami lampirkan pengumuman penerimaan CPNS formasi tahun 2021 sesuai surat pengumuman nomor PG 6 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 (update). 3. PG 36 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2022 (update) 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan di Lingkungan Kemenhub 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMenhub Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan di Lingkungan Kemenhub 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PerMenhub Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan di Lingkungan Kemenhub 7. Peraturan Inspektor Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK 106/KP.406/ITJEN-2020 tentang Pedoman Manajemen Karir ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 8. Keputusan Inspektor Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 21 Tahun 2023 tentang Kriteria Pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor Keahlian di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/1kz34TboWm0Hoz3lKObaeGVDmy7TH8B?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan SDM APIP Keterangan: Identifikasi kebutuhan, rekrutmen SDM telah memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.	1	Simpulan Pemenuhan	Y	Kebijakan analisis jabatan yang telah dimiliki sebagai berikut: 1. PM 101 Tahun 2011 telah mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, verifikasi jabatan dan penetapan hasil analisis jabatan. 2. PM 80 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan 3. Perijinan Nomor SK 104/KP.111/Ijen -2020 tentang Standar Kompetensi Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Keputusan MenPAN dan RB Nomor SKJ 18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 169 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, termasuk Inspektor Jenderal, Sekretaris Inspektor Jenderal, dan Para Inspektor di lingkungan APIP Kemenhub 6. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia KM 134 Tahun 2023 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/18KMQKKNvWVm1RW9foXEK0NTxdSMvfX?usp=drive_link
		2	Kebijakan/panduan rekrutmen mencakup kualifikasi/kriteria SDM yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.	Y	Panduan rekrutmen PNS Kementerian Perhubungan diumumkan dalam Pengumuman Penerimaan Calon ASN Kementerian Perhubungan yang mencakup jabatan yang dibutuhkan, kualifikasi dan jumlah formasi yang dibuka, terlampir kami sampaikan pengumuman rekrutmen SDM di lingkungan Kemenhub dalam 3 tahun terakhir: 1. Panduan rekrutmen PNS Kementerian Perhubungan mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 2. Setiap tahunnya Kementerian Perhubungan menetapkan pengumuman tentang Penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berisi Formasi yang dibutuhkan beserta persyaratan dan mekanisme pendaftaran sebagai contoh kami lampirkan pengumuman penerimaan CPNS formasi tahun 2021 sesuai surat pengumuman nomor PG 6 tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021. 3. PG 36 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan Formasi Tahun Anggaran 2022 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan di Lingkungan Kemenhub 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PerMenhub Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan di Lingkungan Kemenhub 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PerMenhub Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan di Lingkungan Kemenhub 7. Peraturan Inspektor Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SK 106/KP.406/ITJEN-2020 tentang Pedoman Manajemen Karir ASN di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 8. Keputusan Inspektor Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 21 Tahun 2023 tentang Kriteria Pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor Keahlian di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 9. Kualifikasi Kebutuhan Pegawai mengacu pada kualifikasi pendidikan masing-masing instansi pembina jabatan yang dibutuhkan untuk pengisian formasi sesuai Surat Sesitjen Nomor KP.101.1.10.ITJEN.2024 hal Penyampaian Usulan Formasi Pengadaan CPNS dan PPPK Tahun 2024 10. Perijinan Nomor SK 104/KP.111/Ijen -2020 tentang Standar Kompetensi Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal 11. Keputusan MenPAN dan RB Nomor SKJ 18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal 13. Analisis Jabatan dan Proses Pengisian Formasi melalui Aplikasi SIASN	https://drive.google.com/drive/folders/1KSII9nG30WfnFIKKV TJFsOlaVoHNEy?usp=drive_link
		3	APIP telah melakukan perencanaan SDM.	Y	APIP telah melakukan perencanaan SDM melalui pelaksanaan analisis jabatan dan pengajuan kebutuhan formasi ASN meliputi: 1. KP-ITJEN 39 TAHUN 2023 - Perubahan Kedua Keputusan Inspektor Jenderal Nomor SK.102_KP.104_ITJEN_2016 tentang komposisi kelompok JFA di lingkungan Ijen Kemenhub 2. Usulan kebutuhan formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai Surat Sesitjen Nomor KP.101.1.10.ITJEN.2024 tanggal 26 April 2024 3. Usulan kebutuhan formasi CASN Tahun 2023 s.d 2027 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.101.1.2.ITJEN.2023 hal Penyampaian Proyeksi Kebutuhan Formasi ASN Tahun 2023-2027 Ijen.pdf 4. Usulan kebutuhan formasi CASN Tahun 2024 s.d 2028 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.101.1.10.ITJEN.2023 - Penyampaian Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2024 - 2028 5. Usulan kebutuhan formasi CPNS Pola Pembibitan 5 tahun sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.103.1.1.ITJEN.2023 - Usulan Kebutuhan Formasi Polbit Tahun 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1gD8rW4nsnNBjWaRh4jVQbnXSsUIMQB8E?usp=drive_link

No	ELEMEN / TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan SDM APIP Keterangan: Identifikasi kebutuhan, rekrutmen SDM telah memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.	1	Simpulan Pemenuhan	Y	<p>APIP telah melakukan perencanaan SDM melalui pelaksanaan analisis jabatan dan pengajuan kebutuhan formasi ASN meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KP-ITJEN 39 TAHUN 2023 - Perubahan Kedua Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor SK.102_KP.104_ITJEN_2016 tentang komposisi kelompok JFA di lingkungan Itjen Kemenhub 2. Usulan kebutuhan formasi CPNS dan PPPK Tahun 2024 di lingkungan Inspektorat Jenderal sesuai Surat Sesijen Nomor KP.101.1.10.ITJEN.2024 tanggal 26 April 2024 3. Usulan kebutuhan formasi CASN Tahun 2023 s.d 2027 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.101.1.2.ITJEN.2023 hal Penyampaian Proyeksi Kebutuhan Formasi ASN Tahun 2023-2027 Itjen.pdf 4. Usulan kebutuhan formasi CASN Tahun 2024 s.d 2028 sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.101.1.10.ITJEN.2023 - Penyampaian Proyeksi Kebutuhan ASN Tahun 2024 - 2028 5. Usulan kebutuhan formasi CPNS Pola Pembibitan 5 tahun sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.103.1.1.ITJEN.2023 - Usulan Kebutuhan Formasi Polbit Tahun 2023 6. Analis Jabatan dan Proses Pengisian Formasi melalui Aplikasi SIASN 	https://drive.google.com/drive/folders/1WkWx_W6Eg9HMDQlk1bkOrlagb1K2nRz?usp=drive_link
		2	Proses rekrutmen dilakukan dengan benar, kredibel, transparan, dan memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria.	Y	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen CPNS Kementerian Perhubungan dilaksanakan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan seluruh pengumuman dan formasi dapat diakses secara terbuka melalui https://cpns.dephub.go.id 2. Adanya masa sanggah yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada para pelamar merupakan salah satu bentuk transparansi serta koreksi sesuai pengumuman melalui https://cpns.dephub.go.id/site/pengumuman 3. Proses rekrutmen PPPK Kementerian Perhubungan Tahun 2022 dilaksanakan melalui https://sscasn.bkn.go.id dan seluruh pengumuman dan formasi dapat diakses secara terbuka melalui https://cpns.dephub.go.id/site/pengumuman 4. Proses rekrutmen Pola Pembibitan formasi Tahun 2022 telah memperoleh SDM sebagaimana formasi dan kualifikasi yang sesuai sebagaimana SRP (Surat Rencana Penempatan) - belum diupload 5. Proses rekrutmen CASN formasi tahun 2024 telah memperoleh SDM sebagaimana formasi dan kualifikasi - belum diupload 	https://drive.google.com/drive/folders/1vIlCrujNSMkISuxfqbk2wSz1JpCidGQR?usp=drive_link
		3	Penempatan dan pola mutasi SDM APIP telah sesuai dengan kebutuhan.	Y	<p>PM 46 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Kemenhub dan Perirjen Nomor SK.106/KP.406/ITJEN-2021 tentang Pedoman manajemen karier ASN digunakan sebagai dasar penempatan dan pola mutasi SDM APIP, serta telah diimplementasikan sesuai kebutuhan organisasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mutasi korwil 2. Penempatan CPNS 3. Pengajuan diklat auditor muda 4. Mutasi JF yang mengakomodir perubahan organisasi dan tata kerja sesuai dengan Permenhub Nomor 17/2022 5. Mutasi JFA ke dalam JA 6. Usulan seleksi JPT bagi JF 7. Pengajuan diklat auditor Madya dan Utama 8. Usulan Pengangkatan Auditor Muda 	https://drive.google.com/drive/folders/1-VHquzPuFsk5HqMoFzz6IqBriOxpS2PY?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan SDM APIP Keterangan: Identifikasi kebutuhan, rekrutmen SDM telah memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.	Simpulan Pemenuhan	Y	1	Analisis jabatan dan uraian jabatan telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan APIP. 1. Perhitungan Formasi APIP di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan. Formasi Kebutuhan APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal telah mendapatkan rekomendasi BPKP pada tahun 2020 sesuai surat Kepala BPKP nomor S.583/K/JF/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Rekomendasi kebutuhan JFA pada IJen Kemenhub. 2. Pada tahun 2021 Formasi Kebutuhan JFA pada Satuan Pengawasan Intern BLU di lingkungan Kemenhub telah mendapat rekomendasi dari BPKP sesuai surat Kepala BPKP nomor S-1180/K/JF/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Rekomendasi kebutuhan JFA pada SPI BLU di lingkungan Kemenhub. 3. Pada Tahun 2022, Kemenhub kembali mengajukan permohonan rekomendasi atas kebutuhan JFA yang telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, dan telah mendapatkan rekomendasi pada tahun 2022 sesuai surat Kepala BPKP nomor S.244/K/JF/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Rekomendasi kebutuhan JFA pada IJen Kemenhub. Terlampir disampaikan dokumen evaluasi perhitungan kebutuhan JFA tahun 2020, 2021, 2022 4. Telah dilakukan evaluasi atas komposisi JFA dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Inspektorat Jenderal Nomor KP-102/KP.104/IJEN-2016 tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5. Telah dilakukan evaluasi atas kebutuhan jabatan yang tertuang dalam Peta Jabatan, hal ini telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 135 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal 6. Telah dilakukan evaluasi atas kebutuhan pegawai dan tertuang dalam usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2023 s.d. 2027 7. Telah dilakukan evaluasi atas kebutuhan pegawai dan tertuang dalam usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2024 s.d. 2028 8. Telah disusun laporan evaluasi analisis jabatan dan uraian jabatan tahun 2021 s.d 2023	https://drive.google.com/drive/folders/15rhLJpKmZOHu53GuU58I_Ltbji4TmV?usp=drivelink
		2	Identifikasi dan rekrutmen SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan SDM APIP.	Y	Identifikasi dan rekrutmen SDM APIP telah dilaksanakan dan dievaluasi secara berkelanjutan, rekrutmen dilaksanakan tidak hanya berdasarkan formasi UMUM, namun melalui jalur pola pembibitan serta kerjasama dengan PKN STAN. Untuk Pola pembibitan sejak tahun 2018, untuk PKN STAN sejak 2016, dan khusus untuk formasi Auditor sejak tahun 2020: a. Penyampaian Kebutuhan SDM APIP: 1. Telah disampaikan usulan kebutuhan formasi ASN tahun 2019 sesuai surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor KP.101/1/5/IJEN-2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Usulan kebutuhan ASN Inspektorat Jenderal tahun 2019. 2. Usulan kebutuhan formasi pegawai tahun 2020 - 2021 sesuai surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor UM.006/15/6/IJEN-2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Pemutakiran data kebutuhan ASN pada aplikasi e-Formasi. 3. Usulan kebutuhan formasi lulusan PKN STAN sesuai Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal nomor KP.101/1/16/IJEN-2021 tanggal 23 September 2021 kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi. 4. usulan kebutuhan formasi pola pembibitan dari sekolah kedinasan Kemenhub, sesuai surat Sesitjen nomor UM.006/2/14/IJEN-2022 tanggal 25 Februari 2022. 5. usulan kebutuhan formasi pola pembibitan dari sekolah kedinasan Kemenhub sesuai surat Sesitjen nomor SM.501/1/2/IJEN-2022 tanggal 7 Maret 2022. 6. Usulan kebutuhan formasi pola pembibitan dari sekolah kedinasan Kemenhub Tahun 2023 7. Usulan kebutuhan formasi PPPK Tahun 2023 B. Proses seleksi penerimaan SDM APIP C. SK penempatan dan mutasi SDM APIP D. Laporan hasil evaluasi proses identifikasi, rekrutmen sampai dengan penempatan dan mutasi 2021-2023	https://drive.google.com/drive/folders/1xaUffHFAoYPWG2lUJ4un-ABW7Wi4uVI?usp=drivelink

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		NO	URAIAN	Y/T				
1	Perencanaan SDM APIP Keterangan: Identifikasi kebutuhan, rekrutmen SDM telah memadai, cukup, dan efektif untuk mencapai sasaran pengawasan intern.	Simpulan Pemenuhan	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 4	1. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan dan implementasi terkait perencanaan SDM APIP secara berkelanjutan; 2. Perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait pola mutasi dan pola karir sesuai dengan kondisi SDM APIP.			
		1	Perencanaan SDM telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.	T	1. Secara umum sudah dilakukan Analisis jabatan dan uraian jabatan sesuai dengan kebutuhan serta dievaluasi secara berkelanjutan; 2. Secara umum sudah dilakukan identifikasi dan rekrutmen SDM sesuai dengan kebutuhan serta telah dievaluasi secara berkelanjutan, namun untuk kebijakan pola mutasi dan pola karir belum disesuaikan dengan kondisi SDM terbaru.			

No	ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
	ELEMEN PENGELOLAAN SDM	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pengembangan SDM Profesional APIP		Simpulan Pemenuhan	Y	<p>Keterangan: Pengembangan SDM APIP dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1VimvNlJYed48zg5k7ASdcfgY6nkSvJ9Yn?usp=drive_link
		1	Terdapat kebijakan pengembangan SDM.	Y	<p>APIP telah memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara paragraf 7, pasal 49, hal.21-22 b. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; c. Kep Menhub Nomor 586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern bab standar umum poin 2010 sd 2013 hal 29 sd 30; d. Perijen SK 104/KP.11/ITJEN-2020 tentang standar kompetensi auditor; e. Perijen SK.106_KP.406_ITJEN-2020 Pedoman Manajemen Karir ASN di ITJEN Kemenhub ; f. KM 169 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi JPT Pratama di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; g. Dalam Renstra Ijen, terdapat IKK yang menargetkan pemenuhan minimal 20 jam pelatihan bagi auditor sesuai hal. 27; h. KM 17 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kompetensi melalui pendidikan (STB) i. Peraturan BPKP No 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor j. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor k. ITJEN sedang menyusun dokumen HCDP tahun 2024- 2027 bagi seluruh Auditor 	

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pengembangan SDM Profesional APIP Keterangan: Pengembangan SDM APIP dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.	Simpulan Pemenuhan	Y			https://drive.google.com/drive/folders/1nAPQRV6-gFbl7xiE2DFsRztoW_XcpCT4w?usp=drive_link
		1	Kebijakan pengembangan SDM telah:			
		(1)	Memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis, majaerial dan sosiokultural pada Lampiran Hal 12 s.d. 18 dan Hal 345 s.d. 396	Y	1. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 169 Tahun 2022 telah memuat proses/mekanisme/kriteria untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan aktivitas pengawasan meliputi kompetensi teknis, majaerial dan sosiokultural pada Lampiran Hal 12 s.d. 18 dan Hal 345 s.d. 396 3. KM 17 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Bentuk Pendidikan Melalui Mekanisme Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah memuat proses / mekanisme/kriteria untuk pengembangan kompetensi melalui mekanisme tugas belajar 4. Peraturan BPKP No 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor	https://drive.google.com/drive/folders/1EVN2vMmbHtQQDQJndQ0T6lgpw-IIFX3?usp=drive_link
		(2)	Mengatur jam pelatihan minimal (jam/hari/jenis) yang harus terpenuhi dalam rangka pengembangan profesi individu auditor.	Y	Dalam Renstra Itjen 2020-2024 dan revisi renstra 2020-2024 telah diatur jam pelatihan minimal 20 jam setahun bagi jabatan fungsional tertentu, menjadi indikator kinerja kegiatan (Hal 27)	https://drive.google.com/drive/folders/1YOIifsimpXT4f-oHT59cplsvTi6JD5W?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
		1	(3) Mengatur proses/mekanisme/kriteria pemberian penghargaan individu dan tim.	Y	Kami telah memiliki: 1. Peraturan Irjen Nomor SK.103/KP.901/ITJEN-2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Tim Audit Terbaik di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 2. Peraturan Irjen Nomor SK.94/KP.402/ITJEN-2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi ASN di Lingkungan ITJEN Kemenhub 3. Keputusan Irjen Nomor KP ITJEN 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Terbaik Audit ITJEN Kemenhub 2022	https://drive.google.com/drive/folders/1ZIBwnhV4Bh0c21kAg9fRvflhvW61YRo?usp=drive_link
			(4) Mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/lembaga.	Y	Dalam standar kompetensi auditor, standar audit dan kode etik auditor terdapat klausul terkait SDM APIP wajib meningkatkan kompetensi melalui organisasi profesi/asosiasi/lembaga 1. Keputusan Menteri PANRB Nomor SKJ.18 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern di Lingkungan Kemenhub (Hal 30 PDF) 3. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP – 7/AAPI/DPN/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Periode Tahun 2021 – 2024 - belum diupload	https://drive.google.com/drive/folders/19J3hNPAdL1Nz3eXHYoCxLWIDqFk0x1XA7usp=sharing
		2	APIP telah melakukan kegiatan pengembangan SDM.	Y	Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan SDM APIP yang terdapat dalam: 1. Surat Dinas Nomor SM.005/1/2/ITJEN/2024 dari ITJEN ke BP3 Curug hal Permohonan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Auditor 2. Surat Dinas Nomor SM.108/2/3/ITJEN/2024 dari ITJEN ke BPKP hal Usulan Peserta Seleksi Administratif Diklat dan Sertifikasi Non-JFA STAR BPKP Tahun 2024 3. Surat Dinas Nomor SM.108/1/19/ITJEN/2024 dari ITJEN ke PT RAP Asia Consulting hal Usulan Nama Peserta Training online Optimizing Risk Managemen In Public Sector 4. Surat Dinas Nomor SM.108/1/8/ITJEN/2024 dari ITJEN ke BPKP hal Usulan Nama calon peserta Diklat Audit Ketaatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 5. Surat Dinas Nomor SM.108/1/10/ITJEN.2024 hal Usulan Nama calon Peserta Pelatihan TABK dan P3DN dilingkungan Inspektorat Jenderal Kemenhub Tahun 2024 6. Pengembangan SDM melalui jalur pendidikan telah dilaksanakan di ITJEN terdapat dalam Surat Dinas Nomor SM.108/1/5/ITJEN/2024 hal Usulan Peserta Seleksi Program Beasiswa Pubindiklatren Bappenas Tahun 2024 Tahap 2 7. Surat Dinas terkait Usulan Diklat PIBR dan Audit Investigasi 2024 8. Rekapitulasi Data Pelatihan pada Auditor terdapat pada dokumen Laporan Monitoring Pengembangan Kompetensi SDM Itjen 2023 (Bab II)	https://drive.google.com/drive/folders/1x0nuN-9vSjUmyAfFWQ-eoFRDFwFMt575?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN LEVEL 3				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pengembangan SDM Profesional APIP Keterangan: Pengembangan SDM APIP dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.	1	Simpulan Pemenuhan Pengembangan SDM telah:	Y		
		(1)	Memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap.	Y	APIP telah memiliki : 1. Analisis talent mapping; - belum diupload 2. Screenshot Aplikasi HR Manajemen (Peta kompetensi auditor) berdasarkan hasil talent mapping; 3. Kalender diklat tahun 2023 sesuai dengan hasil talent mapping. 4. Rekapitulasi Pengembangan Kompetensi SDM ITJEN tahun 2023 dan 2024 5. Laporan Monitoring Pengembangan Kompetensi SDM Itjen	https://drive.google.com/drive/folders/1mw-wEtshU-SSBqZ6iFAg5WyPaxFNP?usp=sharing
		(2)	Menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional penunjang pengawasan (CIA, CGAP, CFE, CFRA, CGCAE, QIA dan sebagainya)..	Y	SDM yang memiliki sertifikasi profesi pada APIP penunjang pengawasan terdapat pada dokumen Laporan Monitoiring Pengembangan Kompetensi SDM Itjen (Bab II, No 3)	https://drive.google.com/drive/folders/1FO2ceJzuOJM86QlnLZhgS68AjDhFD?usp=sharing

No	ELEMEN / TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
		(3)	Membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (team building).	Y	<p>APIP telah memiliki :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat dari PPNSMAP Nomor SM.113/3/10/PPNSMAP-202 Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Komunikasi yang Efektif Bagi Auditor ITJEN 2024; b. Capacity Building pegawai Inspektorat Jenderal (terlaksana terakhir Tahun 2023) yang terdapat dalam ND.03/VII/KSDMO/ITJEN/2023 hal Laporan kegiatan Jiwa Korsa Itjen th 2023 serta surat undangan nomor UM.207/12/6/ITJEN/2023 perihal Undangan Jiwa Korsa 2023 dan yang terdapat dalam laporan UKI TW I 2024 (no 3, 4, dan lampiran dokumentasi); c. SK Ketua Tim d. Diklat Sustainable and Entrepreneur Leadership e. Training Leadership bagi Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal 	https://drive.google.com/drive/folders/1lvHeDkrOTNgBPL8lmsCox4thEkiMYYO?usp=drive_link
		2	Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun	Y	<p>Seluruh SDM pengawasan kami telah memenuhi jam pelatihan minimal 20 jam selama setahun sebagaimana tertuang dalam Laporan Monitoring Pengembangan Kompetensi SDM Itjen dan Rekapitulasi Diklat</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1A_4gLL7a9pWgPH4To7IPYedqRMYgMEt?usp=drive_link
		3	Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK tim penilai dan Sertifikat penghargaan Tim dan Individu.	Y	<p>APIP telah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada tahun 2021 dan 2022 Telah dilaksanakan pemilihan tim audit terbaik Inspektorat Jenderal dan ditetapkan pemenang melalui Kepirin No. KP-ITJEN 11 TAHUN 2022 tentang Penetapan Tim Audit Terbaik dan Kepirin No. KP-ITJEN 13 Tahun 2023 Penetapan tim audit terbaik ITJEN b. pemberian penghargaan terhadap individu dan ASN berprestasi serta ASN teladan yang terdapat dalam laporan UKI TW I 2024 (no 3, dan lampiran dokumentasi) c. Pemberian penghargaan terhadap Inspektorat dengan hasil telah sejawaht internal terbaik tahun 2023 pada Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2024 d. Pemberian penghargaan berupa Menjadikan Petugas Haji Tahun 2024 kepada auditor Tim Audit Terbaik sesuai Surat Inspektor Jenderal Nomor PS.302/3/24/ITJEN/2024 - Penyampaian Perubahan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi Tahun 1445H/2024M 	https://drive.google.com/drive/folders/14imivErpYWmEvhP19Fx3D01kOoqgS?usp=drive_link
		4	SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesi/associasi misalnya menjadi pengurus, mengikuti seminar/rapat, dsb.	Y	<p>APIP telah memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berpartisipasi aktif dalam profesi/associasi AAIFI seperti tertuang dalam: <ul style="list-style-type: none"> (1) Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIFI Nomor Kep-2/AAIFI/DPN/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Nasional AAIFI Periode Tahun 2021-2024; (2) berpartisipasi aktif dalam assosiasi Komite Telah Sejawat AAIFI sebagaimana tertuang dalam Surat Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Komite Telaah Sejawat AAIFI periode Tahun 2021 - 2024 Nomor 4/AAIPIKTS/V/2022 tanggal 20 Mei 2022; (3) Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIFI) KEP – 7/AAIFI/DPN/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIFI) Periode Tahun 2021 – 2024; (4) Telah dihadiri Undangan FGD User Acceptance Test (UAT) Aplikasi ELMS sesuai Surat Nomor S-15/AAIFI/Direks/2024 perihal Undangan FGD User Acceptance Test (UAT) Aplikasi ELMS (5) Inspektor Jenderal memaparkan capaian kinerja dan program kerja Komite Pengebangan Kompetensi AAIFI sesuai Surat Undangan Nomoor S-14/AAIFI/Direks/2024 perihal Progres Program Kerja Komite AAIFI Tahun 2023 dan Rencana Program Kerja Tahun 2024 (6) Permohonan Penugasan sebagai Tim QC Telaah Sejawat Eksterior pada AAIFI Kementerian Lembaga sesuai surat undangan 4/AAIFI/KTS/I/2024 tanggal 8 Januari 2024; b. SDM yang memiliki sertifikasi profesi pada APIP penunjang pengawasan terdapat pada dokumen Laporan Monitoiring Pengembangan Kompetensi SDM Itjen (Bab II, No 3) 	https://drive.google.com/drive/folders/1IpUY30fbZ4L1R5/2TsPHqDWvkX_H_M_p?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pengembangan SDM Profesional APIP Keterangan: Pengembangan SDM APIP dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.	1	Simpulan Pemenuhan	T	<p>a. APIP telah memiliki Perirjen SK 104/KP.111/ITJEN-2020 tentang standar kompetensi auditor</p> <p>b. ITJEN sedang menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang akan menghasilkan dokumen HCDP tahun 2024- 2027 bagi seluruh Auditor</p> <p>c. SK Ketua Tim</p> <p>d. Diklat Sustainable and Entrepreneur Leadership</p> <p>e. Training Leadership bagi Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <p>f. APIP telah memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2021 dan 2022 Telah dilaksanakan pemilihan tim audit terbaik Inspektorat Jenderal dan ditetapkan pemenang melalui Kepirjen No. KP-ITJEN 11 TAHUN 2022 tentang Penetapan Tim Audit Terbaik dan Kepirjen No. KP-ITJEN 13 Tahun 2023 Penetapan tim audit terbaik ITJEN 2. pemberian penghargaan terhadap individu dan ASN berprestasi serta ASN teladan yang terdapat dalam laporan UKI TW I 2024 (no 3, dan lampiran dokumentasi) 3. Pemberian penghargaan terhadap Inspektorat dengan hasil telah sejauh internal terbaik tahun 2023 pada Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Tahun 2024 4. Pemberian penghargaan berupa Menjadikan Petugas Haji Tahun 2024 kepada auditor Tim Audit Terbaik sesuai Surat Inspektor Jenderal Nomor PS.302/3/24/ITJEN/2024 - Penyampaian Perubahan Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi Tahun 1445H/2024M <p>g. APIP telah memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berpartisipasi aktif dalam profesi/asosiasi AAIPi seperti tertuang dalam: <ol style="list-style-type: none"> (1) Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional AAIPi Nomor Kep-2-AAIPi/DPN/2022 tentang Susunan Dewan Pengurus Nasional AAIPi Periode Tahun 2021-2024; (2) berpartisipasi aktif dalam asosiasi Komite Telaah Sejawat AAIPi sebagai tertuang dalam Surat Undangan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Tugas Komite Telaah Sejawat AAIPi periode Tahun 2021 - 2024 Nomor 4/AAPIKTS/V/2022 tanggal 20 Mei 2022; (3) Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP – 7/AAPi/DPN/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Periode Tahun 2021 – 2024; (4) Telah dihadiri Undangan FGD User Acceptance Test (UAT) Aplikasi ELMS sesuai Surat Nomor S-15/AAPi/Direks/2024 perihal Undangan FGD User Acceptance Test (UAT) Aplikasi ELMS (5) Inspektor Jenderal memaparkan capaian kinerja dan program kerja Komite Pengembangan Kompetensi AAIPi sesuai Surat Undangan Nomor S-14/AAPi/Direks/2024 perihal Progres Program Kerja Komite AAIPi Tahun 2023 dan Rencana Program Kerja Tahun 2024 <p>(6) Permohonan Penugasan sebagai Tim QC Telaah Sejawat Ekstern pada AAIPi Kementerian Lembaga sesuai surat undangan 4/AAPi/KTS/II/2024 tanggal 8 Januari 2024;</p> <p>h. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan SDM secara berkelanjutan, dilakukan pada</p> <ul style="list-style-type: none"> - semester I Tahun 2023 terdapat dalam Nota Dinas Nomor ND.43/VI/KSDMO/ITJEN.2023/ hal Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi SDM di Itjen Semester I tahun 2023 - semester I Tahun 2022 terdapat dalam Nota Dinas Nomor ND.37/VI/KKOTA/ITJEN/2022 hal Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi SDM di Itjen Semester I tahun 2022 - semester I Tahun 2021 terdapat dalam Nota Dinas Nomor ND.8/VII/KKOTA/ITJEN/2021 hal Laporan monitoring dan evaluasi peningkatan kompetensi SDM di Itjen Semester I tahun 2021 <p>Tahun 2020 terdapat dalam Nota Dinas Nomor ND.17/XII/KKOTA/ITJEN/2020 hal Penyampaian Bahan Laporan Tahunan</p> 	https://drive.google.com/drive/folders/1-Zrk85ehIsATEd04hhqRYVgxJk1C5Fr7usp-drive_link
		2	APIP telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang selaras dengan rencana strategis organisasi K/L/D termasuk analisis gap dan strategi pemenuhannya.	T	ITJEN sedang menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang yang akan menghasilkan dokumen HCDP tahun 2024- 2027 bagi seluruh Auditor	https://drive.google.com/drive/folders/11bPKkgp479pnR0Op2aUJgrGUH0mfT Gh?usp=driv e_link
		3	Memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh SDM APIP atas partisipasi pada organisasi profesi untuk meningkatkan aktivitas pengawasan intern.	T	<p>Program perubahan di lingkungan ITJEN telah dilaksanakan pada 2021 dan 2022 terdapat pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Sesitjen ke Biro KIP Nomor UM.006.3.2.ITJEN.2022 tanggal 18 Maret 2022 hal Laporan Pelaksanaan Program Percepatan dan Agen Perubahan ITJEN Tahun 2021; 2. Surat dari Sesitjen ke Biro KIP Nomor KP.904/4/1/ITJEN/2022 tanggal 24 Mei 2022 hal Penyampaian Agen Perubahan ITJEN Tahun 2022 ; 3. SDM APIP telah terlibat dalam organisasi profesi/asosiasi untuk memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh guna meningkatkan aktivitas pengawasan yaitu Inspektor Jendera menjadi anggota Ekssekutif Tidak Tetap, menjadi ketua Komite Pengembangan Profesi dan beberapa auditor menjadi anggota pengurus Komite Kode Etik dan Komite Telaah Sejawat dalam Susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) periode Tahun 2021 -2024; 	https://drive.google.com/drive/folders/1CVzFw6_3lobWye0JSJKrxhIMASLA4?usp=driv e_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN				LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 4					
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		
	4 Pengembangan SDM APIP menjadi role model bagi pengembangan SDM di lingkungan K/L/D	T	<p>ITJEN menjadi role model yang diimbannya diantaranya :</p> <p>a. kegiatan coaching clinic aplikasi SIMARKO digitalisasi implementasi Manajem Risiko bagi UPR dan UMR unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat pada Nota Dinas Nomor 8/ BAGREN/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Laporan Kegiatan Coaching Clinic</p> <p>b. telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pengawasan pada 114 UPT melalui pengisian kuesioner dengan hasil sangat puas pada pelaksanaan audit semester II tahun 2022 dan semester I tahun 2023 terdapat pada Nota Dinas Nomor / SETITJEN/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 hal Laporan Survey Kepuasan Pengawasan ITJEN Tahun 2023</p> <p>c. sebagai pioner di lingkungan kementerian perhubungan dengan mulai menyusun dokumen HCDP tahun 2024- 2027 bagi seluruh Auditor guna meningkatkan manajemen ASN</p> <p>d. telah menyelesaikan self assessment RB model baru dan telah menyelesaikan catatan hasil evaluasi RB oleh Kementerian PAN RB selain itu juga menginisiasi rencana kegiatan Audiensi Komite Audit dengan Menteri terdapat pada Nota Dinas Nomor 115/ PHPHH/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 hal Laporan Rapat antara Komite Audit dengan Sekretariat Komite Audit.</p> <p>e. telah dilakukan pengembangan SDM APIP dengan APIP di lingkungan Inspektorat I telah melakukan pendampingan kegiatan penyusunan Manajemen Risiko</p> <p>f. telah menginisiasi pengembangan SDM APIP seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan terkait mendorong penerapan Manajemen Risiko dengan menyelenggarakan pelatihan pendahuluan yaitu MRSOP (Manajemen Risiko Sektor Publik for Executives) selanjutnya pelatihan CGRE yang bekerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP</p> <p>g. ITJEN sebagai SDM APIP di lingkungan Kemendagri yaitu ITJEN diminta oleh sub sektor untuk menjadi pendamping dalam kegiatan diantaranya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Factory Acceptance Testing (FAT) dan studi banding Peralatan Engine Hall di Yanmar Holding CO.Ltd, Osaka, Jepang - Factory Visit Pelatihan dan Sertifikasi terkait Pengadaan Alat Pengujian Bermotor di Belanda - Factory Acceptance Testing (FAT) Universal Testing Machine (UTM) Kapasitas 1600 KN di German - Factory Acceptance Testing (FAT) Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS) serta Test Radar Arpa AIS Simulator di United Kingdom 	https://drive.google.com/drive/folders/1MH6P-xqJtQdWhh-nfVqmdwo-hXm7exW?usp=drivelink			

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PENGELOLAAN SDM	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHIAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		NO	URAIAN	Y/T				
2	Pengembangan SDM Profesional APIP Keterangan: Pengembangan SDM APIP dilakukan secara berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.	Simpulan Pemenuhan	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 3	<p>1. Pengembangan SDM telah adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.</p> <p>2. Telah dilakukan evaluasi pengembangan SDM secara berkelanjutan terkait kebijakan, kebutuhan dan implementasi, namun belum dilakukan evaluasi terkait pemanfaatan pengembangan SDM secara menyeluruh;</p> <p>3. Telah menyusun proyeksi kebutuhan kompetensi dan keahlian SDM jangka panjang melalui HCDP.</p>	<p>Dalam rangka optimalisasi pemenuhan level 4, perlu dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM secara berkelanjutan terkait kebijakan kebutuhan implemenataasi kebermanfaatan; 2. SDM APIP yang terlibat dalam organisasi profesi/associasi/lembaga perlu mengimplementasikan praktik terbaik yang diperolehnya sebagai program perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal; 3. Untuk membangun kualitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi dalam tubuh APIP, maka setiap tahunnya perlu dilaksanakan pengembangan SDM APIP menjadi role model agar menginspirasi dan menjadi contoh untuk rekan kerja yang lain. 		
		2	Pengembangan SDM APIP menjadi <i>role model/benchmark</i> bagi pengembangan SDM APIP lainnya.					



ELEMEN PRAKTIK PROFESIONAL

Hasil penilaian mandiri Elemen Praktik Profesional mendapatkan skor 0,72 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,540 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada seluruh topik pada element tersebut, antara lain Topik Perencanaan Pengawasan dan Topik Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas.

NO	ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN			
		LEVEL 1			
ELEMEN PRAKTIK PROFESSIONAL	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1 Perencanaan Pengawasan	Simpulan Pemenuhan	1 Terdapat kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT).	Y	Pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) terdapat pada: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, Bab II Pasal 4 tentang Pedoman Pengawasan 2. Plagam Pengawasan Internal Tahun 2021 3. Keputusan Inspektor Jenderal KP Itjen 26 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan 4. SOP Penyusunan PKPT 044/SOP/ITJEN/12/2019 tanggal 26 Desember 2019 5. KM 64 tahun 2023 tentang Kebijakan Pengawasan Intern	https://drive.google.com/drive/folders/1TcmfCUQLRiqwsZchPQdanqrBQlGGV?usp=drive_link
2. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Simpulan Pemenuhan	1 Terdapat kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (<i>Quality Assurance and Improvement Program/QAIP</i>).	Y	Kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas tertuang dalam: 1. Dalam Peraturan Menhub Nomor PM 41 Tahun 2019 dalam halaman 7 memuat kebijakan terkait program penjaminan dan peningkatan kualitas; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PM 41 Tahun 2019 Halaman 6-7 Pasal 60 bahwa Ijen merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas; 3. Keputusan Irjen Nomor KP-ITJEN 34 Tahun 2023 tentang PKPT Ijen Kemenhub Tahun 2023 hal. 37. 4. KP-ITJEN 70 Tahun 2023 tentang pedoman kendali mutu pengawasan Inspektor Jenderal kemenhub; 5. SE-ITJEN 1 TAHUN 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat, 6. SE-ITJEN 2 Tahun 2022_Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Atas Kegiatan Audit Inspektor Jenderal dan SE-ITJEN 3 Tahun 2022_Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Atas Kegiatan Audit Inspektor Jenderal; 7. SE-ITJEN 3 TAHUN 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern atas Kegiatan Audit Ijen Kemenhub; 8. SOP Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal No. 039/SOP/ITJEN/11/2019;	https://drive.google.com/drive/folders/1rkiv13cM1akQYmpC9flgUsQk1YnW7ups=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PRAKTIK PROFESSIONAL	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan Pengawasan Keterangan: Penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.	Simpulan Pemenuhan	1 Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengakomodasi prioritas manajemen, berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi.	Y	PKPT telah mengakomodasi prioritas manajemen melalui penyusunan Agenda Pengawasan yang telah mengcascade sasaran strategis organisasi secara <i>top down</i> sesuai halaman 20 s.d 37 PKPT 2024 dan pemilihan objek pengawasan mempertimbangkan profil risiko audit sebagai mana lampiran PKPT mulai halaman 78 s.d 203.	https://drive.google.com/drive/folders/1DgxJbRn5f6BQt06X2qr2dad7_cPSkXn7u?usp=drive_link
			2 APIP telah memiliki PKPT.	Y	PKPT Tahun 2024 telah ditetapkan melalui KP. ITJEN 26 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat jenderal kementerian Perhubungan Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1DgxJbRn5f6BQt06X2qr2dad7_cPSkXn7u?usp=drive_link
2.	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Keterangan: Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.	Simpulan Pemenuhan	1 Kebijakan tentang program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup:	Y		https://drive.google.com/drive/folders/1HQjA_eO2YrHb7wyL54laAlbEaUch_rb?usp=drive_link
			(1) Penilaian intern (pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjenjang dan penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi).	Y	1. Dalam PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern Pasal 61 mengatur terkait penilaian intern (hal. 37); 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PM 41 Tahun 2019 hal.5 Pasal 24 ayat 3 bahwa LHA di reviu secara berjenjang oleh Tim Audit. 3. Dalam SE-ITJEN 3 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Atas Kegiatan Audit Inspektorat Jenderal; 4. Dalam KP-ITJEN 70 Tahun 2023 tentang pedoman kendali mutu pengawasan Inspektorat Jenderal kemenhub;	https://drive.google.com/drive/folders/1bEYgutmARTxQ89OpV3MCIQWewi6OAVd?usp=drive_link
			(2) Penilaian ekstern/telaah sejawat.	Y	1. Dalam PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Intern pasal 62 (hal. 37) terdapat ketentuan mengenai telaah sejawat eksternal yang mengacu pedoman telaah sejawat dari AAPIP; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PM 41 Tahun 2019 Halaman 7 Pasal 60 bahwa program pengembangan dan penjaminan kualitas mencakup penilaian intern dan ekstern; 3. Surat Edaran Irjen Kemenhub Nomor SE-ITJEN 2 Tahun 2022 dan SE-ITJEN 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejawat Intern Atas Kegiatan Audit Itjen Kemenhub	https://drive.google.com/drive/folders/1Vb6ZG8saFziyUIGHQViYekbl8uCJ0pDm2?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN			LINK DATA DUKUNG	
		NO	URAIAN	Y/T		
ELEMENT PRAKTIK PROFESSIONAL		LEVEL 2				
2.	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Keterangan: Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.	2	Melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP).	Y	<p>Penjaminan dan peningkatan kualitas dilaksanakan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reviu berjenjang dalam pelaksanaan audit, sebagaimana tertuang dalam PKA pada KMA 8, KMA 11-14 dan dalam KKA pada KMA 22; - Pelaksanaan telah sejawaat eksternal tahun 2021 oleh Itjen Kementerian Sosial sesuai Surat Ijen Kemensos Nomor 689/2/PS.02/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal penyampaian Laporan Hasil Telaah Sejawat Eksternal Itjen Kemenhub; - Pelaksanaan telah sejawaat eksternal tahun 2016 oleh Itjen Kementerian kelautan dan perikanan sesuai Surat Ijen KKP Nomor 15.6.1/ITJ/TU.210/UJ/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Laporan Hasil Telaah Sejawat terhadap Itjen Kemenhub - Surat Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Nomor 854/2/PS.02/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Quality Control Telaah Sejawat Eksternal Ijen Kemhub; - Pelaksanaan telah sejawaat internal tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal Tahun 2021; - Nota Dinas Inspektur IV Nomor 373-IT.IV-XII-2022_Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2022 - Nota Dinas Inspektur IV Nomor 426-IT.IV-X-2023_aporan hasil Telaah Sejawat Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2023. 	https://drive.google.com/drive/folders/1d_mnNGavAK4Amkd3-BHt-X40fOh49UjuU?usp=drive_link
		3	Memonitor dan melaporkan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP.	Y	<p>Monitoring dan pelaporan kinerja dan efektivitas kegiatan APIP dilaksanakan secara berkala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bulanan : melalui aplikasi e-performance; - Triwulan : Laporan monitoring capaian kinerja Triwulan; - Tahunan : LAKIP tahun 2023 	https://drive.google.com/drive/folders/1t16ZzsHNKAOSGRzID_myt59XJepo3i3?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PRAKTIK PROFESIONAL	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan Pengawasan Keterangan: Penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.		Simpulan Pemenuhan	Y		
		(1)	Penyusunan PKPT telah :			
		(1)	Mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaihan sasaran yang tertuang dalam AUP hal 20-37 di dalam PKPT 2024 dan pemahaman proses bisnisnya.	Y	PKPT kami telah mengidentifikasi keselarasan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi K/L/D serta indikator kinerja capaihan sasaran yang tertuang dalam AUP hal 20-37 di dalam PKPT 2024 dan pemahaman proses bisnisnya.	https://drive.google.com/drive/folders/13d2Cn42uNRBivFprb0pv_y8mPOJdBhkD?usp=drive_link
		(2)	Mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe (antara lain: urusan, unit kerja, program, kegiatan, fungsi yang dapat diawasi).	Y	PKPT kami telah disusun dengan mengidentifikasi semua area pengawasan yang dapat dijadikan sasaran pengawasan atau audit universe sebagaimana tertuang dalam PKPT Tahun 2024. Audit universe disusun dengan pendekatan organisasi (unit kerja, satker). Pemetaan risiko objek audit digunakan sebagai alat dalam menentukan pelaksanaan audit kinerja agar ditemukan prioritas objek audit, berdasarkan 8 Faktor Risiko sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Implementasi Penilaian Risiko- Total Anggaran Belanja Modal dan Non operasional- Potensi PNBP- Pelaksanaan Audit Sebelumnya- Beban Kerja- Kecepatan Penyelesaian Hasil Audit Itjen- Letak Geografis- Nilai Aset Tetap	https://drive.google.com/drive/folders/12Rb4t012BgD9n6fzE1eNek-GFYoZR0N?usp=drive_link
		(3)	Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi.	Y	Pemilihan objek pengawasan dalam PKPT telah mempertimbangkan profil risiko audit sebagaimana lampiran PKPT mulai halaman 78 s.d 203 dan telah disusun Risk Register Kementerian Perhubungan serta Pedoman Penilaian Maturitas Manajemen Risiko	https://drive.google.com/drive/folders/1bOxcvp51Mls6GOMWdQchUzlfvluLfB4?usp=drive_link
		(4)	Mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan stakeholder lainnya.	Y	PKPT kami sudah mempertimbangkan masukan dari manajemen K/L/D dan stakeholder lainnya melalui: 1. Dalam rapat dinas Itjen terdapat sesi Itjen mendengar, dimana masing-masing perwakilan Eselon I telah menyampaikan saran/masukan terkait program kerja pengawasan (PKPT hal 12 s.d 14) 2. Telah terdapat masukan dari staf ahli menteri bidang hukum	https://drive.google.com/drive/folders/1vminIUGjPH2CcdxvB7sfanPKYYPEBvI7?usp=drive_link
		(5)	Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi.	Y	PKPT telah mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi tercantum Iktisar Sumber Daya Pengawasan pada PKPT mulai dari halaman 87 s.d 90	https://drive.google.com/drive/folders/1eXOsX_0jKm-YUjKcbGR6414-XHUbA42?usp=drive_link
		(6)	Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya.	Y	PKPT telah menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya mulai dari halaman 92 s.d 203	https://drive.google.com/drive/folders/1xW6l7VxOwrTQh_maQUuiAcFD5jGN_JL97?usp=drive_link
		(7)	Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi K/L/D.	Y	Rancangan PKPT telah disampaikan kepada Menteri Perhubungan, dan telah disampaikan masukan yang ditugangkan dalam PKPT yang ditetapkan melalui Perijinan Nomor KP-IT.JEN 26 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal kementerian Perhubungan Tahun 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1YGgx67uI0FC37phE6CJNbB4vgA_EK15?usp=sharing
			Simpulan Pemenuhan	Y		
2.	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Keterangan: Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.		Melaksanakan dan mendokumentasikan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) melalui:			
		1	Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan intern/reviu berjengjang yang dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar, meliputi: perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut.	Y	- Pelaksanaan pengawasan telah dilakukan reviu berjengjang sebagaimana tertuang dalam PKA pada KMA 8, KMA 11-14 dan dalam KKA pada KMA 22. Selain itu, telah dilaksanakan telah sejawat internal pada tanggal 14 Agustus s.d 04 September 2023 dan telah sejawat eksternal oleh Kementerian Sosial pada tanggal 22 November s.d 3 Desember 2021; - Surat Inspektor Jenderal Kementerian Sosial Nomor 854/2/PS.02/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Quality Control Telaah Sejawat Ekstern Itjen Kemenhub; - Nota Dinas Inspektor IV Nomor 426/IT.IV/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Telaah Sejawat Intern Kemenhub Tahun 2023.	https://drive.google.com/drive/folders/15ziZUjEA63E_LKROpGvoYN_FEOCEnMnGA?usp=drive_link
		2	Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar audit.	Y	telah dilaksanakan telah sejawat internal pada tanggal 14 Agustus s.d 04 September 2023 , sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Inspektor IV Nomor 426-IT.IV-X-2023_aporan hasil Telaah Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2023.	https://drive.google.com/drive/folders/14cxVoZktiPVAMVpHtJLJLw6ewBDxSzK?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PRAKTIK PROFESSIONAL	ASPEK PENILAIAN				LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3					
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		
2.	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Keterangan: Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.	3	Penilaian eksternal dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar.	Y	<ul style="list-style-type: none"> - Telaah sejauh eksternal Ijen Kemenhub telah dilaksanakan 5 tahun sekali. Terakhir dilaksanakan pada Tahun 2021 oleh Ijen Kementerian Sosial sebagaimana Surat Ijen Kemensos Nomor 689/2/PS.02/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal penyampaian Laporan Hasil Telaah Sejauh Eksternal Ijen Kemenhub. Sebelumnya, telaah sejauh eksternal Ijen Kemenhub dilaksanakan pada tahun 2016 oleh Ijen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana Surat Ijen KKP Nomor 15.6.1/ITJ.5/TU.2.10/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Laporan Hasil Telaah Sejauh Eksternal Ijen Kemenhub; - Surat Inspektor Jenderal Kementerian Sosial Nomor 854/2/PS.02/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Quality Control Telaah Sejauh Eksternal Ijen Kemenhub. 	https://drive.google.com/drive/folders/1qWxJwrbX80dT4cllaCbKtYZIA-N8zWlw?usp=drive_link	
		4	APIP melaporkan hasil QAIP yang mencakup:			https://drive.google.com/drive/folders/1B ufJfvv9YK4P7s7iE-qgbp-98Kk1pXx?usp=drive_link	
		(1)	Ruang lingkup dan frekuensi, baik atas penilaian intern dan ekstern.	Y	Laporan hasil telaah sejauh internal tahun 2023 hal. 4 dan hal. 6 telah mencakup ruang lingkup dan jumlah sampel.	https://drive.google.com/drive/folders/1w olibb9MbVvone7B6vaUP_QQHmSyJdDvU?usp=drive_link	
		(2)	Kualifikasi dan independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan.	Y	Laporan hasil telaah sejauh internal tahun 2023 hal. 3.	https://drive.google.com/drive/folders/1z aWAT_JNFbbIOLH2SaV1m0XSbNqzgS_?usp=drive_link	
		(3)	Kesimpulan penilai atau tim penilai.	Y	Laporan Hasil telaah sejauh internal tahun 2023 hal. 25	https://drive.google.com/drive/folders/1l t0m5eQmj45RYK_j7vFHPK2_Md6RZ?usp=drive_link	
		(4)	Rencana tindak perbaikan.	Y	Laporan hasil telaah sejauh internal tahun 2023 hal. 26	https://drive.google.com/drive/folders/1q D99mleXIQWAG8hQQ6xyLk3ZHxA3ziV?usp=drive_link	
		5	Telah mengembangkan sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti hasil QAIP berupa pelaksanaan rekomendasi perbaikan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan pengawasan intern dan kesesuaian dengan standar.	Y	<p>Prosedur tindak lanjut hasil telaah sejauh internal tercantum pada SE-ITJEN 3 Tahun 2023_Petunjuk Pelaksanaan Telaah Sejauh Intern Atas Kegiatan Audit Inspektorat Jenderal</p> <p>Telah dilaksanakan tindak lanjut atas hasil telaah sejauh eksternal Tahun 2021, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah ditetapkan piagam pengawasan Tahun 2021; - Dalam Proses penyusunan piagam pengawasan tahun 2024; - PKPT Tahun 2023 telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan (pada hal. 2 PKPT); - Telah ditetapkan rekomendasi kebutuhan auditor oleh BPKP sesuai surat Kepala BPKP Nomor S-244/K/JF/2022 tanggal 15 Maret 2022. <p>Monitoring tindak lanjut hasil terlala sejauh tercantum dalam laporan evaluasi TSI tahun 2021 s.d 2023</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1c BExmNIFkrho7ADgrm8iUCC0aqpwK-Kx?usp=drive_link	
		6	Meningkatnya kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.	Y	<p>Telah dilaksanakan survei kepuasan terhadap stakeholders, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Survei kepuasan pengawasan dengan nilai persentase 88% dengan katagori Sangat Puas sebagaimana tertuang dalam Surat Sesijen Nomor 04/SETITJEN/X/2023 tanggal 04 Oktober 2023; - Survei/kuisisioner kepuasan stakeholder dalam rangka pelaksanaan telaah sejauh eksternal tahun 2021 dengan Menteri Perhubungan dan Dirjen Hubla dengan nilai Puas; 	https://drive.google.com/drive/folders/1Q hidN2yZAh6I9xGP5Xh5a_sRaSlc0c?usp=drive_link	

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PRAKTIK PROFESIONAL	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Perencanaan Pengawasan Keterangan: Penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.	Simpulan Pemenuhan	1 Perencanaan pengawasan dievaluasi secara berkelanjutan	Y	Perencanaan pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan dari tahun 2021 s.d 2023, berikut dokumen evaluasi PKPT Inspektorat Jenderal: 1. Evaluasi PKPT Tahun 2021 dan 2022; 2. Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan PKPT secara triwulan tahun 2023 dan tertuang juga di dalam Prosiding Rakornis 2023 mulai halaman 29 s.d 83; 3. Evaluasi atas SOP penyusunan PKPT.	https://drive.google.com/drive/folders/1CKMHS2trrlsxfJXw2Ga9-3YTVislGT?usp=drive_link
		2	Perencanaan pengawasan menggunakan profil risiko organisasi K/L/D secara keseluruhan (Enterprise Risk Management (ERM)).	Y	1. Penyusunan PKPT Tahun 2021-2024 telah mempertimbangkan profil risiko audit. 2. Sebagai pedoman pelaksanaan Manajemen Risiko di Kementerian Perhubungan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Implementasi pedoman tersebut, antara lain: a. Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pengelola Risiko di Tingkat Kementerian Perhubungan; dan b. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARKO) dalam rangka digitalisasi proses manajemen risiko untuk tingkat entitas Eselon I, Eselon II Pusat dan UPT Mandiri yang ditunjukkan melalui SS bagian kontek risiko yg menunjukkan progres pengisian dari mulai identifikasi risiko-analisa dan evaluasi-rencana pengendalian c. Telah dilaksanakan coaching/sosialisasi/pendampingan penyusunan manajemen risiko pada unit kerja. 3. Penilaian maturitas MR saat ini masih menunggu itu masih menunggu penetapan pedomannya, di mana saat ini sedang proses legal drafting. Penilaian Maturitas MR dijadwalkan akan dilaksanakan pada Bulan Agustus 2024 oleh Inspektorat Investigasi.	https://drive.google.com/drive/folders/18YojsjTeZSbReF7pQgpO3gCFYlLxarY4?usp=drive_link
2.	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Keterangan: Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.	Simpulan Pemenuhan	1 Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP) dievaluasi secara berkelanjutan.	Y	Telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan, pedoman, maupun pelaksanaan QAIP di Iljen Kemenhub. - Terlampir Laporan Evaluasi Telaah Sejawat Intern Tahun 2021, 2022, dan 2023 - Penjaminan dan peningkatan kualitas pengawasan juga dinilai melalui kegiatan SURVEY Kepuasan Pengawasan yang dievaluasi setiap tahunnya. Terlampir laporan evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Pengawasan sbb: a. Nota Dinas kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 143a/PHPH/XII/2023 tanggal 1 November 2023 Hal Laporan Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan Tahun 2023; b. Nota Dinas kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 29a/PHPH/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 Hal Laporan Evaluasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan Tahun 2022;	https://drive.google.com/drive/folders/1S7gGY2FMxFX6ExHuertxMM3DePV2Cd?usp=drive_link
		2	Berbagi pengetahuan dengan pimpinan K/L/D perihal praktik kerja unggulan dan peningkatan kinerja untuk mendapatkan dukungan peningkatan kegiatan pengawasan dan organisasi secara berkelanjutan.	Y	APIP Kemenhub melaksanakan berbagi pengetahuan terkait praktik kerja unggulan dan peningkatan kinerja untuk mendapatkan dukungan peningkatan kegiatan pengawasan dan organisasi secara berkelanjutan pada kegiatannya di dalam APIP. Terlampir SK DPN AAPI (Kep-7 SK DPN AAPI) Perubahan Susunan DPN AAPI Periode 2021-2024 berserta Laporan Kegiatan Komite Telaah Sejawat DPN AAPI	https://drive.google.com/drive/folders/1FwBVceoW36-Ojutayt0V9WFsRL_3suM_5?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PRAKTIK PROFESSIONAL	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		NO	URAIAN	Y/T				
1	Perencanaan Pengawasan Keterangan: Penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko untuk menetapkan pengawasan intern sesuai dengan tujuan organisasi.	Simpulan Pemenuhan	1 Perencanaan pengawasan bersifat foresight	T T	<p>Hasil penilaian mandiri mencapai level 4</p> <p>1. Sudah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terkait perencanaan pengawasan melalui evaluasi SOP penyusunan PKPT dan evaluasi PKPT;</p> <p>2. Perencanaan pengawasan telah mempertimbangkan profil risiko audit.</p>	<p>1. Perencanaan pengawasan perlu dievaluasi secara berkelanjutan, baik terkait kebijakan implementasi dan hasil;</p> <p>2. Perlu mendorong implementasi manajemen risiko di tingkat kementerian serta mengevaluasi tingkat maturitas manajemen risikonya;</p> <p>3. Perlu dilakukan optimisasi perencanaan pengawasan berbasis risiko dengan memanfaatkan efektifitas pengendalian risiko audit.</p>		
2.	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas Keterangan: Program penjaminan dan peningkatan kualitas dirancang untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar, dan penerapan kode etik oleh auditor. Program tersebut juga menilai serta mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern.	Simpulan Pemenuhan	1 Berkontribusi untuk asosiasi profesi yang relevan guna mendapatkan wawasan dan pembelajaran berkelanjutan, serta penerapan praktik-praktik terbaik pengawasan intern secara global.	T Y	<p>Hasil penilaian mandiri mencapai level 4.</p> <p>Program penjaminan dan peningkatan kualitas telah diimplementasi dan dievaluasi secara memadai.</p>	<p>1. Kebijakan dan pelaksanaan program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAPI) telah dievaluasi secara berkelanjutan.</p> <p>2. Berbagi pengetahuan dengan pimpinan perihal praktik kerja unggulan dan peningkatan kinerja untuk mendapatkan dukungan peningkatan kegiatan pengawasan dan organisasi telah dievaluasi secara berkelanjutan.</p>		



ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA

Hasil penilaian mandiri Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja mendapatkan skor 0,2250 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,1950 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada Topik Rencana Kerja dan Anggaran, Topik Pelaksanaan Anggaran dan Topik Pelaporan kepada Manajemen.

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Rencana kerja dan anggaran APIP Keterangan: Penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Terdapat Renja APIP yang telah ditetapkan.	Y	Renja APIP telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)	https://drive.google.com/drive/folders/1ZA_qgMv8a7ee1N7wVRMzHJGn91Lqz?usp=drive_link
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Terdapat kebijakan pelaksanaan anggaran APIP.	Y	Kebijakan Pelaksanaan Anggaran APIP Kementerian Perhubungan mengacu pada KM 219 Tahun 2020 tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bagian BAB II Pelaksanaan Anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1aGdSrAhHYOMAzMNKDUZWJWCE8HkGXLH?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.					
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP Keterangan: Pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja.	Simpulan Pemenuhan	1	Terdapat kebijakan pengukuran indikator kinerja.	Y 1. Kebijakan pengukuran kinerja organisasi di Kementerian Perhubungan diatur dalam Permenhub Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai kebijakan pengukuran indikator kinerja organisasi pada Bagian BAB IV Pengukuran Kinerja 2. Indikator Kinerja Organisasi telah ditetapkan melalui KP-ITJEN 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, KP-ITJEN 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Noor KP-ITJEN 32 Tahun 2021 Tentang penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 3. Kebijakan pengukuran kinerja pegawai di Kementerian Perhubungan diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/1BTAWJvR2hpTegGzZuDO1YaqACU9FqYo?usp=drive_link
		2	Perjanjian kinerja Pimpinan APIP telah ditetapkan	Y	Perjanjian Kinerja pimpinan APIP telah ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1aGcxLuUgibb4Np2BXcm9JhQ3ntTaM4w?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
4	Pelaporan kepada manajemen K/L/D Keterangan: Komunikasi informasi atas kegiatan operasional harian untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas APIP.	Simpulan Pemenuhan	1	Y	<p>Kami memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1a. PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern pada BAB VI Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pemaparan Hasil Pengawasan Intern; 1b. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 1c. SOP Nomor 047/SOP/ITJEN/12/2019 tentang Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan 1d. Perirjen nomor SK.45/KP.801/ITJEN-2018 tentang tata cara audit; 1e. Perirjen Juklak Reviu RKA; 1f. Perirjen tentang Konsultasi Pengawasan; 1g. Perirjen tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko <p>2. Peraturan tentang Penyusunan LAKIP PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan SAKIP pada Bagian BAB VI Pelaporan Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> 2a. SOP penyusunan Laporan Kinerja Itjen dan Setitjen; 2b. SOP Pengumpulan Data Kinerja, Pengukuran Data Kinerja Itjen; <p>3. Peraturan Inspektorat Jenderal tentang Pedoman Penyusunan Laporan Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal</p> <ul style="list-style-type: none"> 3a. SOP Penyusunan Laporan Tahunan Itjen dan Setitjen; 	https://drive.google.com/drive/e/folders/1BmUTFF8GksGM_UNysm1Im-EHISCh5aQfM?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Rencana kerja dan anggaran APIP Keterangan: Penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Renja dan RKA APIP telah:	Y		
			(1) Mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan.	Y	RKT dan RKA APIP telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan pencapaian (indikator kinerja) yang relevan. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Renaksi telah menjabarkan indikator kinerja, target dan anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/121Ca5ui7lwD3wZbY7xmEUUpEZPETQIS?usp=drive_link
			(2) Mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program kegiatan, sub kegiatan dan lainnya).	Y	RKT dan RKA APIP telah mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program kegiatan, sub kegiatan dan lainnya).	https://drive.google.com/drive/folders/1_Idl5f60eHzhsqTiR9o7rPajKoAin2v?usp=drive_link
			(3) Menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.	Y	RKT disusun bersamaan dengan penyusunan Pagu Alokasi RKA APIP sehingga telah menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1Cm58NBqvzJMDBuExzvRnSp2v17FBxX?usp=drive_link
		2	RKA APIP selaras dengan Renja APIP.	Y	RKA APIP selaras dengan RKT APIP	https://drive.google.com/drive/folders/1Cm58NBqvzJMDBuExzvRnSp2v17FBxX?usp=drive_link
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Kebijakan pelaksanaan anggaran APIP telah mengatur sistem pelaksanaan anggaran berupa, prosedur, otorisasi, klasifikasi, dan pencatatan pelaksanaan anggaran.	Y	Kebijakan Pelaksanaan Anggaran APIP Kementerian Perhubungan tertuang pada pada: 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 219 Tahun 2020 tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bagian BAB II Pelaksanaan Anggaran dan 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE-PHB 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kementerian Perhubungan 3. PMK 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap	https://drive.google.com/drive/folders/10mM0v6nbv151PHMJAgeDCECK127IB6?usp=drive_link
		2	APIP menggunakan sistem pelaksanaan anggaran.	Y	Sistem pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan tertuang pada: 1. IM 3 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Melalui Sistem E-Monitoring Dan Reporting Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sehingga pada pelaksanaan anggaran APIP menggunakan sistem e-monitoring. 2. Mengacu pada PerDirjen Perbendaharaan Nomor Per-41 PB/2014 tentang Penggunaan aplikasi Online Monitoring Sistem Perpendidaraan dan Anggaran Negara (OM SPAN) menjelaskan bahwa pencatatan transaksi keuangan dilakukan melalui aplikasi SPAN 3. PMK Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI 4. SE Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sebelum T.A. 2021 Berjalan 5. Perdirjen PB Nomor: Per-24/PB/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web 6. SE Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SE-ITJEN 1 Tahun 2023 tentang Penggunaan Aplikasi SIAGU Modul Keuangan dalam Penerbitan Surat Tugas dan Pengelolaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/1hJKFqld59vg4PJZWOJ8F1KhrbjekGWue?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.					
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP Keterangan: Pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja.	1	Simpulan Pemenuhan 1 Perjanjian kinerja Pimpinan APIP telah berorientasi hasil.	Y	Indikator Kinerja Program pada Dokumen PK pimpinan APIP telah berorientasi hasil	https://drive.google.com/drive/folders/1hfZJUTDRXMV38TbcGdKLqS8xbHrAdWan?usp=drive_link
		2	Perjanjian kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu,dsb) telah ditetapkan.	Y	PK para Eselon II di lingkungan Ijen telah ditetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1M74u4gunON3MhHEmAoC59K2sMP_Qw4OS?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	3	Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi.	Y	PM 85 Tahun 2020 telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan periode serta ruang lingkup monitoring-evaluasi, serta secara rinci diuraikan dalam SOP 028/SOP/ITJEN-2020 ttg Pengumpulan Data Kinerja Inspektorat Jenderal dan SOP 029/SOP/ITJEN-2020 Pengukuran Data Kinerja Inspektorat Jenderal Selain itu, Indikator Kinerja Organisasi telah ditetapkan melalui KP-ITJEN 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, KP-ITJEN 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Noor KP-ITJEN 32 Tahun 2021 Tentang penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024	https://drive.google.com/drive/folders/1hmrRz_nX1caXs9Ejh6V8JVqq7NZVu?usp=drive_link
		4	APIP telah melaksanakan pengukuran kinerja.	Y	APIP telah melaksanakan pengukuran kinerja secara periodik, melalui aplikasi e-performance, Laporan Capaian Kinerja Triwulan dan LAKIP	https://drive.google.com/drive/folders/1HfEHMwpf8h00At55qpvRr-COSMzoY7sw?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
4	Pelaporan kepada manajemen K/L/D Keterangan: Komunikasi informasi atas kegiatan operasional harian untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas APIP.	Simpulan Pemenuhan		Y		
		1	Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen K/L/D telah mengatur tentang pelaporan kinerja pada BAB VI Pelaporan Kinerja dan KM 194 Tahun 2021 dan KM 219 Tahun 2020 telah mengatur pelaporan anggaran anggaran APIP.	Y	PM 85 Tahun 2020 telah mengatur tentang pelaporan kinerja pada BAB VI Pelaporan Kinerja dan KM 194 Tahun 2021 dan KM 219 Tahun 2020 telah mengatur pelaporan anggaran anggaran APIP.	https://drive.google.com/drive/folders/1OmGMVYD2NHxVkyuoWYHwN0J4kG4Q?usp=drive_link
		2	APIP telah menyusun laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D.	Y	APIP telah menyusun LAKIP Tahun 2023 dan telah disampaikan melalui ESR MenPAN pada tanggal 13 Februari 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1V5belSOhcGAolcuEDivHVbXGXwaVrsX2?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Rencana kerja dan anggaran APIP Keterangan: Penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Renja dan RKA APIP menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian kinerja APIP.	Y	Penyusunan PK APIP telah mengacu RKT dan RKA APIP	https://drive.google.com/drive/folders/1ACa1YEHCV8kfW-RbJrk-rZ8SWQrMze?usp=drive_link
		2	Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja APIP menjadi acuan dalam penyusunan PKPT	Y	RKT, RKA, dan Perjanjian Kinerja APIP menjadi acuan dalam penyusunan PKPT	https://drive.google.com/drive/folders/1e1cDD9n2nsLBtGWVXnWbUOeDphhhwLw?usp=drive_link
		3	Renja dan RKA APIP menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.	Y	RKT, RKA APIP telah menjadi dasar untuk mengendalikan kegiatan pengawasan dibuktikan dengan adanya monitoring implementasinya secara periodik: 1. Bulanan melalui Aplikasi E-Performance 2. Triwulan dalam Laporan Capaian Triwulanan I 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan PKPT 3. Tahunan dalam LAKIP	https://drive.google.com/drive/folders/1vDbFrlovz6XsE4mniqisQpkzVzo1Nh?usp=drive_link
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah:			https://drive.google.com/drive/folders/1RDPWTr5lAROJdhVIZbpNpeg74CvrAQWp?usp=drive_link
		(1)	Selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional K/L/D serta pelaporannya.	Y	DIPA dan RKA APIP menggunakan Kode rekening (Chart of Account) yang sama yaitu 022.02.WA	https://drive.google.com/drive/folders/1CAZiddeZOoODrTqmVdZrv-rrvHD77-x6?usp=drive_link
		(2)	Mengadministrasikan keseluruhan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pengawasan intern.	Y	Seluruh biaya yang timbul terkait pemberian layanan pengawasan intern per jenis pelayanan pengawasan telah diadministrasikan dalam Dokumen Capaian Output 2023 dan 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1lW8d4vZH3arzq0FPruCAvK7Yepl0Xkn4?usp=drive_link
		(3)	Menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat.	Y	- Laporan realisasi anggaran (LRA) yang dapat menggambarkan rincian per jenis belanja tertuang pada Laporan Keuangan 2023 pada halaman 4 dan 24-31; - Aplikasi SAKTI dapat menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat dan telah dilaporkan dalam dokumen Capaian Output 2023 dan 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1hLVUU5grchJpZr7MvbGFkZyERDgv8R8t?usp=drive_link
		(4)	Dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan.	Y	-Aplikasi OM SPAN dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan dan telah dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) -Di lingkungan Inspektorat Jenderal telah dibangun Aplikasi SIaU Modul Keuangan yang dapat memonitoring realisasi anggaran terutama perjalanan dinas	https://drive.google.com/drive/folders/1uEwxCOTLmZqHSmrJN8y2kv27a3c0xyT?usp=drive_link
		(5)	Dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis.	Y	-Aplikasi E-monitoring dipantau secara berkala untuk memastikan bahwa struktur biaya masih relevan, efisien dan ekonomis. -Telah dilaksanakan rapat monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala serta pelaksanaan revisi anggaran untuk menjamin struktur biaya	https://drive.google.com/drive/folders/1rlNBfmV7tQicjMsMaPDvU7QAR1V6qsXy?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.	(6)	Menghasilkan informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (<i>overruns</i>), dan penghematan biaya (<i>cost saving</i>).	Y	-Telah dilakukan analisis efisiensi sumber daya yang tertuang dalam LAKIP Itjen Tahun 2023 halaman 39 -Analisis realisasi anggaran Overruns atau costsaving serta pengendalian biaya program/kegiatan yang tertuang dalam laporan evaluasi sistem dan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023 ND Nomor: 03A/KKU/I/ITJEN/2024	https://drive.google.com/drive/e/folders/1qDHF3F2KhPMavxSmx7R6DLWpm_pn1wJM?usp=drive_link
		(7)	Dimanfaatkan untuk pengendalian biaya program/kegiatan pengawasan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan.	Y	Pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dipertimbangkan dalam penyusunan RKA 2025, dibuktikan dengan nota dinas Setitjen nomor: 20/SETITJEN/XII/2023 perihal Penyampaian DIPA-POK TA 2024 dan Persiapan penyusunan RKA Pagu kebutuhan Inspektorat Jenderal T.A. 2025 serta ND SETITJEN Nomor: 02/SETITJEN/V/2024 perihal Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal T.A. 2025	https://drive.google.com/drive/e/folders/1FI1b0o9NEcEOKeqBAFmFzCYajYLIdp9?usp=drive_link
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP Keterangan: Pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja.	Simpulan Pemenuhan		Y	PK para Eselon II APIP telah selaras dengan PK Inspektur Jenderal. Indikator kinerja Inspektur Jenderal telah diturunkan/dicascade ke indikator kinerja para Inspektur.	https://drive.google.com/drive/e/folders/1k6l5v5UaHhUHpGJgWwbjvPi393H7H?usp=drive_link
		1	Perjanjian kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu,dsb) telah selaras dengan Perjanjian Kinerja Pimpinan APIP.	Y	PK para Eselon II APIP telah selaras dengan PK Inspektur Jenderal. Indikator kinerja Inspektur Jenderal telah diturunkan/dicascade ke indikator kinerja para Inspektur.	https://drive.google.com/drive/e/folders/1k6l5v5UaHhUHpGJgWwbjvPi393H7H?usp=drive_link
		2	Perjanjian kinerja/SKP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan APIP.	Y	Perjanjian kinerja/SKP telah ditetapkan seluruh individu di lingkungan Inspektorat Jenderal dan telah telah mengacu pada Permenpan 6 Tahun 2022 (selaras dengan indikator kinerja pimpinan). Pada tahun 2024, penyusunan SKP dilakukan melalui aplikasi ekinerja	https://drive.google.com/drive/e/folders/1LVEIVUaUWbvFi4AVNr6BSH4J3qtMH5I?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN LEVEL 3				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	3	Sistem pengukuran kinerja APIP telah:			https://drive.google.com/drive/folders/1CfGLP1lwdrAipIEJyYDDVRhas8kODE5?usp=drive_link
		(1)	Digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP.	Y	Indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RKT dan PK digunakan untuk mengukur kinerja pada level organisasi APIP dan telah disusun agenda utama pengawasan dan aktivitas utama dukungan pengawasan untuk mengukur kinerja strategis organisasi.	https://drive.google.com/drive/folders/18fg3VFqngSMUgukxzpaaj2le02OPr57?usp=drive_link
		(2)	Digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT).	Y	1. Indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RKT dan PK digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT), tertuang dalam: a. IHAT (triwulan) b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan c. LAPSEM (semesteran) d. Laporan Kinerja (tahunan) e. Laporan Evaluasi Pelaksanaan PKPT 2. Capaian strategis organisasi dituangkan dalam a. Laporan AUP TW I 2024 b. Capaian milestone yang tertuang dalam rapat manajemen	https://drive.google.com/drive/folders/1WLbQmF86A2_In_Q4ivFGvJYo65O2Vw8?usp=drive_link
		(3)	Dipantau secara berkala.	Y	1. Indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen RKT dan PK digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas pengawasan (pelaksanaan PKPT), tertuang dalam: a. e-performance (bulanan) b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan c. IHAT (triwulan) d. LAPSEM (semesteran) e. Laporan Kinerja (tahunan) f. Laporan Evaluasi Pelaksanaan PKPT 2. Capaian strategis organisasi dituangkan dalam a. Laporan AUP TW I 2024 b. Capaian milestone yang tertuang dalam rapat manajemen	https://drive.google.com/drive/folders/1xxz7nNjz4xQPw2GYGEUwZBq-unsw0OY?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
4	Pelaporan kepada manajemen K/L/D Keterangan: Komunikasi informasi atas kegiatan operasional harian untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas APIP.	Simpulan Pemenuhan		Y		
		1	Laporan akuntabilitas kepada manajemen K/L/D telah:			
		(1)	Mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (capaian kinerja, hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya).	Y	LAKIP kami telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja meliputi : - capaian kinerja hal v - hambatan dan atau faktor keberhasilan pencapaian kinerja hal 18-33 - aktivitas dalam pencapaian kinerja pada Lampiran LAKIP - penggunaan sumber daya hal 32	https://drive.google.com/drive/folders/1ivJibrTgCRaNQipeZ4UauNe61ilC9nA?usp=drive_link
		(2)	Menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan berkala kepada manajemen K/L/D.	Y	APIP telah menyusun LAKIP Tahun 2023 dan telah disampaikan melalui ESR MenPAN pada tanggal 13 Februari 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1n0ArK_PCGQxA4TuDh8IK2CTlI80_jiF1?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Rencana kerja dan anggaran APIP Keterangan: Penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Renja dan RKA APIP direviu secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa kegiatan dan anggaran yang disusun tetap realistik dan akurat dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis.	Y	<ul style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan evaluasi terhadap RKA APIP sesuai dengan KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pada penyusunan RKA pagu berikutnya yang sudah ditetapkan menjadi DIPA POK; 2. Telah dilakukan evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Organisasi melalui Evaluasi SAKIP. 3. Telah dilakukan evaluasi RKA 4 tahun berturut turut yaitu tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024. 4. Tindak lanjut evaluasi berupa penyederhanaan Komponen RO Layanan Audit Internal dari semula 12 komponen menjadi 2 komponen sebagaimana terdapat dalam Risalah Rapat Penyusunan Pagu Indikatif Itjen Tahun 2025. 	https://drive.google.com/drive/folders/13362_qlx4HGFhLSwSqV3KuQumLQWTNY?usp=drive_link
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Sistem pelaksanaan anggaran APIP telah dievaluasi secara berkelanjutan.	Y	<p>Telah dilaksanakan evaluasi secara berkelanjutan atas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaksanaan anggaran yang digunakan di lingkungan Inspektorat Jenderal, yang telah dituangkan dalam dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 02 KKP I ITJEN 2022 Penyampaian Laporan Evaluasi Sistem dan Pelaksanaan Anggaran TA 2021; - 07 KKU I ITJEN 2023 Laporan Evaluasi Sistem dan Pelaksanaan Anggaran 2022; - 03A KKU I ITJEN 2024 Laporan Evaluasi Sistem dan Pelaksanaan Anggaran 2023. 	https://drive.google.com/drive/folders/18PYVQm0-3dGkpeo1lrgNXkul8SiG7H5?usp=drive_link
		2	Hasil evaluasi pelaksanaan anggaran APIP digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya.	Y	<p>Telah dilaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran APIP dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti sebagai dasar pelaksanaan anggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal. Berikut adalah beberapa tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2021 salah satunya telah tertuang dalam ND Bagian Keuangan dan Umum Nomor: 12/KKP/III/ITJEN/2022 dan 10/KKP/V/ITJEN/2022 salah satunya penerapan pembayaran paket meeting menggunakan mekanisme LS pihak III; 2. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2022 salah satunya telah tertuang dalam ND Bagian Keuangan dan Umum Nomor: 24/KKU/II/ITJEN/2023 salah satunya dan telah diterapkan dan dievaluasi penggunaan aplikasi SIAU Modul Keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal terkait pelaksanaan perjalanan dinas mulai tahun 2023 yang tertuang dalam ND Bagian Keuangan dan Umum Nomor: 04/KKU/III/ITJEN/2023 dan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Keuangan dan Umum; 3. Telah dilaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2023 salah satunya telah tertuang dalam ND Bagian Keuangan dan Umum Nomor: 26/KKU/I/2024 salah satunya pengisian mandiri RPD 2024 dan pelaksanaan rekonsiliasi anggaran secara rutin yang tertuang dalam BA rekonsiliasi. 	https://drive.google.com/drive/folders/1qLMK4DyflvRFYHgKYUB-wvO6a1_SQ0DR?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN LEVEL 4				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.					
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP Keterangan: Pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja.	Simpulan Pemenuhan	T	Y	SKP seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP. Di dalam renstra Inspektorat Jenderal telah dituangkan cascading Sasaran dan indikator kinerja dari pimpinan Eselon I ke Eselon II dari cascading tersebut masing masing eselon II telah mengcascadingkan target kinerja ke masing-masing pegawai.	https://drive.google.com/drive/folders/1D5e_D2sy65hB6asbSW3xeo4gOiTnryD?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Vp4HzcL4-JRnPsz4DT1RRR-vgeL1gxnj https://drive.google.com/open?id=1h8AdDbilqCF1S91sAwc2lCDnh0TmwF&usp=drive_fs https://drive.google.com/drive/folders/1bD3ue10tzlWve0-ppYk66z_7U9vFm6x
		1	Perjanjian kinerja/SKP untuk seluruh individu di lingkungan APIP telah selaras dan mendukung kinerja Pimpinan APIP.		1. Sistem Pengukuran Kinerja organisasi telah dilakukan evaluasi melalui pelaksanaan Evaluasi SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP telah ditindak lanjuti sebagaimana tertuang dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP; 2. Sistem pengukuran kinerja individu telah dilakukan evaluasi melalui evaluasi pengelolaan kinerja pada E-kinerja. Telah dilaksanakan kegiatan Rencana Pengembangan Aplikasi e-Performance. Hasil yang didapatkan adalah pada rencana pengembangan aplikasi, hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-performance kedepannya akan mempengaruhi capaian pada predikat kinerja individu. Itjen telah memberikan masukan sebagaimana terdapat dalam laporan Risalah Rapat Pembahasan Capaian RO Renstra Kemenhub 2020-2024 dan Rencana Pengembangan Aplikasi e-Performance untuk Mendukung Kinerja Kementerian Perhubungan, pada halaman 7. Berdasarkan informasi dari Pusdatin, sejak tahun 2022 Aplikasi telah berjalan lancar dan tidak ada perubahan yang signifikan. Pengukuran kinerja individu dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja yang dikordinir oleh Biro SDMO dan Pusdatin sebagai pengembang aplikasi. Implementasi pengukuran kinerja individu dilakukan untuk penilaian bulan Agustus 2023 pada aplikasi E-Kinerja. Telah dilakukan pembagian peran hasil bagi tiap individu yang diintervensi dari Eselon I, Eselon II, Eselon III sampai dengan pegawai di bawahnya. Setiap bulan dilakukan penilaian kinerja sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai dan dilakukan evaluasi akhir tahun. Saat ini telah diakomodir penambahan fitur ketua tim pada aplikasi e-kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1TcX2iEToNN34BxzCmB2FmRFK5K0H7e6B?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	3	Implementasi sistem pengukuran kinerja telah menghasilkan perbaikan pencapaian kinerja.	Y	<p>1. Untuk pengukuran kinerja telah disusun KP-ITJEN 32 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, KP-ITJEN 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Noor KP-ITJEN 32 Tahun 2021 Tentang penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024;</p> <p>2. Telah dilakukan perencanaan kinerja organisasi melalui dokumen Renstra, RKT, PK, Renaksi PK selama 3 tahun berturut-turut;</p> <p>3. Telah dilakukan monitoring capaian kinerja secara berkala selama 3 tahun berturut-turut, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aplikasi e-performance (bulanan); b. Laporan Capaian Kinerja Triwulan (triwulan); c. Laporan Kinerja (tahunan). <p>4. Telah dilakukan evaluasi sistem pengukuran kinerja organisasi (Evaluasi SAKIP) selama 3 tahun berturut-turut. Hasil evaluasi SAKIP telah ditindak lanjuti sebagaimana tertuang dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1b3BTKmjyZ6lQouGnJmbIM7jkMbdj3gYO?usp=drive_link
		4	Implementasi sistem pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level individu.	Y	<p>Pengukuran kinerja sampai dengan level individu tertuang di dalam SKP masing-masing pegawai, dan pelaporan kinerja individu disampaikan melalui Laporan Bulanan dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masing-masing pegawai melalui aplikasi e-kinerja</p>	https://drive.google.com/drive/folders/12pdzICRj8TPzMq0D92f0iomQY9EYyTzs?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/1Vp4HzcL4-JRnPsz4DT1RRR-vgeL1gxnj https://drive.google.com/open?id=1h8AdDbilqCF1S9I_sAwc2lCDnh0TmwvF&usp=drive_fs https://drive.google.com/drive/folders/1bD3ue10tzl-Wve0-ppYk66z_7U9yFm6x

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
4	Pelaporan kepada manajemen K/L/D Keterangan: Komunikasi informasi atas kegiatan operasional harian untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas APIP.	Simpulan Pemenuhan	1	Y	Akuntabilitas kepada manajemen K/L dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus selama 3 tahun, melalui Evaluasi SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP telah ditindak lanjuti sebagaimana tertuang dalam matris tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dan dibuktikan dengan dokumen LMCK triwulan tahun 2021-2023 dimana di dalamnya terdapat analisis hasil kinerja, serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan organisasi kedepan	https://drive.google.com/drive/folders/1-7Vxr6_BBBCMoT6uv7q10D-958dfZbj?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		NO	URAIAN	Y/T				
1	Rencana kerja dan anggaran APIP Keterangan: Penyusunan dan penetapan rencana kerja dan anggaran APIP yang mencakup pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, aktivitas yang dilakukan dan hasil yang diharapkan.	Simpulan Pemenuhan	1 Renja dan RKA APIP telah bersifat adaptif.	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 4 Telah dilakukan evaluasi Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran secara berkelanjutan			
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.	Simpulan Pemenuhan	1 APIP mampu menciptakan inovasi sistem pelaksanaan anggaran sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan secara <i>real-time</i> untuk mendukung proses pengambilan keputusan.	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 4 Telah dilakukan evaluasi sistem pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan dan digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran periode berikutnya.			

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		NO	URAIAN	Y/T				
2	Pelaksanaan Anggaran Keterangan: Sistem pelaksanaan anggaran yang memadai untuk mengelola aktivitas APIP secara ekonomis dan efisien.							
3	Sistem Pengukuran Kinerja APIP Keterangan: Pengembangan indikator dan alat ukur kinerja, pelaporan kinerja, dan monitoring (evaluasi) pencapaian target kinerja.	Simpulan Pemenuhan	1	Sistem pengukuran kinerja telah menggambarkan capaian kinerja peran dan layanan APIP yang <i>real-time</i> .	T T	<p>Hasil penilaian mandiri mencapai level 4.</p> <p>1. Sistem pengukuran kinerja organisasi telah di <i>cascading</i> sampai dengan level individu;</p> <p>2. Telah dilakukan evaluasi sistem pengukuran kinerja melalui evaluasi SAKIP, namun belum menyeluruh sampai dengan pengukuran kinerja individu.</p> <p>1. Melengkapi Cascading indikator kinerja pimpinan sampai dengan seluruh individu secara berjenjang di lingkungan APIP yang menggambarkan keselarasan dan dukungan atas kinerja pimpinan telah terdapat pada matriks peran hasil dapat diformalkan atau disahkan oleh pejabat berwenang;</p> <p>2. Dalam rangka memenuhi indikator level 4, perlu melakukan evaluasi internal sistem informasi pengukuran kinerja organisasi (<i>e-performance</i>) dan evaluasi pengukuran kinerja individu.</p>		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		NO	URAIAN	Y/T				
4	Pelaporan kepada manajemen K/L/D Keterangan: Komunikasi informasi atas kegiatan operasional harian untuk mendukung proses pengambilan keputusan, serta membangun akuntabilitas APIP.	Simpulan Pemenuhan 1	APIP mampu menciptakan inovasi pelaporan kepada manajemen K/L/D sehingga informasi yang dibutuhkan dapat disajikan secara <i>real-time</i> untuk mendukung proses pengambilan keputusan.	T T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 4 Telah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan terkait laporan akuntabilitas kinerja organisasi melalui evaluasi SAKIP.			



ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI

Hasil penilaian mandiri Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi mendapatkan skor 0,1800 pada level 3, hasil yang sama dengan evaluasi tahun 2023.

No	ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN					
		LEVEL 1					
	ELEMEN	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Keterangan: Pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.	Simpulan Pemenuhan	1	Terdapat Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) APIP atau peraturan lain yang sejenis.	Y	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal tertuang dalam: 1. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kemenhub (Hal 278-291) 2. PM 101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kemenhub 3. PM 80 Tahun 2018 tetang Tata Cara Penyusunan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan 4. Perirjen Nompr KP-ITJEN- 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi,Tata Kerja , dan Kegiatan Inspektorat Jenderal	https://drive.google.com/drive/folders/1I9S-GGWBVZgrAJ5fnfGWOPmTOC38RD?usp=drive_link
			2	Terdapat kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal.	Y	Kebijakan koordinasi komunikasi internal tertuang dalam: 1. Perirjen Nomor KP-ITJEN- 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi,Tata Kerja , dan Kegiatan Inspektorat Jenderal 2. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal 3. KM No. KP.586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern 4. Instruksi Inspektor Jenderal Nomor IIJ.02/KP.405/ITJEN-2020 tentang Penegakan Perilaku dan Etika Pegawai/Auditor serta penggunaan Aplikasi SITAKON	https://drive.google.com/drive/folders/19FA1mgk6kh3A6NAdc5Cuk1OnEY3b5h?usp=drive_link

No	ELEMENT /TOPIK	ASPEK PENILAIAN					
		LEVEL 1					
	ELEMEN	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP						
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.	Simpulan Pemenuhan	1	Terdapat kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan APIP dengan pimpinan K/L/D.	Y	Kebijakan tentang komunikasi antara pimpinan APIP dengan pimpinan K/L/D tertuang dalam: 1. PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 2. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 3. KM 586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern 4. Piagam Pengawasan Intern (Hal 16-17) 5. PM 57 Tahun 2023 AUDIT CHARTER (hal 10-11)	https://drive.google.com/drive/folders/1Dm9cY35wxGSeilrdagn4pZN4qS4vnGgy?usp=drive_link
			2	Terdapat kebijakan tentang APIP dilibatkan dalam forum komunikasi.	Y	Kebijakan tentang APIP dilibatkan dalam forum komunikasi tertuang dalam: 1. KM 586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern 2. SK.50A.UM.207_ITJEN - 2020 Pelaksanaan Rapat Manajemen di Lingkungan Inspektorat Jenderal 3. Keputusan Nomor KEP-7/AAPI/DPN/2023 tentang perubahan susunan DPN AAIP	https://drive.google.com/drive/folders/14nhFQ05EEjKD1jswCty_dP6LPBIAK6i?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN					
		LEVEL 1					
	ELEMEN	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Hubungan APIP dengan Manajemen						
	Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.						
3	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Simpulan Pemenuhan	1	Terdapat kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.	Y	Kebijakan berbagi informasi dalam : - Piagam Pengawasan dan PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Intern (Bab VIII Pasal 68 - 75) - Audit Charter	https://drive.google.com/drive/folders/1KAqg9vOrIz1X174Y9MCKqvH3KfucMc?usp=drive_link
	Keterangan: Aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asuransi dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.						

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Keterangan: Pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.	Simpulan Pemenuhan	1 Struktur organisasi APIP telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP.	Y	<p>Struktur organisasi APIP telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi APIP dalam PM 17 Tahun 2022 (Hal 278-291) telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan dan ditetapkan secara formal, yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja APIP. 2. Naskah akademis perubahan Ortaker Itjen 2022 Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor KP.901.1.14.ITJEN.2022 Usulan Penataan Organisasi 3. Laporan evaluasi kelembagaan Inspektorat Jenderal Tahun 2023 sesuai surat nomor KP.904/2/25/ITJEN/2023 tanggal 16 Juni 2023 	https://drive.google.com/drive/folders/1XeJnc7Cj5ropPbfZsnrFxbUp9a0D6nZx?usp=drive_link
		2	Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan APIP.	Y	<p>Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengacu pada peraturan dan disusun prosedur/ kebijakan turunan yang dibuat untuk mengatur bagaimana komunikasi dan koordinasi antarpegawai sbb :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Berbagi Informasi/Komunikasi Pengawasan 2. SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal 3. Keperjen SK.50A/UM.207/ITJEN-2020 tentang Pelaksanaan Rapat Manajemen di Lingkungan Inspektorat Jenderal 4. Pelaksanaan Apel di Lingkungan Inspektorat Jenderal 5. 12-SETITJEN-1-2022 Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan Itjen 6. Nota Dinas Nomor. 186.KSDMO V.2024-Laporan Kehadiran Apel Mingguan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tanggal 06 Mei 2024 7. Nota Dinas Nomor. 197.KSDMO V.2024-Laporan Kehadiran Apel Mingguan SesiIen Tanggal 13 Mei 2024 8. Nota Dinas Nomor.209.V.KSDMO.2024-Laporan Kehadiran Apel Mingguan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tanggal 20 Mei 2024 9. Kebijakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi/ aplikasi di Lingkungan APIP telah diketahui seluruh pegawai sebagaimana dokumentasi terlampir. 	https://drive.google.com/drive/folders/1eGxQVtVsE1H4z7x5JPig-eydZMkb_Qy?usp=drive_link
		3	APIP telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern.	Y	<p>APIP telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi/ aplikasi di Lingkungan APIP seperti Sistem Informasi Audit (Siau), WhatsApp Grup untuk mendukung kinerja organisasi, serta berbagai kegiatan yang menjadi wadah berbagi informasi internal APIP melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan apel pagi mingguan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan diterbitkannya laporan apel yang memuat beberapa hal yang disampaikan oleh pembina apel; 2. Nota Dinas: 321/IT.II/XI/2023 perihal Evaluasi Capaian Kinerja dan Pembahasan Langkah Pelaksanaan Pengawasan s.d Akhir Tahun TA.2023 tanggal 06 November 2024 3. Pelaksanaan Dialog Kinerja di Lingkungan Inspektorat III tanggal 29 Januari 2024 4. Nota Dinas kepada Inspektor IV nomor 393A/IT.IV/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal penyampaian laporan kegiatan harian Inspektor IV 5. Rapat internal Penyusunan konsep peraturan pedoman penilaian maturitas Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan tgl 22 Januari 2024 6. Rapat Kegiatan NGOBRAS (Ngobrol Asik dan Santai) Pengawasan Intern 2024, sesuai ND Nomor 32/SETITJEN/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 7. Jiwa Korsa, Raman, Radin, dan Survey kepada auditor 	https://drive.google.com/drive/folders/1VkdvrEp57EWIBKsykY8U2CPoIKBFmmY?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP					
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.	1	Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan APIP untuk berpartisipasi dalam forum bersama K/L/D.	Y	Kebijakan komunikasi telah mendorong pimpinan APIP berpartisipasi bersama dalam forum bersama, antara lain: 1. Kebijakan komunikasi yang tertera dalam PM 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, 2. KM 586 Tahun 2016 tentang Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern dan Perijen 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Audit telah mendorong pimpinan APIP untuk berpartisipasi dalam forum bersama K/L. 3. Keanggotaan APIP Kemenhub dalam Satgas Focal Point Stranas PK sesuai dengan Nota Dinas Nomor 222/PHPHH/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 Perihal Risalah kegiatan forum focal point stranas PK pada Hakordia 2023; 4. Kebijakan KM 49 Tahun 2023 Tentang Unit Pengendali Gratifikasi Utama Kementerian Perhubungan, Pimpinan APIP berpartisipasi pada kegiatan pengendalian gratifikasi tingkat Kementerian Perhubungan; 5. KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Lingkungan Kementerian Perhubungan, APIP sebagai Lini Ketiga pada Struktur Manajemen Risiko Kementerian Perhubungan; 6. KP ITJEN 27 Tahun 2024 tentang Tim Pelaksana Legal Audit atas Lima Kegiatan STrategis di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 7. KP ITJEN 18 Tahun 2023 Tentang Tim Penyusun Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 8. Pengarahan dari Irjen Tahun 2023 pada Rapat Tindak Lanjut Arahan Menteri Perhubungan Mengenai Penyederhanaan SOP pada unit kerja di lingkungan Kemenhub	https://drive.google.com/drive/folders/1sYYMFeWe167eb47opGHyA2_psa_GoV6P?usp=drive_link
		2	Kebijakan forum komunikasi mengatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasan.	Y	Kebijakan forum komunikasi telah mengatur tentang jadwal pertemuan berkala dan substansi pembahasan, sebagai berikut: 1. Dalam SK.50A_UM.207_ITJEN - 2020 Pelaksanaan Rapat Manajemen di Lingkungan Inspektorat Jenderal diatur tentang jadwal pertemuan berkala, dan substansi pembahasan, yakni dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan. 2. IJEN berpartisipasi dalam forum komunikasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diadakan secara berkala, sebagaimana norma hasil kegiatan terlampir (STRAKOM) adalah kegiatan berkala mengenai strategi komunikasi dalam hal media sosial Kementerian Perhubungan. 3. Nota Dinas Nomor 12-SETITJEN-I-2022 Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi di Lingkungan IJEN 4. Telah dilaksanakan apel pagi mingguan di lingkungan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan diterbitkannya laporan apel yang memuat beberapa hal yang disampaikan oleh pembina apel;	https://drive.google.com/drive/folders/17isEMk4EoXQ8caW5qPy5iZC4oKfpN?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.	3	APIP telah berpartisipasi dalam forum K/L/D.	Y	<p>APIP telah berpartisipasi dalam satgas di lingkup Kemenhub, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas Monitoring Naturu (IM 7 Tahun 2023) laporan terlampir; 2. Satgas Monitoring Angleb (IM 4 Tahun 2024) laporan terlampir 3. Satuan Tugas P4GN 4. SATUAN TUGAS PENINGKATAN KAPABILITAS APIP 5. Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP 6. Perubahan Keperijen tg Pembentukan Tim Pengelola SAI 7. Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Kemenhub 8. KEP-9/AAPIP/DPN/2023 Tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAUPI Periode Tahun 2021-2024 9. ND 08/ SETITJEN/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 Hal Penyampaian Notulensi Kegiatan Pengenalan Aplikasi ELMS dan Sosialisasi PerKA BPKP Nomor 5 Tahun 2023 dengan Anggota AAUPI. <p>Selain itu, APIP juga berpartisipasi dalam forum di lingkup Kemenhub, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Narasumber dan pendamping dalam pembahasan rencana tindak lanjut penyelesaian piutang rumah dinas SEKJEN sesuai undangan Kepala Biro Umum No UM.207/8/24/STJ/2024 27 Februari 2024 11. Narasumber dan pendamping dalam kegiatan monitoring dan evaluasi TL temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Temuan Hasil Audit ITJEN pada BPTD kelas II Prov Riau dan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Barat Sesuai Surat Sesijsien Darat no. UM.202/10/4/DJP/D/2023 tanggal 18 Oktober 2023 15. Menjadi Narasumber dan Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis SPIP Tim Pokja Penjaminan Kualitas Kementerian Perhubungan 16. Menjadi Narasumber Kegiatan Pembekalan Pengelola Anggaran di Lingkungan BPSDM Perhubungan, Bimtek MR di Lingkungan BPSDM Perhubungan, Sosialisasi dan Pendampingan MR pada PPI Curug 17. Menjadi Narasumber Ship Owner Representative Konsinyering Kick Off Meeting Pelaksanaan Pengawasan Perawatan Kapal Peritus Penugasan, Kapal Ternak dan Kapal Container milik Negara tahun 2024 tanggal 02 s.d 03 April 2024 	https://drive.google.com/drive/folders/112aPKBeR719ge_qGP0/zd1IAUvFViUK?usp=drive_link
3	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Keterangan: Aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asuransi dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.	1	Simpulan Pemenuhan	Y	<p>1. Kebijakan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan telah mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang akan diberikan.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1TQ3jbPLyuYIIS-cMv50_H1xHVE8EZJuSp=drive_link
		2	APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.	Y	<p>APIP telah berbagi informasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MoU dengan PPATK 2. MoU dengan OMBUDSMAN HK.201.1-12-ITJEN-2023 3. MoU dengan LPSK PJ.1546 Tahun 2023 4. PKS dengan KPK tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor HK.201.2/7/ITJEN-2020 5. APIP sebagai Focal Point dan Admin Jaga Stranas PK 2023/2024 6. Telah dilaksanakan koordinasi terkait pemantauan atas efektifitas pembinaan Kapabilitas APIP TW I tahun 2024 dengan BPKP sesuai surat tugas nomor PE.12.02-S-53-D103-1-2024 tgl 27 Februari 2024 7. Telah dilaksanakan koordinasi terkait Asistensi penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada program illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) sesuai surat tugas nomor OT.04-S-437-D5-04-2024 tgl 29 April 2024 8. Telah dilaksanakan koordinasi terkait Asistensi Penerapan MR pembangunan nasional lintas sektor major project pembangunan kota baru sesuai surat tugas nomor PE.09.02-ST -80-D304-1-2024 tgl 30 April 2024 9. Menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis penilaian intern sesuai surat inspektor jenderal kementerian kemensos indonesia nomor 277/2/PB.00.03/2024 tanggal 20 maret 2024 10. Nota Dinas nomor 307/IT.II/X/2023 perihal Laporan Entry Meeting Pengawasan PSO Bidang Perkeretaapian tanggal 25 Oktober 2023 11. Telah menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit dan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2024 sesuai Surat Tugas Nomor: ST-ITJEN I/4-006 Tahun 2024 13. Nomor: UM.209/5/ITJEN/2023 tanggal 05/09/2023 perihal Undangan kepada BPKP Coaching Clinic Penyusunan Peta Risiko pada Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 14. ST-ITJEN I/3-019 Tahun 2024 tgl 8 Maret 2024- Kegiatan Brainstroming Peran dan Pengaruan UKI dan Reviu PAPBJ pada Kementerian dan Lembaga Triwulan I Tahun Anggaran 2024 	https://drive.google.com/drive/folders/1qqD9mA-W4BXoi7N2L_smyKSOY4SAIk?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Keterangan: Pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.	Simpulan Pemenuhan	1 Dalam mengelola komunikasi intern APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan pelaporan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan.	Y	<p>Identifikasi peran dan tanggungjawab APIP telah dikelola dalam komunikasi intern yang diwujudkan dalam bentuk Standar Operasional seluruh kegiatan di Inspektorat Jenderal yang mengatur hubungan pelaporan antar individu s.d pimpinan APIP. SOP Pengawasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Audit Berbasis Sistem Informasi - Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) - Pelaksanaan Audit Investigasi - Pelaksanaan Audit Kinerja - Pelaksanaan Audit Kinerja Melalui Remote Audit - Pelaksanaan Audit Public Service Obligation Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (PSO BA BUN) - Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Unit Kerja Eselon I Kementerian Perhubungan - Pelaksanaan Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Pelaksanaan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Inspektorat Jenderal - Pelaksanaan Evaluasi terhadap Peraturan - Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan CPNS - Pelaksanaan Penitias Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan - Pelaksanaan Penitias Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) - Pelaksanaan Reviu Harga Perkirian Sendiri - Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan - Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan BA BUN - Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan - Pelaksanaan Reviu Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri Perhubungan - Pelaksanaan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan - Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara - Pelaksanaan Reviu RKA - Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Reviu RKBMN) <p>b. Implementasi pengelolaan komunikasi intern APIP yang mengidentifikasi peran dan tanggungjawab hubungan pelaporan pada kegiatan pengawasan diantaranya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> b.1. Penugasan Audit Kinerja dalam Surat Tugas mengkomunikasikan hal-hal seperti peran dan tanggungjawab Tim, pembebaran anggaran, dan pelaporan kegiatan. Contoh Surat Tugas Nomor ST-TJEN I/1-154 Tahun 2023 Tanggal 17 Oktober 2023; b.2. Program Kerja Audit (PKA) pada penugasan audit Kinerja ke Kantor Otoritas Bandara Wilayah I Kelas Utama Soekarno Hatta terlampir ; b.3. Laporan Hasil Audit ditembusukan kepada Pimpinan Instansi dan Pimpinan APIP, Surat Nomor PS.005/2/21/ITJEN/2023 tanggal 17 November 2023 <p>c. APIP telah mengembangkan pengelolaan komunikasi intern yang lebih efektif dan dinamis melalui aplikasi Sistem Informasi Audit (SIAU) yang menampilkan secara real time kegiatan pengawasan seperti Audit, dan Reviu sebagaimana dokumentasi komunikasi intern pada aplikasi SIAU terlampir.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1e0vsMCNWKRd7UrUrnaoQ_wbFdT8xlp?usp=sharing
		2	APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui:			https://drive.google.com/drive/folders/1e8boqJUkjP98Wei0x6Jd-ZayqTEoOg?usp=drive_link
		(1)	Pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP.	Y	<p>Telah dilaksanakan pembekalan kepada tim audit oleh pimpinan APIP pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Entry Meeting dan Pembekalan Kepada Tim Audit dan UPT tanggal 15 Mei 2024 2. Rapat Entry Meeting dan Pembekalan Kepada Tim Audit Inspektorat III Bulan Mei Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 3. Nota Dinas: 55/IT.IV/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 4. Laporan hasil survei pendahuluan ADTT atas komponen biaya pemeliharaan/perawatan kapal negara dalam pelayanan kapal perintis TA.2023 dan TA.2024 	https://drive.google.com/drive/folders/18919hiTl0pus1JBr8z8yDXuU1MnBxbh?usp=drive_link
		(2)	Forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit.	Y	<p>Telah dilaksanakan ekspos hasil pengawasan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Rapat Pembahasan Konsep LHA Dengan Inspektor II kegiatan Audit Bulan November 2023 2. Undangan dan dokumentasi Rapat Ekspos Hasil Evaluasi Saldo Awal BLU Tahun 2023 dan 2024 di Lingkungan BPSDMP tanggal 26 April 2024 3. Nota Dinas kepada Inspektor Jenderal Nomor: 171/IT.IV/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian Konsep Surat Inspektor Jenderal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kompliasi Laporan Hasil Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 28 Mei 2024. <p>Terlampir undangan tindak lanjut KSP BMN pada 5 lokasi Bandar Udara dan dokumentasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor: UM.2074/4/3/STJ/2024 perihal Undangan Kick Off Meeting Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024. Terlampir Risalah Rapat Hasil Kick Off Meeting Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024 5. Ekspos Laporan Hasil Pengawasan Audit Kinerja BPTD Kls II Jawa Tengah dan BPTD Kls II Jawa Timur Oleh Tim audit Kepada Inspektor I - Undangan kegiatan Raman 	https://drive.google.com/drive/folders/1GKVNsNChhOkicBpHRvZ7Ls1z8ARK5G?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3					
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	(3)	APIP telah mendiskusikan rencana organisasi K/L/D, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan APIP.	Y	<p>APIP telah mendiskusikan rencana organisasi K/L/D, informasi penting, dan isu-isu terkini dengan seluruh staf di lingkungan APIP, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nota Dinas: 321/I.T.II/2023 perihal Evaluasi Capaian Kinerja dan Pembahasan Langkah Pelaksanaan Pengawasan s.d Akhir Tahun TA.2023 tanggal 06 November 2024 Pelaksanaan Dialog Kinerja di Lingkungan Inspektorat III tanggal 29 Januari 2024 Nota Dinas kepada Inspektor IV nomor 393/AIT.IV/V/2023 tanggal 9 Oktober 2023 perihal penyampaian laporan kegiatan harian Inspektorat IV Rapat internal sebagaimana Surat Nomor PS.302-2-13-ITJEN-2024 Pihak Rapat Persiapan Penyusunan pedoman Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan Rapat Kegiatan NGOBRAS (Ngbrol Asik dan Santai) Pengawasan Intern 2024, sesuai ND Nomor 32/SETITJEN/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 Nota Dinas Nomor 28_IT.I-INT_VIII_2023 Penyampaian Risalah Rapat Evaluasi Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi - Akibat Gempa Terminal Tipe A Simbuang Kab. Mamuju 	https://drive.google.com/drive/folders/14m5N_nCUIvbGs-g9ORkDLcoWZDK3e?usp=drive_link	
		3	Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpendapat dan menyampaikan saran terkait aktivitas pengawasan.	Y	<p>Pelaksanaan komunikasi internal melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat Entry Meeting dan Pembekalan Kepada Tim Audit dan UPT tanggal 15 Mei 2024 Rapat Entry Meeting dan Pembekalan Kepada Tim Audit Inspektorat III Bulan Mei Tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 Nota Dinas: 55/IT.IV/II/2024 tanggal 2 Februari 2024 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelatihan di Kantor Jenderal (PKS) tentang Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Dokumentasi Rapat Pembahasan Konsep LHA Dengan Inspektor II kgiatan Audit Bulan November 2023 Undangan dan dokumentasi Rapat Ekspos Hasil Evaluasi Saldo Awal BLU Tahun 2023 dan 2024 di Lingkungan BPSDMP tanggal 26 April 2024 Nota Dinas kepada Inspektor Jenderal Nomor: 17/IT.IV/2024 tanggal 28 Mei 2024 perihal Penyampaian Konsep Surat Inspektor Jenderal kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Komplisasi Laporan Hasil Pemanfaatan Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tanggal 28 Mei 2024. Terlampir undangan tindak lanjut KSP BMN pada 5 lokasi Bandar Udara dan dokumentasi; Surat Undangan Sekretariat Jenderal Nomor: UM.2074/3/STJ/2024 perihal Undangan Kick Off Meeting Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024. Terlampir Risalah Rapat Hasil Kick Off Meeting Pelaksanaan Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2024 IT. I Ekspos LHA BPTD Jateng dan Jatim dokumentasi terlampir 10. Pelatihan dikantor sendiri kepada Auditor Inspektorat III tentang Operasional Kapal Patroli 	https://drive.google.com/drive/folders/1C1XknxQwf93FLzfuZK8_zFIAApGy-W?usp=drive_link	
		4	Pengelolaan proses bisnis pengawasan intern APIP dan hubungan komunikasi internal APIP meningkatkan efektivitas dan efisiensi aktivitas pengawasan.	Y	<p>Pelaksanaan survei kepuasan pegawai terhadap pola hubungan komunikasi internal APIP sebagaimana Nota Dinas Nomor: 02/SETITJEN/VII/2023 dan 18-PHPH-VIII-2023 Laporan Survei Pola Hubungan Komunikasi Internal APIP</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1shQXFprB0nkz11hxxlZ0V-pAxHonC7?usp=drive_link	
2	Hubungan APIP dengan Manajemen	Simpulan Pemenuhan		Y	<p>- APIP telah berpartisipasi dalam satgas di lingkup Kemenhub, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satgas Monitoring Nataru (IM 7 Tahun 2023) laporan terlampir; Satgas Monitoring Angleb (IM 4 Tahun 2024) laporan terlampir Satuan Tugas P4GN SATUAN TUGAS PENINGKATAN KAPABILITAS APIP Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Perubahan Keperintah tg Pembentukan Tim Pengelola SAI Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Kemenhub KEP-9-AAPIP/DPN/2023 Tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAUPI Periode Tahun 2021-2024 ND 08/SETITJEN/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 Hal Penyampaian Notulenensi Kegiatan Pengenalan Aplikasi ELMS dan Sosialisasi PerKA BPKP Nomor 5 Tahun 2023 dengan Anggota AAUPI. <p>Selain itu, APIP juga berpartisipasi dalam forum di lingkup Kemenhub, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Narasumber dan pendamping dalam pembahasan rencana tindak lanjut penyelesaian piutang rumah dinas SEKJEN sesuai undangan Kepala Biro Umum No UM.207/8/24/STJ/2024 27 Februari 2024 Narasumber dan pendamping dalam kegiatan monitoring dan evaluasi TL temuan hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Temuan Hasil Audit ITJEN pada BPTD kelas II Prov Riau dan BPTD Kelas II Provinsi Kalimantan Barat Sesuai Surat Sediljen Darat no. UM.202/10/4/DJPD/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Narasumber dan pendamping dalam update rekапitulasi temuan hasil Ausit ITJEN posisi sampai dengan 31 Januari 2024 sesuai surat undangan Sediljen Laut no: PS.304/1/2/DJPL/2024 29 Januari 2024 Narasumber dan pendamping dalam persiapan pemukhiran tindak lanjut semester I Tahun 2023 terkait penyelesaian LHP kinerja BPK RI pada Direktorat Sarana Transportasi Jalan sesuai surat Undangan Sediljen Darat No: UM.207/96/4/DJPD/2023 12 Desember 2023 Narasumber dan pendamping dalam kegiatan pemukhiran TL penyelesaian temuan LHP BPK-RI dan LHA ITJEN pada Temuan yang masih berstatus belum Tindak Lanjut sesuai undangan Sediljen Darat no: UM.202/11/12/DJPD/2023 29 November 2023 ND 41/IT.II/2024 tanggal 30 Januari 2024 Hal Laporan Bimbingan Teknis APIP Tim Pokja Penjaminan Kualitas Kementerian Perhubungan Menjadi Narasumber dan Mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis SPIP Tim Pokja Penjaminan Kualitas Kementerian Perhubungan Menjadi Narasumber Ship Owner Representative Konsinyering Kick Off Meeting Pelaksanaan Pengawasan Perawatan Kapal Perintis Penugasan, Kapal Termak dan Kapal Container milik Negara tahun 2024 tanggal 02 s.d 03 April 2024 	https://drive.google.com/drive/folders/1GIDKKFw-t7ZXOh5kJ9m4BA2h2JbGP?usp=drive_link	
		2	APIP berpartisipasi dalam forum organisasi strategis seperti Satgas Covid-19.	Y	<p>APIP telah berpartisipasi dalam satgas di lingkup Kemenhub, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Kemenhub Focal point dan Admin jaga Stranas PK 2024 Satgas Monitoring Nataru (IM 7 Tahun 2023) laporan terlampir; Satgas Monitoring Angleb (IM 4 Tahun 2024) laporan terlampir Satuan Tugas P4GN Perubahan Keperintah tg Pembentukan Tim Pengelola SAI Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Kemenhub 	https://drive.google.com/drive/folders/11_ifaqgFDuCxwL3ggYQO1SSzmqASTe?usp=drive_link	

No	ELEMENT /TOPIK	ASPEK PENILAIAN					
		LEVEL 3					
	BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ELEMEN	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.					9. KEP-9/AAPI/DPN/2023 Tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Nasional AAPIP Periode Tahun 2021-2024 10. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan Tahun 2024	
3	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Keterangan: Aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asuransi dan konsultasi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	1	APIP telah mengidentifikasi area pengawasan (perencanaan, informasi, dan hasil) yang akan dibagikan kepada pihak lain.	Y	APIP telah mengidentifikasi rencana area pengawasan Tahun 2024 sbb: 1 Surat kepada Menteri Perhubungan Nomor PS.302/2/6/IT/JEN/2024 tanggal 15 Februari 2024 Hal Rancangan PKPT Inspektorat Jenderal Tahun 2024; 2 Keputusan Inspektur Jenderal Nomor KP.ITJEN 26 Tahun 2024 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Kemenhub TA 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1V6ahIdf6nIgaoITYDoxXErAGCKMAnSIS?usp=drive_link
			2	APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.	Y	Dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan, telah dilaksanakan: 1. Stranas PK 2. Ijen berpartisipasi pada kegiatan Survey Penilaian Integritas dengan KPK 3. Pendampingan Ijen pada kegiatan koordinasi dan Supervisi pencegahan korupsi sektor perhubungan bersama KPK 4. Nota Dinas Kepada Inspektor Jenderal Nomor: 100/IT.III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Perubahan Usulan Audit Kinerja pada Bulan Maret 2024 5. Nota Dinas Kepada Inspektor Jenderal Nomor: 25/IT.III/XI/2023 tanggal 13 November 2023 perihal Usulan Revisi Audit Kinerja Bulan November 2023 Inspektorat III 6. Nota Dinas kepada Inspektor Jenderal Nomor: 150/IT.IV/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Revisi Audit dalam Kegiatan Audit Kinerja Bulan Mei Tahun 2024 Inspektorat IV (Terlampir Surat Tugas dari BPKP) 7. Surat Tugas Inspektor Jenderal Nomor: ST-ITJEN 1/ 8-089 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Penguatan Fungsi Pengawasan Intern Bidang Keinvestigasian Inspektorat Investigasi Inspektor Jenderal Kementerian Perhubungan di Provinsi DKI Jakarta 8. Terlampir laporan hasil kegiatan Nota Dinas Inspektor Investigasi kepada Inspektor Jenderal Nomor: 121/IT.INV/IV/2024 tanggal 01 April 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Penguatan Fungsi Pengawasan Intern Bidang Keinvestigasian 9. Menjadi narasumber kegiatan bimbingan teknis penilaian intern sesuai surat inspektor jenderal kementerian kemensos indonesia nomor 277 /2/PB.00.03/2024 tanggal 20 Maret 2024, sesuai dengan Nota Dinas Nomor 154.KSDMO.IV.2024. Laporan sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Internal Penjaminan Kualitas Mutu dan Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Sosial Kemensos 10. APIP telah berkoordinasi dengan BPK RI terkait pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Surat Undangan Nomor UM.209/1/5/IT/JEN/2024 tanggal 11 Januari 2024 Hal Undangan Entry Meeting Pemeriksaan BPKRI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan tahun 2023 berdasarkan Surat BPK RI nomor 2/S/XIV/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan agar tidak terjadi duplikasi pemeriksaan 11. Laporan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI pada Satker Kementerian Perhubungan di Provinsi Jawa Timur; 12. Koordinasi APIP dengan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang berkaitan dengan Pemda ND Nomor 127/PHPHI/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023 13. Koordinasi dengan BPKP terkait Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP di Lingkungan Kementerian Perhubungan ND Nomor 142/PHPHI/IV/2024 tanggal 5 April 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1N3vzQIVQ25K99KxiRJYVL81W0t1948e5?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Keterangan: Pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.	Simpulan Pemenuhan	1 Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP telah dievaluasi dan dilaksanakan secara berkelanjutan dalam mewujudkan budaya komunikasi yang konstruktif terhadap aktivitas pengawasan intern.	T	<p>Pola koordinasi dan sistem komunikasi internal di Inspektorat Jenderal telah dievaluasi secara berkelanjutan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi terhadap perubahan PM 41 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, yang telah diubah dengan PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern Komunikasi internal telah dilakukan upgrade melalui aplikasi Siau Modul Keuangan dan Siau Modul Audit, sebagaimana dokumentasi terlampir. Telah dilakukan evaluasi internal terhadap pola koordinasi dan sistem komunikasi sebagaimana laporan evaluasi terlampir. Survey Pola Hubungan Komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan sejak Tahun 2022 s.d 2023, untuk tahun 2024 akan dilaksanakan di semester II. 	https://drive.google.com/drive/folders/1LHuUm1PswDSbLUZdy3AfAXph0lQu?usp=drive_link

No	ELEMENT /TOPIK	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
	ELEMEN	NO	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP					
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.	1	Simpulan Pemerluhan	T	Partisipasi APIP dalam Satgas di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilakukan evaluasi, antara lain evaluasi terkait keterlibatan Inspektorat Jenderal pada Satgas Monitoring Angkutan Lebaran, yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Budaya dan Hubungan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	https://drive.google.com/drive/folders/1lIHGlc5LU84VgE7spyQtaOhTPbyrX4?usp=drive_link
		2	APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada seluruh Satker/OPD.	T	APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada Satker di Kementerian Perhubungan, antara lain: a. Kegiatan coaching clinic aplikasi SiMARKO digitalisasi implementasi Manajem Risiko bagi UPR dan UMR unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan terdapat pada Nota Dinas Nomor 8/ BAGREN/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Laporan Kegiatan Coaching Clinic b. Pendampingan implementasi MR kepada unit kerja c. FGD program kegiatan pengawasan Inspektorat IV dengan seluruh satker/UPT di lingkungan Ditjen Hubud sesuai surat Inspektorat Jenderal Nomor UM.207/2/11/ITJEN/2024 tanggal 29 Januari 2024 d. Coffe Morning Inspektorat IV dengan seluruh unit kerja di lingkungan pusat Ditjen Hubud sesuai surat Inspektorat Jenderal Nomor UM.207/5/24/ITJEN/2024 tanggal 4 Juni 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1ALNvPBi7VzFn7psy41xwFf7vzMUHu?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.					
3	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Keterangan: Aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asuransi dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	1 APIP secara berkelanjutan mengidentifikasi area pengawasan dan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain terkait area pengawasan tersebut serta mengevaluasinya terus menerus.	T		https://drive.google.com/drive/folders/1NNG_n_b5-nRWRpbevC2NnJMP4wsQ9?usp=drive_link

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI				SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		NO	URAIAN	Y/T				
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP Keterangan: Pembinaan hubungan komunikasi intern yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP.	Simpulan Pemenuhan	1	T	<p>Hasil penilaian mandiri mencapai level 3.</p> <p>1. Koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP yang menjadi best practice dalam budaya dan hubungan organisasi.</p>	<p>1. Untuk meningkatkan hubungan komunikasi yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP, pelaksanaan komunikasi perlu didokumentasikan dengan lebih baik, baik komunikasi antar internal organisasi (seperti kegiatan apel pagi, dialog kinerja, pembekalan tim audit, dll) serta komunikasi eksternal organisasi (seperti keikutsertaan dalam forum Kementerian/Profesi, pemberian saran/atenzi terkait permasalahan strategis, koordinasi dengan KPK/BPK/BPKP/APIP lainnya);</p> <p>2. Dalam rangka pemenuhan level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif terkait pengelolaan komunikasi intern.</p>		

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI				SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		No	URAIAN	Y/T				
1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP							
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.	Simpulan Pemenuhan	1 APIP berperan strategis dalam forum komunikasi K/L/D. Hasil penilaian mandiri mencapai level 3.	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. APIP telah berpartisipasi dalam forum bersama K/L.	Dalam rangka pemenuhan level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif terkait keterlibatan APIP dalam forum K/L.		
		2 APIP dengan pengetahuan dan pengalamannya dipandang sebagai partner yang kredibel dan terpercaya.		T				

No	ELEMEN /TOPIK ELEMEN BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI				SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		NO	URAIAN	Y/T				
2	Hubungan APIP dengan Manajemen Keterangan: Partisipasi APIP secara aktif dalam forum komunikasi bersama manajemen K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP.							
3	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan Keterangan: Aktivitas berbagi informasi, koordinasi, serta kegiatan asurans dan konsultansi dengan pihak lainnya untuk memastikan cakupan pengawasan yang memadai dan meminimalkan duplikasi pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	1	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. APIP telah melakukan kegiatan koordinasi dan berbagi informasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan seperti KPK, BPK dan BPKP.	Dalam rangka pemenuhan level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif terkait koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.		



ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA

Hasil penilaian mandiri Elemen Struktur Tata Kelola mendapatkan skor 0,4400 pada level 4, mengalami kenaikan dari hasil evaluasi tahun 2023 yang mendapatkan skor 0,4000 pada level 3. Peningkatan skor terdapat pada Topik Mekanisme Pendanaan dan Topik Hubungan Pelaporan.

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
	ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Mekanisme pendanaan Keterangan: Proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Terdapat kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern.	Y	Kebijakan pengajuan anggaran/revisi anggaran tertuang dalam: 1. PMK 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Pasal 14 halaman 31 Bagian Mekanisme Revisi Anggaran Pada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 2. KM 219 Tahun 2020 tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bagian BAB III Revisi Anggaran 3. DIPA 2022, 2023, 2024 beserta revisinya 4. POK 2022,2023, 2024 beserta revisinya 5. Dokumen Revisi anggaran berupa nodin usulan revisi anggaran masing-masing Bagian dan Inspektorat	https://drive.google.com/drive/folders/1l0FaoDP74zcVmL-gzajt82tE8yWRpfY?usp=drive_link
2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Keterangan: Kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Terdapat kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM K/L/D tertuang dalam :	Y	- Piagam Audit - Pasal 39 huruf (a) PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern - SOP Audit	https://drive.google.com/drive/folders/1v8kUNzLBtOIdm0Pt0MeVNqWw89PZ9fY?usp=drive_link

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
	ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Hubungan pelaporan Keterangan: Hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D.	Simpulan Pemenuhan	Y	1	<p>Terdapat kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen K/L/D.</p> <p>Kami memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan 2. PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern 3. KP Ijen No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan 4. Internal Audit Charter 5. PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 29 ayat (2) 	https://drive.google.com/drive/folders/13mYe6KMzN5JhUU0MzRFLk6ysTwvWlzjl?usp=drive_link

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN			
		LEVEL 2			
ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Mekanisme pendanaan Keterangan: Proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	Y		
		1 Terdapat kebijakan pengajuan anggaran/ revisi anggaran dan persetujuannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Y	Kebijakan pengajuan anggaran/revisi anggaran tertuang dalam: 1. PMK 199 Tahun 2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Pasal 14 halaman 31 Bagian Mekanisme Revisi Anggaran Pada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 2. KM 219 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Bagian BAB II Pelaksanaan Anggaran	https://drive.google.com/drive/folders/1LPcBQnjGCF7sdkcERJGYuOrzlfIfaKVn?usp=drive_link
2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Keterangan: Kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	Y		
		1 Kebijakan telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM K/L/D serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan K/L/D.	Y	Kebijakan dalam Piagam Audit, Pasal 39 huruf (a) PM 41 Tahun 2019 dan SOP Audit telah memuat kewenangan dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM K/L/D serta penanganan saat terjadi pembatasan akses atau intervensi oleh Pimpinan K/L/D	https://drive.google.com/drive/folders/1dRKfKfRKfNAa2QLqzux959HM1cZKKdLg?usp=drive_link
		2 APIP dapat mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM K/L/D dalam setiap penugasan.	Y	Kebijakan dapat mengakses informasi dalam Piagam Audit, telah diimplementasikan dalam setiap penugasan, seperti: 1. Surat Kepada PPTB Nomor IP.106/1/6/ITJEN/2024 Perihal Permintaan Narahubung dan Data Produk Layanan Publik Tahun 2024 2. Surat Kepada Unit Kerja di Lingkungan Kemenhub Nomor KP.904/1/22/ITJEN/2024 perihal Pengigat Permintaan Dokumen Data Dukung Triwulan I 2024 (B-15) Stranas PK 3. Surat Entry Meeting Audit Tematik dan Permintaan Dokumen pada BTP Kelas II Padang dan BTP Kelas I Medan tanggal 25 Oktober 2023 Nomor PS.306/3/19/ITJEN/2023 tanggal 25 Oktober 2023 Hal Entry Meeting Audit Tematik dan Permintaan Dokumen 4. Surat Entry Meeting Audit dan Permintaan Dokumen pada PPSSDMPD, PPSSDMPU, dan PPSSDMLP tanggal 15 Maret 2024; 5. Surat Nomor PS.004/2/2/ITJEN/2024 Tanggal 20 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Audit dan Permintaan Dokumen pada KSOP Jayapura, KSOP Merauke, KSOP Waingapu, KSOP Ternate, KSOP Babang, KSOP Sanana; 6. Surat Nomor: PS.002/1/19/ITJEN/2023 tanggal 28/11/2023 perihal Undangan Entry Meeting dan Pemberitahuan Audit Kinerja Bulan November Tahun 2023 7. Surat kepada Kepala Biro LPPBMN Nomor PS.103/1/2/ITJEN/2024 tanggal 2 April 2024 Perihal Permintaan Akses SPSS	https://drive.google.com/drive/folders/15TCF_T2E84e3buEoFzehly-LFmEdSr_2?usp=drive_link

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		LINK DATA DUKUNG
3	Hubungan pelaporan Keterangan: Hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D.	Simpulan Pemenuhan	Y	Mekanisme pelaporan kepada manajemen K/L/D tertuang dalam: - SOP Kegiatan Pengawasan - SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan - SOP Penyusunan Laporan Kinerja - SOP Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal		https://drive.google.com/drive/folders/1R3YGFKFd-iFYgYxE5NxWhQynugrfh-?usp=drive_link
		1 Kebijakan pelaporan dan komunikasi telah memuat mekanisme atau prosedur pelaporan kepada manajemen K/L/D.	Y			
		2 Pimpinan APIP melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen K/L/D.	Y	Hasil pengawasan kami dilaporkan kepada Menteri Perhubungan secara triwulan, melalui informasi hasil pengawasan Surat Nomor UM.006/2/22/ITJEN/2024 tanggal 13 Mei 2024 Hal Laporan Agenda Utama Pengawasan TW I Tahun 2024. Serta pelaporan IHAT dan LAPSEM 2023 kepada Menteri Perhubungan, Serta penyampaian hasil Pengawasan strategis sebagai berikut: - Surat kepada Menteri Perhubungan Nomor PS.302/1/11/ITJEN/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Konsep Bahan Sambutan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA. 2023 - Surat kepada Menteri Perhubungan Nomor PS.316/1/1/ITJEN/2024 tanggal 11 Januari 2024 perihal Undangan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan TA. 2023 - Surat kepada Menteri Perhubungan Nomor PS.316/1/13/ITJEN/2024 tanggal 3 Mei 2024 perihal Surat Pengantar Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI - Surat kepada Menteri Perhubungan nomor PS.302/1/7/ITJEN/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Tata Kelola Subsidi Angkutan Perkotaan dan Subsidi Angkutan Perintis - Surat kepada Menteri Perhubungan Nomor PS.306/1/23/ITJEN/2024 tanggal 14 Maret 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi - Surat Kepada Menteri Perhubungan nomor PS.304/6/1/ITJEN/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Laporan Hasil Klarifikasi atas Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis untuk Tahun Anggaran 2024 - Surat Kepada Menteri Perhubungan nomor PS.304/1/12/ITJEN/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Wilayah Tertentu di Perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan (Ship to Ship Transfer) pada KSOP Kelas I Samarinda - Laporan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan III Tahun 2023, Surat kepada Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I BPK RI Nomor PS.302/6/15/RHS/ITJEN/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Hal Penyampaian IHAT III 2023 - Laporan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan IV Tahun 2023, Surat kepada Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I BPK RI Nomor PS.302/2/3/RHS/ITJEN/2023 tanggal 2 Februari 2024 Hal Penyampaian IHAT IV 2023 - Ikhtisar Hasil Audit Semester II Tahun 2023 - Surat ke Menteri Perhubungan Nomor PS.302/2/11/ITJEN/2024 tanggal 15 Mei 2024 hal Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Angkutan Penyeberangan		https://drive.google.com/drive/folders/18-8-CwsUxorfJhtZ9vcUpBQvPBXKINZI?usp=drive_link

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN LEVEL 3					
		ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
1	Mekanisme pendanaan Keterangan: Proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	1	Alokasi anggaran pengawasan telah:	Y		https://drive.google.com/drive/folders/1_XiCk73mbe56gju1dhuyuPKgycchMNp2?usp=drive_link
			(1)	memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (<i>assurance and consulting services</i>).	Y	Alokasi anggaran yang tercantum dalam: - RKA - DIPA, POK 2022 serta revisinya - DIPA, POK 2023 serta revisinya - DIPA, POK 2024 serta revisinya - PKPT 2022, 2023, 2024 telah memperhatikan sumber daya	https://drive.google.com/drive/folders/1XwxE7ef8YyV7hklz3dKlfq1MI9rxv-4r?usp=drive_link
			(2)	ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku.	Y	1. Alokasi anggaran telah disusun melalui nota dinas penyusunan RKA, sebagaimana: a. Nota Dinas Nomor 38/SETIT/JEN/I/2024 perihal Penyampaian Pagu Kebutuhan Inspektorat Jenderal Tahun 2025 b. Nota Dinas Nomor 2/SETIT/JEN/V/2024 perihal Pagu Indikatif Inspektorat Jenderal Tahun 2025 2. Alokasi anggaran telah dilakukan reviu oleh APIP; 3. Alokasi anggaran disusun melalui aplikasi e-planning, SAKTI dan KRISNA.	https://drive.google.com/drive/folders/1sMZAcivUhD1pjCBjvSQkMScX6O2mKxgV?usp=drive_link
					Y		
2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Keterangan: Kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	1	APIP dalam melakukan penugasan pengawasan telah:	Y		https://drive.google.com/drive/folders/1ZJWwyVPulbsVOiOkXqYcob8YPSAR265?usp=drive_link
			(1)	dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D secara penuh tanpa pembatasan dan intervensi.	Y	Dalam pelaksanaan penugasan, APIP dapat mengakses informasi organisasi, aset dan SDM secara penuh dan informasi tersebut telah dilampirkan dalam KKA dan data umum LHA (lampiran KKA dapat diakses melalui link : bit.ly/peranlayanan2024 Sebelum pelaksanaan penugasan, kami mengirimkan surat permintaan akses, seperti: 1. Surat Kepada PPTB Nomor IP.106/1/6/ITJEN/2024 Perihal Permintaan Narahubung dan Data Produk Layanan Publik Tahun 2024 2. Surat Kepada Unit Kerja di Lingkungan Kemenhub Nomor KP.904/1/22/ITJEN/2024 perihal Pengigat Permintaan Dokumen Data Dukung Triwulan I 2024 (B-15) Stranas PK 3. Surat Entry Meeting Audit Tematik dan Permintaan Dokumen pada BTP Kelas II Padang dan BTP Kelas I Medan tanggal 25 Oktober 2023 4. Surat Entry Meeting Audit dan Permintaan Dokumen pada PPSDMPD, PPSDMPU, dan PPSDMPL tanggal 15 Maret 2024; 5. Surat Nomor PS.004/2/2/ITJEN/2024 Tanggal 20 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Audit dan Permintaan Dokumen pada KSOP Jayapura, KSOP Merauke, KSOP Waingapu, KSOP Ternate, KSOP Babang, KSOP Sanana; 6 Surat Kepada Kepala Biro LPBPBMN Nomor: PS.002/1/19/ITJEN/2023 tanggal 28/11/2023 perihal Undangan Entry Meeting dan Pemberitahuan Audit Kinerja Bulan November Tahun 2023 7. Surat kepada Kepala Biro LPBPBMN Nomor PS.103/1/2/ITJEN/2024 tanggal 2 April 2024 Perihal Permintaan Akses SPSS 9. Nota Dinas Nomor 06/ SETIT/JEN/XI/2022 tanggal 7 November 2022 Penyampaian Akses dan Modul Audit pada aplikasi Siau 10. Surat Nomor PS.303/3 /10/ITJEN_2023 Permintaan Data Dukung Subsidi Program Buy the Service.pdf 11. Surat kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Nomor PS-304-1-23-ITJEN-2024 Permintaan AKses aplikasi Inaportnet, dan dokumentasi akses terlampir. 12. Surat Nomor PS-004-2-2-ITJEN-2024 Tanggal 20 Mei 2024 perihal Permintaan Dokumen Audit IT III.	https://drive.google.com/drive/folders/1hcFiB8iv04AaFC9PsQzBw3Fpw_U_fkxw?usp=drive_link
			(2)	jika terdapat pembatasan akses, APIP menyampaikan kepada Pimpinan K/L/D dan mendiskusikan implikasinya.	Y	Tidak pernah terjadi pembatasan akses pada saat penugasan.	https://drive.google.com/drive/folders/1hcFiB8iv04AaFC9PsQzBw3Fpw_U_fkxw?usp=drive_link
			(3)	jika terdapat intervensi oleh Pimpinan K/L/D, APIP mendiskusikan implikasinya kepada Pimpinan K/L/D.	Y	Tidak pernah terjadi intervensi oleh pimpinan APIP pada saat penugasan.	https://drive.google.com/drive/folders/1hcFiB8iv04AaFC9PsQzBw3Fpw_U_fkxw?usp=drive_link

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN			
		LEVEL 3			
ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Hubungan pelaporan Keterangan: Hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D.	Simpulan Pemenuhan	Y	<p>1. Pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar kepada manajemen K/L/D.</p> <p>Laporan kegiatan APIP telah disampaikan kepada manajemen melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Juli 2023 Nomor : PS.302/5/20/RHS/ITJEN/2023 tgl 22 Agustus 2023 2. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Agustus 2023 Nomor : PS.302/5/25/RHS/ITJEN/2023 tgl 8 September 2023 3. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan September 2023 Nomor : PS.302/6/15/RHS/ITJEN/2023 tgl 9 Oktober 2023 4. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Oktober 2023 Nomor : PS.302/7/19/RHS/ITJEN/2023 tgl 8 November 2023 5. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan November 2023 Nomor : PS.302/8/5/RHS/ITJEN/2023 tgl 7 Desember 2023 6. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Desember 2023 Nomor : PS.302/1/3/RHS/ITJEN/2024 tgl 5 Januari 2024 7. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Januari 2024 Nomor : PS.302/1/25/RHS/ITJEN/2024 tgl 5 Februari 2024 8. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Februari 2024 Nomor : PS.302/2/23/RHS/ITJEN/2024 tgl 18 Maret 2024 9. Surat Dinas Penyampaian Posisi TL Hasil Audit Itjen Bulan Maret 2024 Nomor : PS.302/3/13/RHS/ITJEN/2024 tgl 5 April 2024 10. Laporan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan III Tahun 2023, Surat kepada Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I BPK RI Nomor PS.302/6/15/RHS/ITJEN/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Hal Penyampaian IHAT III 2023 11. Laporan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan IV Tahun 2023, Surat kepada Pimpinan Auditorat Keuangan Negara I BPK RI Nomor PS.302/2/3/RHS/ITJEN/2023 tanggal 2 Februari 2024 Hal Penyampaian IHAT IV 2023 12. Ikhtisar Hasil Audit Semester II Tahun 2023 13. Surat kepada Menteri Perhubungan nomor PS.302/1/7/ITJEN/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Tata Kelola Subsidi Angkutan Perkotaan dan Subsidi Angkutan Perintis 14. Surat kepada Menteri Perhubungan Nomor PS.306/1/23/ITJEN/2024 tanggal 14 Maret 2024 Hal Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Pembangunan Jalur Ganda KA Bogor-Sukabumi 15. Surat Kepada Menteri Perhubungan nomor PS.304/6/1/ITJEN/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Laporan Hasil Klarifikasi atas Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis untuk Tahun Anggaran 2024 	https://drive.google.com/drive/folders/16ve-6w7vgiknFu7lRYUbWUYXfqxyOOL?usp=drive_link
				<p>16. Surat Kepada Menteri Perhubungan nomor PS.304/1/12/ITJEN/2024 tanggal 31 Januari 2024 perihal Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Wilayah Tertentu di Perairan yang berfungsi sebagai Pelabuhan (Ship to Ship Transfer) pada KSOP Kelas I Samarinda</p> <p>17. Surat Ke Menteri Perhubungan nomor: PS.103/1/2/ITJEN/2024 tgl 6 Maret 2024 Perihal: Laporan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) Atas Pekerjaan Kontraktual TA. 2023 yang Tidak Selesai dan Dilanjutkan TA. 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat</p> <p>18. Surat ke Menteri Perhubungan Nomor PS.302/2/11/ITJEN/2024 tanggal 15 Mei 2024 hal Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Angkutan Penyeberangan</p> <p>19. Surat Kepada Menteri Perhubungan nomor PS.302/5/10/ITJEN/2023 tanggal 2 Agustus 2023 perihal Laporan Monitoring Progres Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB)</p> <p>20. Surat Kepada Menteri Perhubungan nomor PS.306/3/1/ITJEN/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Laporan Aksesibilitas dan Konektivitas Feeder dan Kawasan TOD LRT Jabodebek</p>	

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		LINK DATA DUKUNG
1	Mekanisme pendanaan Keterangan: Proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	Y			https://drive.google.com/drive/folders/diTBoF6K_oX7onOA_LsoelkJc3jjZ_4R?usp=drive_link
		1 Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi secara berkelanjutan:				https://drive.google.com/drive/folders/1Rh_5OjF9MYu6p9DO_Si0rUpA0knq55E2?usp=drive_link
		(1) dengan memperhatikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan intern (<i>assurance and consulting services</i>). (2) ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sesuai peraturan yang berlaku	Y Y	Alokasi anggaran pengawasan telah dievaluasi melalui: 1. Evaluasi anggaran tercantum dalam LAKIP dan telah dilaksanakan secara berturut-turut selama 3 tahun (LAKIP 2020, 2021, 2022, 2023) 2. Telah dilaksanakan evaluasi atas RKA Tahun 2020-2024 3. Telah dilaksanakan evaluasi atas alokasi anggaran tahun berjalan melalui usulan revisi DIPA/POK		https://drive.google.com/drive/folders/1T2wGX707Gaku-hoky9hu_0e05FOaRs70?usp=drive_link
2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Keterangan: Kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	T	Kebijakan dapat mengakses informasi dalam Piagam Audit, telah diimplementasikan dalam setiap penugasan dan telah dilaksanakan evaluasi pada kebijakan yang mengatur tentang akses ke seluruh infomasi organisasi, aset dan SDM K/L/D Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap sebagaimana masukan hasil pembahasan perubahanan sbb: 1.a.Telah dilakukan evaluasi terhadap PM 41 Tahun 2019 tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Intern, dan dirubah menjadi PM 13 Tahun 2022 namun pada perubahan di tahun 2022 tidak merubah pasal 39 (a) tentang akses informasi karena dianggap masih relevan. 1. b. Saat ini kebijakan tentang tata cara pelaksanaan intern sedang dalam tahap pembahasan untuk dilakukan revisi ke 2 sesuai dengan hasil evaluasi Nota Dinas Nomor 164/PHPHH/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 Hal Laporan Rapat Pembahasan KM tentang Komite Audit dan Revisi PM tentang Tata Cara Pengawasan Intern.. 2.a. Berdasarkan hasil evaluasi Piagam Pengawasan PM Nomor 42 Tahun 2018 sesuai Nota Dinas Nomor 135A/PHPHH/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan evaluasi dan perubahan pertama terhadap Piagam Pengawasan menjadi PM 57 Tahun 2023. 2.b. Berdasarkan hasil evaluasi Piagam Pengawasan PM Nomor 42 Tahun 2018 sesuai Nota Dinas Nomor 119/PHPHH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Hal Laporan Evaluasi Kegiatan Penyusunan Piagam Pengawasan Intern/Internal Audit Charter Kemenhub pada poin 1. menyatakan telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan piagam Pengawan Intern/Internal Audit Charter, dan saat ini sedang dalam proses revisi.		https://drive.google.com/drive/folders/1bgf2U1t6Tbmaamreluis2n6H4p1r4MDK?usp=sharing

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
	ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Hubungan pelaporan Keterangan: Hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1 Kebijakan pelaporan kegiatan APIP telah dievaluasi secara berkala	Y	APIP telah melakukan evaluasi pada kebijakan/pedoman pelaporan kegiatan pengawasan secara berkala melalui kegiatan seperti konsinyering pembahasan perubahan peraturan pengawasan dan evaluasi ikhtisar hasil pengawasan triwulan dan semesteran (IHAT dan LAPSEM) sebagai berikut : 1. Nota Dinas Kepala Bagian PHPHH Nomor 25.a/PHPHH/IV/2023 tanggal 14 April 2023 Hal Laporan Evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2022 pada lampiran Huruf D. Evaluasi Atas Kebijakan Pelaporan Hasil Pengawasan. 2. Nota Dinas Kepala Bagian PHPHH Nomor 194/PHPHH/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Hal Laporan Evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2023 pada huruf D. Evaluasi Atas Kebijakan Pelaporan Hasil Pengawasan sebagaimana terlampir. 3. Nota Dinas Nomor 135A/PHPHH/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 Hal Laporan Kegiatan Pembahasan revisi Peraturan Pengawasan Intern/Internal Audit Charter dan Pembaruan Piagam Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan. 4. Nota Dinas Nomor 119/PHPHH/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 Hal Laporan Kegiatan Penyusunan Piagam Pengawasan Intern dan Penyusunan Konsep Peraturan Inspektur Jenderal Tentang pedoman ADTT, disampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Piagam Pengawasan Intern Tahun 2021 oleh Inspektorat Jenderal bersama perwakilan masing-masing Unit Eselon I, ditemukan masih terdapat kendala dalam pelaksanaan fungsi penagwasan, sehingga diperlukan perubahan pedoman dimaksud. 5. Nota Dinas Nomor 221/PHPHH/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Hal Laporan Evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1Yac7wXQVJFhjZOS_S15231t3v-GduFrd?usp=drive_link
		2 Kegiatan pelaporan oleh Pimpinan APIP sesuai standar telah dilakukan secara berkelanjutan.	Y	APIP telah melakukan evaluasi pada pelaporan kegiatan pengawasan secara berkala melalui kegiatan seperti reviu Laporan Kinerja Tahunan, Evaluasi SAKIP Tahunan serta evaluasi ikhtisar hasil pengawasan triwulan dan semesteran (IHAT dan LAPSEM) sebagai berikut : 1. Nota Dinas Kepala Bagian PHPHH Nomor 25.a/PHPHH/IV/2023 tanggal 14 April 2023 Hal Laporan Evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2022 pada lampiran Huruf E. Evaluasi Laporan Pengawasan. 2. Nota Dinas Kepala Bagian PHPHH Nomor 194/PHPHH/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 Hal Laporan Evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2023 pada huruf E. Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana terlampir. 3. Nota Dinas Nomor 221/PHPHH/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 Hal Laporan Evaluasi Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2024		https://drive.google.com/drive/folders/1Bfx5NExmF2WHkRMUYQHVPZvg86chdeF5?usp=drive_link

No	ELEMEN /KPA	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK	
		LEVEL 5					
	ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T			
1	Mekanisme pendanaan Keterangan: Proses pendanaan yang kuat dan transparan untuk memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	T 1 Pimpinan K/L/D menjamin ketersediaan anggaran pengawasan.	T Hasil penilaian mandiri mencapai level 4. Proses pendanaan telah dilakukan secara kuat dan transparan dengan memastikan ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan aktivitas pengawasan.			
2	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM Keterangan: Kewenangan APIP untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.	Simpulan Pemenuhan	T 1 APIP mendapat akses penuh terhadap informasi organisasi, aset, dan SDM K/L/D secara <i>real time</i> .	T Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. APIP telah mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, namun diperlukan: 1. pendokumentasian atas implementasi tersebut; 2. evaluasi secara berkala atas kebijakan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D, implementasi dan hasil.	APIP telah mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, namun diperlukan: 1. Pendokumentasian atas implementasi tersebut; 2. Evaluasi secara berkala atas kebijakan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D, implementasi dan hasil.		

No	ELEMENT /KPA	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK	
		LEVEL 5					
	ELEMEN STRUKTUR TATA KELOLA (20%)	No	Uraian	Y/T			
3	Hubungan pelaporan Keterangan: Hubungan pelaporan formal atas aktivitas pengawasan intern serta penguatan independensi melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara langsung kepada manajemen K/L/D.	Simpulan Pemenuhan	1 APIP mampu melaksanakan kegiatan pelaporan secara <i>real-time</i> .	T T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 4. Kebijakan pelaporan kegiatan APIP sudah dilakukan evaluasi secara berkelanjutan melalui evaluasi laporan hasil pengawasan.		



ELEMEN PERAN DAN LAYANAN

Hasil penilaian mandiri Elemen Peran dan Layanan mendapatkan skor 3,00 pada level 3, hasil yang sama dengan evaluasi tahun 2023.

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
KEGIATAN ASURANS						
1	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>) Keterangan: APIP melakukan audit ketaatan (<i>compliance</i>) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1 Terdapat <i>Internal Audit Charter</i> (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan.	Y	1. Kami telah memiliki Piagam Pengawasan Intern Tahun 2021; 2. Sedang dilakukan revisi Piagam Pengawasan terbaru		https://drive.google.com/drive/folders/1quSsUJqB8BZn94u-mv0Jyn4Q0XczalAF?usp=drive_link
		2 Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketaatan.	Y	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Ketaatan, tertuang dalam: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 2. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 3. Kepirjen Nomor SK.93/KP.801/ITJEN-2016 tentang Pedoman Umum Audit; 4. Kepirjen Nomor KP-ITJEN 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Kepirjen Nomor KP-ITJEN 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Barang/Jasa (Probity Audit) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Perirjen Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (Remote Auditing) Inspektorat Jenderal; 7. KP-ITJEN 70 TAHUN 2023 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 8. KP-ITJEN 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 9. PKPT Tahun 2024; 10. SOP ADTT.	https://drive.google.com/drive/folders/14DVgrx29DAmuaalVEGfeM_o_dGoiDT?usp=drive_link	
		3 APIP melaksanakan audit ketaatan.	Y	Kami telah melaksanakan audit ketaatan, sebagai contoh: 1. Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur; 2. Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; 3. ADTT PSO PT PELNI dan Perintis Tahun 2023 pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut & KSOP Kelas III Tarakan di Provinsi DKI Jakarta Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur; 4. ADTT PSO PT PELNI dan Perintis Tahun 2023 pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut - KSOP Kelas II Kendari - KSOP Kelas II Bau Bau di Provinsi DKI Jakarta Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan; 5. ADTT atas Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang Tahun Anggaran 2019 s.d. 2022 yang dihibahkan dan/atau ditransfer ke Unit Pelaksana Teknis (UPT); 6. ADTT atas Pekerjaan kontraktual TA. 2023 yang tidak selesai dan dilanjutkan pada TA. 2024;	https://bit.ly/peranayanan2024	

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>) Keterangan: APIP melaksanakan audit untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.	1	Simpulan Pemenuhan	Y	1. Kementerian Perhubungan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern/ Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan Tahun 2021; 2. Sedang dilakukan revisi Piagam Pengawasan terbaru.	https://drive.google.com/drive/folders/1gbzPJRU7EZrGOVJ6AEmgdTuf8T06Jo?usp=drive_link
		2	Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja.	Y	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja tertuang dalam: 1. PM.41 Tahun 2019 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 2. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permohonan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 3. Kepirilan Nomor SK.93/KP.801/ITJEN-2016 tentang Pedoman Umum Audit; 4. Peririlan Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (Remote Auditing) Inspektorat Jenderal; 5. KP-ITJEN 70 TAHUN 2023 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 6. PKPT Tahun 2024; 7. Peririlan KP 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 8. SOP Audit Kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1-Txgr2TYTv8AK3P0f323Gafz71RHq5?usp=drive_link
		3	APIP melaksanakan audit kinerja.	Y	Kami telah melaksanakan audit kinerja, seperti: 1. Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Kelas II Jawa Barat; 2. Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Kelas II Banten; 3. Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Provinsi DKI Jakarta; 4. Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Provinsi Jawa Tengah.	https://bit.ly/peranlayanan2024

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	<p>Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>).</p> <p>Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.</p>	<p>Simpulan Pemenuhan</p> <p>1 Terdapat Internal Audit Charter (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>2 Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pemberian asurans atas efektivitas GRC.</p> <p>3 APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.</p>	<p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p> <p>Y</p>	<p>1. Kementerian Perhubungan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern/ Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan Tahun 2021; 2. Sedang dilakukan revisi Piagam Pengawasan terbaru.</p> <p>Pedoman pemberian asurans atas efektivitas GRC tertuang pada: 1. PM.25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenhub; 2. PM 13 Tahun 2022 Perubahan atas PM.41 TAHUN 2019 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 3. KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kemenhub; 4. KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub; 5 SK.85/KP.804/ITJEN-2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub; 6. SOP Evaluasi: 035/SOP/ITJEN/11/2019 tentang Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).</p> <p>Telah dilaksanakan penjaminan kualitas SPIP terintegrasi sesuai dengan Laporan PS.302/4/6/ITJEN/2023 Tanggal 13 Juni 2023</p>	<p>https://drive.google.com/drive/folders/18fiybng94kLmKXVwfYzqL7cFvTigDYU?usp=drive_link</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/1wx7UXEVmQ1m2SLVnofY6GqM-9ipRSHs?usp=drive_link</p> <p>https://bit.ly/peranlayanan2024</p>	

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 1				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC). Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.					
KEGIATAN KONSULTASI						
4	Jasa Konsultansi (<i>Consulting Services</i>) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	Terdapat Internal Audit Charter (IAC) atau dokumen lain yang dipersamakan.	Y	1. Kementerian Perhubungan telah memiliki Piagam Pengawasan Intern/ Internal Audit Charter Kementerian Perhubungan Tahun 2021; 2. Sedang dilakukan revisi Piagam Pengawasan terbaru.	https://drive.google.com/drive/folders/1LJzJxtCzEjTpY8dz41pcGbA1-l-6?usp=drive_link
		2	Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/SOP jasa konsultansi.	Y	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/SOP jasa konsultansi pada Inspektorat Jenderal tertuang dalam : - PKPT 2023 dan 2024 (Fokus pada bagian pemberian jasa <i>advice</i>); - SOP nomor 040/SOP/ITJEN/11/2019 pemberian konsultasi kepada audit; - SOP nomor 057/SOP/ITJEN/12/2019 pemberian layanan konsultasi hukum; - Peraturan Irjen Kemenhub nomor PR-ITJEN 4 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan layanan konsultasi itjen kemhub.	https://drive.google.com/drive/folders/1pthSoXv94yr3H_Mq5LzF4h62f-xv3FZ?usp=drive_link
		3	APIP memberikan jasa konsultansi.	Y	Kami telah memberikan jasa konsultasi, seperti: - Bimtek Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit dan MR di Lingkungan Ditjen Laut; - Pendampingan MR di Wilayah Kepulauan Riau, Bali dan Makassar; - Permohonan Pendampingan dan Konsultasi Harga Perkiraaan Sendiri (HPS); - Permohonan opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Sharing Session Manajemen Risiko UPT/Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; - Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 di DKI Jakarta; - Pendampingan Perhitungan dan Perbaikan Pekerjaan Lanjutan di Bandar Udara Gatot Soebroto; - Narasumber Sosialisasi KM 69 2023 MR di Lingkungan Kemhub (Depok); - Coaching Clinic Manajemen Risiko Tahun 2023; - Asistensi pelaksanaan pembangunan dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM) tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; - Narasumber Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 sebagai Persiapan Penyelenggaran SPIP Tahun 2024; - Pendampingan Perhitungan dan Perbaikan Pekerjaan Lanjutan di Bandar Udara Gatot Soebroto - Narasumber Sosialisasi KM 69 2023 MR di Lingkungan Kemhub (Depok); - Coaching Clinic Manajemen Risiko Tahun 2023.	https://bit.ly/peranlayanan2024

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	
KEGIATAN ASURANS						
1	Audit Ketataan (<i>Compliance Auditing</i>) Keterangan: APIP melakukan audit ketataan (<i>compliance</i>) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1 IAC telah memuat mandat audit ketataan.	Y	Piagam Pengawasan Intern Tahun 2021 telah memuat mandat audit Ketaatan pada Bab VI		https://drive.google.com/drive/folders/1Ay0EHX_VbumE_0ESx6iuUmQLRuQGYoe?usp=drive_link
		2 Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit ketataan telah memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit.	Y	Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit ketataan telah memuat perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit, yang tertuang dalam: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 2. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 3. Kepirjen Nomor SK.93/KP.801/ITJEN-2016 tentang Pedoman Umum Audit; 4. Kepirjen Nomor KP-ITJEN 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Pemanfaatan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Kepirjen Nomor KP-ITJEN 29 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Barang/Jasa (Probitry Audit) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 6. Perirjen Nomor PR-ITJEN 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Intern Jarak Jauh (Remote Auditing) Inspektorat Jenderal; 7. KP-ITJEN 70 TAHUN 2023 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 8. KP-ITJEN 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu Di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; 9. PKPT Tahun 2024 10. SOP ADTT		https://drive.google.com/drive/folders/19n6CzjlLqD8iuEHcu4RMWIUntukKxm?usp=drive_link
		3 APIP melaksanakan audit ketataan dengan SDM yang memiliki kompetensi.	Y	Audit ketataan kami telah dilaksanakan dengan SDM yang memiliki kompetensi, sebagaimana tertera dalam Surat Tugas : - ST-ITJEN I/1-036 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Melaksanakan Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur; - ST-ITJEN I/1-037 Tahun 2024 tanggal 19 Maret 2024 hal Melaksanakan Audit atas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; - ST-ITJEN I/2- 069 Tahun 2023 Melaksanakan ADTT PSO PT PELNI dan Perintis Tahun 2023 pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut & KSOP Kelas III Tarakan; - ST-ITJEN I/2- 070 Tahun 2023 Melaksanakan ADTT PSO PT PELNI dan Perintis Tahun 2023 pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut - KSOP Kelas II Kendari - KSOP Kelas II Bau Bau; - Melaksanakan ADTT atas Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang TA. 2019 s.d. 2022 yang dihibahkan dan/atau di transfer ke UPT; - Kegiatan Audit Dengan Tujuan Tertentu atas Pekerjaan kontraktual TA. 2023 yang tidak selesai dan dilanjutkan pada TA. 2024. dan Rekapitulasi data Pelatihan Auditor		https://bit.ly/peranlayanan2024

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>) Keterangan: APIP melaksanakan audit untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.	1	Simpulan Pemenuhan IAC memuat mandat melakukan audit kinerja.	Y	Piagam Pengawasan Intern Tahun 2021 telah memuat mandat audit Kinerja pada BAB VI	https://drive.google.com/drive/folders/1XKU6GC9rhxEt1yIVDys-CKqdFQtij551n?usp=drive_link
		2	Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit kinerja yang memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit.	Y	Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit ketaatan telah memuat perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pengkomunikasian hasil audit, yang tertuang dalam: 1. Kepirjen KP-ITJEN 70 Tahun 2023 tentang Pedoman Kendali Mutu Pengawasan; 2. PM.41 TAHUN 2019 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern Bab VI tentang Manajemen Pengawasan Intern Pasal 43, hal 27; 3. PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenhub Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern; 4. Perirjen KP 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 5. SOP Audit Kinerja.	https://drive.google.com/drive/folders/1UCCr0TdlcvuujOij_C9sDbSR0gi_9lpz?usp=drive_link
		3	APIP melaksanakan audit kinerja dengan SDM yang memiliki kompetensi.	Y	Audit kinerja kami telah dilaksanakan dengan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya, sebagaimana tertera dalam Surat Tugas sebagai berikut: - ST-ITJEN I/1-162D Tahun 2023 Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Jawa Barat; - ST-ITJEN I/1-162C Tahun 2023 Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Banten; - ST-ITJEN I/1-142 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 hal Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Provinsi DKI Jakarta; - ST-ITJEN I/1-143 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 hal Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Provinsi Jawa Tengah ; dan Rekapitulasi data Pelatihan Auditor.	https://bit.ly/peranlayanan2024

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>). Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1 IAC memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC).	Y	Piagam Pengawasan Intern Tahun 2021 mandat pada Bab VI Pasal 2b telah memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC) melalui Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	https://drive.google.com/drive/folders/1YWYTmW3b8HD5CGIRGKohAA-x6DkhB?usp=drivelink	
		2 Pedoman/Petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC yang memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans.	Y	Pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans atas GRC mengacu pada : 1. Peraturan Kepala BPKP no 5 Tahun 2021; 2. SK.85/KP.804/ITJEN-2017 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kemenhub; 3. Surat Keputusan Inspektor Jendral No KP-ITJEN 32 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pokja Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kemenhub TA.2023.	https://drive.google.com/drive/folders/1YQYqnnOVtQVnog9TS-Q72o8tKGwXwbr?usp=drivelink	
		3 APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi.	Y	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi sebaagaimana Surat Tugas ITJEN ST-ITJEN I/8-026 Tahun 2023 tentang Penjaminan Kualitas. Selain itu, telah dilakukan bimbingan teknis kepada tim Penjaminan Kualitas SPIP sesuai Surat Tugas ITJEN ST-ITJEN I/8-026 Tahun 2023.	https://bit.ly/peranlayanan2024	

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 2				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	
3	<p>Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC).</p> <p>Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh.</p> <p>APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.</p>					
KEGIATAN KONSULTASI						
4	Jasa Konsultansi (<i>Consulting Services</i>) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		1	IAC memuat kewenangan APIP untuk melakukan layanan konsultansi dan jenis jasa konsultansi yang diharapkan oleh organisasi.	Y	Piagam Pengawasan Intern Tahun 2021 pada bab VI pasal 3e memuat kewenangan APIP untuk melakukan layanan konsultansi dan jenis jasa konsultansi yang diharapkan oleh organisasi	https://drive.google.com/drive/folders/1iWPkXUiiz-43Qai4WA2VQ4YelnPr?usp=drive_link
		2	Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan jasa konsultansi mencakup minimal metodologi, komunikasi dengan audit, pernyataan tanggung jawab, dan pengkomunikasian hasil jasa konsultansi.	Y	Pedoman pelaksanaan layanan konsultasi telah mencakup metodologi, komunikasi, pernyataan tanggung jawab dan penyampaian hasil konsultasi. Tertuang pada pedoman: 1. Peririsan Nomor PR-ITJEN 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Konsultasi Jenderal Kementerian Perhubungan 2. SOP No. 040/SOP/ITJEN/11/2019 tentang Pemberian Konsultasi Kepada Audit	https://drive.google.com/drive/folders/1R2upkTb5tSalCB1jfzfzHs_kb7LaGi?usp=drive_link
		3	APIP memberikan jasa konsultansi dengan SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan sesuai yang tercantum dalam surat tugas kegiatan:	Y	<ul style="list-style-type: none"> - Bimtek Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit dan MR di Lingkungan Ditjen Laut; - Pendampingan MR di Wilayah Kepulauan Riau, Bali dan Makassar; - Permohonan Pendampingan dan Konsultasi Harga Perkiraaan Sendiri (HPS); - Permohonan opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Sharing Session Manajemen Risiko UPT/Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; - Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 di DKI Jakarta; - Pendampingan Perhitungan dan Perbaikan Pekerjaan Lanjutan di Bandar Udara Gatot Soebroto; - Narasumber Sosialisasi KM 69 2023 MR di Lingkungan Kemehub (Depok); - Coaching Clinic Manajemen Risiko Tahun 2023; - Asistensi pelaksanaan pembangunan dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2024 di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; - Narasumber Sosialisasi Implementasi Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 sebagai Persiapan Penyelenggaran SPIP Tahun 2024; - Pendampingan Perhitungan dan Perbaikan Pekerjaan Lanjutan di Bandar Udara Gatot Soebroto - Narasumber Sosialisasi KM 69 2023 MR di Lingkungan Kemehub (Depok); - Coaching Clinic Manajemen Risiko Tahun 2023. <p>SDM yang memberikan jasa konsultasi telah mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1oeg2KoHxAj1SJYCWTQmL-FDu7K3E7Aw?usp=sharing

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
KEGIATAN ASURANS						
1	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>) Keterangan: APIP melakukan audit ketaatan (<i>compliance</i>) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.	Simpulan Pemenuhan Aktivitas Pengawasan	Y			
		APIP melaksanakan audit ketaatan sesuai mandat dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan audit ketaatan, yaitu:				
	1	Perencanaan audit ketaatan telah:				https://bit.ly/peranlayanan2024
		(1) dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/manajemen K/L/D.	Y	Perencanaan audit dikomunikasikan dengan auditi melalui pelaksanaan <i>entry meeting</i> , penandatanganan notulensi kesepakatan (KMA 10), dan penyampaian surat tugas (KMA 21) pelaksanaan audit.		
		(2) mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan.	Y	PKA yang tertuang dalam KMA 8 telah mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan.		
		(3) menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereview pengendalian kunci/utama.	T	Dalam melaksanakan audit, auditor telah menilai risiko terkait sasaran/program/kegiatan audit sebagaimana tercantum dalam PKPT (dalam matriks pemetaan risiko audit) namun program kerja audit belum sepenuhnya menilai risiko audit		
		(4) mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit (termasuk PAO, TAO, dan metodologi pengambilan sampel).	Y	Audit Ketaatan yang dilaksanakan telah mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit sebagaimana tertuang dalam PKA (KMA 8) dan KKA (KMA 22)		
		(5) mengembangkan Program Kerja Audit.	Y	Audit ketaatan kami telah dilengkapi PKA yang tertuang dalam KMA 8.		
	2	Pelaksanaan audit ketaatan				
		(1) dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit ketaatan.	Y	Audit ketaatan kami telah dilakukan oleh SDM yang kompeten sebagaimana Surat Tugas yang tertuang dalam KMA 21 dan Rekapitulasi data Pelatihan Auditor.		
		(2) mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA).	Y	Pelaksanaan audit ketaatan telah didokumentasikan dalam KKA yang tertuang dalam KMA 22		
		(3) mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh.	Y	Audit ketaatan kami telah mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh, dan dituangkan ke dalam KKA (KMA 22)		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3					
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		
1	Audit Ketaatan (Compliance Auditing) Keterangan: APIP melakukan audit ketaatan (compliance) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.	(4)	mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (<i>abuse</i>).	Y	Audit ketaatan kami telah mendeteksi ada tidaknya indikasi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan, ketidakpatutan (<i>abuse</i>). Hal ini dibuktikan dalam KKA pada KMA 22 telah didokumentasikan analisis ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.		
		(5)	melalui supervisi dan reviu berjenjang.	Y	Pelaksanaan audit ketaatan telah dilakukan reviu berjenjang sebagaimana tertuang dalam KMA 11-14 dan tertuang dalam KKA pada KMA 22.		
		(6)	membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.	Y	Pelaksanaan audit ketaatan telah membuat simpulan dan rekomendasi yang dituangkan dalam NHA pada KMA 16 dan LHA.		
		3	Hasil audit ketaatan telah:				
			(1) dikomunikasikan kepada manajemen K/L/D melalui laporan hasil audit ketaatan.	Y	Hasil audit ketaatan telah dikomunikasikan dalam rapat pembahasan NHA dan penyampaian LHA.		
			(2) didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.	Y	<p>Prosedur monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.</p> <p>Pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit ketaatan, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Hasil Audit telah dimonitor sebagaimana tertuang dalam Berita acara Tindak Lanjut Temuan Hasil ADTT pada Kantor KSOP Kelas IV Panarukan, KSU Tanjung Perak, dan OBU Wilayah III Jawa Timur; 2. Tindak Lanjut Hasil Audit telah dimonitor sebagaimana rekапitulasi temuan SDTT PSO dan Perintis Laut pada KSOP Kelas II Tarakan dan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut; 3. Kegiatan Audit pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat baru dilaksanakan pada bulan Maret - April 2024 dan belum ada tindak lanjut dari auditi, serta belum melewati batas waktu 60 hari setelah laporan terbit. 		
		Kualitas Pengawasan					
		1	Temuan dalam laporan hasil pengawasan ketaatan APIP.	Y	Terdapat 35 temuan dari 6 laporan hasil pengawasan ketaatan APIP dengan nilai penyelamatan dan potensi kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 0		
		2	Tindak lanjut rekomendasi atas	Y	Dari 7 temuan atas 6 laporan hasil pengawasan ketaatan, terdapat 11 temuan yang sudah ditindaklanjuti (sebesar 20%)		
		3	Hasil pengawasan ketaatan dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders lainnya.	Y	<p>Hasil pemanfaatan pada up :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OBU Wilayah III Jawa Timur : <p>Telah dilakukan tindak lanjut oleh auditi terkait dengan pemanfaatan peralatan, menyusun prosedur dan juknis penggunaan penunjang pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. KSU Tanjung Perak : <p>Telah ditindaklanjuti rekomendasi untuk melakukan evaluasi atas performa kapal untuk dilakukan perawatan dan perbaikan atas peralatan yang mengalami kerusakan, melakukan pemenuhan kelengkapan surat-surat kapal sebagaimana tercantum dalam spesifikasi teknis dalam kontrak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. KSOP Kelas IV Panarukan : <p>Telah ditindaklanjuti rekomendasi untuk berkoordinasi dengan irektorat KPLP dan KSOP Kelas III Tanjung Pakis untuk percepatan proses pengurusan surat-surat kapal berkoordinasi dengan Direktorat KPLP untuk melakukan evaluasi atas performa kapal untuk dilakukan perawatan dan perbaikan atas peralatan yang mengalami kerusakan.</p> <p>dari rekomendasi yang diberikan untuk auditi bertujuan memberikan keyakinan atas kebermanfaatan BMN yang telah dihibahkan kepada UPT untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. dengan begitu K/L/D atau pun stakeholder dapat ikut juga merasakan kebermanfaatan BMN yang telah dihibahkan.</p>		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>) Keterangan: APIP melaksanakan audit untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.	Simpulan Pemenuhan	Y			
		Aktivitas Pengawasan				
		APIP melaksanakan audit kinerja sesuai mandat dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja, yaitu:				
		1 Perencanaan audit kinerja telah:				https://bit.ly/peranlayanan2024
		(1) dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/manajemen K/L/D.	Y	Perencanaan audit dikomunikasikan kepada auditee melalui <i>entry meeting</i> , tertuang dalam formulir 6 berita acara kesepakatan.		
		(2) mempertimbangkan pemahaman proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit.	Y	Perencanaan audit kinerja telah mempertimbangkan proses bisnis sasaran/program/kegiatan yang diaudit, tertuang dalam dokumen sebagai berikut: - PKA (Form 1); - Kertas Kerja Pemahaman Organisasi Audit (Form 2); - Kertas Kerja Reviu Indikator Kinerja (Form 3).		
		(3) mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit.	Y	Rencana audit kinerja telah mengidentifikasi dan menilai risiko strategis dan risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan audit sebagaimana tercantum dalam: - formulir 1 Program kerja audit perencanaan; - formulir 9 KKA Perencanaan; - Formulir 4c evaluasi register risiko operasional unit kerja; - Formulir 5c evaluasi rancangan pengendalian utama operasional unit kerja.		
		(4) menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati.	Y	- Perencanaan audit telah menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria (penetapan indikator kinerja dan bobot) yang disepakati pada formulir 6 berita acara kesepakatan.		
		(5) mengembangkan Program Kerja Audit.	Y	- Telah disusun program kerja audit perencanaan pada formulir 1 dan program kerja audit pengujian pada formulir 7.		
		2 Pelaksanaan audit kinerja telah:				

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN					LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3						
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI			
		(1)	dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait audit kinerja.	Y	Audit kinerja kami telah dilaksanakan dengan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatannya, sebagaimana tertera dalam Surat Tugas sebagai berikut: - ST-ITJEN I/1-162D Tahun 2023 Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Jawa Barat; - ST-ITJEN I/1-162C Tahun 2023 Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Banten; - ST-ITJEN I/1-142 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 hal Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Provinsi DKI Jakarta; - ST-ITJEN I/1-143 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 hal Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Provinsi Jawa Tengah.			
		(2)	mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian.	Y	Audit kinerja kami telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian, yang tertuang dalam: - Formulir 4c evaluasi register risiko operasional unit kerja; - Formulir 5c evaluasi rancangan pengendalian utama operasional unit kerja.			
		(3)	mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut.	Y	Audit kinerja kami telah mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja sebagaimana tertera dalam Kertas Kerja Utama Pengukuran dan Penilaian Indikator Kinerja (Form 8) dan Kertas Kerja Audit (Form 9).			
		(4)	mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA).	Y	Pelaksanaan audit kinerja telah didokumentasikan dalam Kertas Kerja Audit (Formulir 9)			
		(5)	melalui supervisi dan reviu berjenjang.	Y	Dalam pelaksanaan audit kinerja telah dilakukan reviu berjenjang didokumentasikan dalam dokumen reviu konsep laporan (Formulir 12)			
		(6)	membuat simpulan dan menyusun rekomendasi.	Y	Pelaksanaan audit kinerja membuat simpulan dan rekomendasi didokumentasikan dalam KKA (Formulir 9) dan Naskah Hasil Audit (Formulir 10).			
		3	Hasil audit kinerja telah:					
			(1) dikomunikasikan kepada manajemen K/L/D melalui laporan hasil audit kinerja	Y	Hasil audit kinerja telah dikomunikasikan dengan auditi dalam berita acara pembahasan NHA kinerja (Formulir 10 dan Formulir 11), penyusunan LHA (Formulir 12 dan Formulir 13) serta penyampaian LHA melalui Surat Pengantar Laporan.			
			(2) didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.	Y	Prosedur monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit tertuang dalam Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP-ITJEN 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Telah dilakukan pemantauan tindak lanjut atas hasil audit kinerja didokumentasikan dalam laporan pemantauan tindak lanjut temuan audit pada formulir 14.			
			Kualitas Pengawasan					
			1 Temuan kinerja (3E) atas	Y	Terdapat 28 temuan kinerja (3E) dalam 8 sampel laporan hasil Audit Kinerja			
			2 Tindak lanjut atas rekomendasi	Y	Dari 28 temuan atas 8 sample laporan hasil audit kinerja, telah ditindaklanjuti 27 temuan audit (96,4%)			
			3 Hasil pengawasan kinerja	Y	Terdapat 85 rekomendasi hasil pengawasan kinerja yang telah dimanfaatkan oleh manajemen K/L dan stakeholders lainnya			
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>).		Simpulan Pemenuhan	Y				
	Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.		Aktivitas Pengawasan					
			APIP memberikan assurance atas GRC sesuai dengan mandat dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan pemberian asurans atas GRC					
		1	Persiapan asurans atas GRC telah:				https://bit.ly/peranlayanan2024	
			(1) mempertimbangkan proses bisnis serta kompleksitas unit kerja dalam organisasi.	Y	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP telah mempertimbangkan proses bisnis dan kompleksitas unit kerja yakni 40% dari total Anggaran Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP No 5 Th 2021,			

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3					
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC). Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.	(2)	dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi terkait asurans atas GRC.	Y	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi, ditunjukkan dengan mengikuti bimbingan teknis mengenai Penjaminan Kualitas SPIP sesuai Surat Tugas ITJEN ST-ITJEN I/8-026 Tahun 2023 dan bukti Norma Hasil Nomor ND 43/IT.I/II/2023 serta Surat Tugas ST-ITJEN I/4-001 Tahun 2023 tentang Penjaminan Kualitas dan Pleno Hasil Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan TA.2023		
		(3)	mengidentifikasi objek asurans berdasarkan sasaran strategis organisasi.	Y	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP telah mempertimbangkan proses bisnis dan kompleksitas unit kerja yakni 40% dari total Anggaran Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPKP No 5 Th 2021,		
		(4)	menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim asurans.	Y	Menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi, tahapan dan jadwal waktu, sistematika pelaporan, rencana kebutuhan sumber daya serta susunan tim asurans yang telah tertuang dalam Nota Dinas Inspektorat I nomor : 117/IT.I.VI/2023 tanggal 31 Mei 2023		
		(5)	mengembangkan Program Kerja Asurans.	Y	Telah terdapat Rencana Kerja Penjaminan Kualitas sesuai Timeline Kegiatan Penjaminan Kualitas yang tertuang pada Nota Dinas Inspektorat I No.43/IT.I/II/2023		
	2 Pelaksanaan asurans atas GRC	(1)	dikomunikasikan kepada stakeholder/auditee/manajemen K/L/D.	Y	Pelaksanaan penjaminan kualitas SPIP telah dikomunikasikan kepada audit melalui surat undangan dari Unit Eselon I		
		(2)	mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh.	Y	Pelaksanaan penjaminan kualitas SPIP mengevaluasi informasi/bukti audit yang diperoleh sebagaimana yang tertuang dalam Kertas Kerja Penilaian Maturitas SPIP		
		(3)	menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis.	Y	Penjaminan kualitas SPIP menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam KKE 2.0 dan 5.1		
		(4)	menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko.	Y	Penjaminan Kualitas SPIP menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko yang telah tertuang pada KKE 3.1 sampai 3.4		
		(5)	menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.	Y	Penjaminan Kualitas SPIP menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah tertuang pada KKE 6, KKE 7 dan KKE 8		
		(6)	mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/korups i yang mempengaruhi GRC.	Y	Penjaminan Kualitas SPIP mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/korups i yang mempengaruhi GRC yang tertuang pada Kertas Kerja Evaluasi 4.0		
		(7)	mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA).	Y	Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Evaluasi		
		(8)	melalui supervisi dan reviu berjenjang.	Y	Telah dilampirkan dokumen supervisi dan reviu berjenjang kegiatan GRC dengan lembar catatan dalam pelaporan hasil kegiatan PK SPIP dan Kertas Kerja yang telah di koreksi oleh tim PK SPIP dari Tim PM SPIP melalui Monitoring AOI		
		(9)	memberikan opini/simpulan terhadap efektivitas GRC organisasi K/L/D dan memberikan rekomendasi perbaikan.	Y	Telah dilampirkan dokumen Surat Dinas terkait Penyampaian Laporan Hasil Penjaminan Kualitas SPIP Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan No.PS.302/4/6/ITJEN/2023 dan Area Of Improvement dan telah dilakukan		
	3 Hasil asurans atas GRC telah:	(1)	dikomunikasikan kepada manajemen K/L/D melalui laporan hasil asurans.	Y	Laporan hasil penjaminan kualitas SPIP telah disampaikan kepada Sekjen dengan No.Surat PS.302/4/6/ITJEN/2023 Tanggal 13 Juni 2023		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN					LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3						
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI			
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC). Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.	(2)	didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asurans serta bukti pelaksanaan tindak lanjut.	Y	Telah di lakukan monitoring tindak lanjut hasil asurans sebagaimana tertuang Matriks Papan Monitoring Area Of Improvement dari masing masing unit es I yang telah di tandatangan oleh Ketua Tim Pokja SPIP Nota Dinas No.303/IT.I/XII/2023			
	Kualitas Pengawasan	1	Integrasi hasil asurans GRC.	Y	Terdapat 1 laporan hasil asurans atas GRC dalam bentuk kegiatan penjaminan kualitas SPIP Kementerian Perhubungan sesuai dengan Laporan PS.302/4/6/ITJEN/2023 Tanggal 13 Juni 2023			
		2	Temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan	Y	Telah dilaksanakan penjaminan kualitas SPIP pada 9 Unit Eselon I Kementerian Perhubungan, dan terdapat 5 Aol sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Asurans GRC PS.302/4/6/ITJEN/2023 Tanggal 13 Juni 2023 dan Monitoring Aol			
		3	Tindak lanjut rekomendasi oleh manajemen atas saran hasil	Y	Dari 5 Aol yang ditentukan, telah diproses tindaklanjut seluruhnya (100%). Monitoring tindak lanjut dilaksanakan sesuai dengan Hasil Monitoring Area of Improvement yang telah disusun dalam Nota Dinas 303/IT.I/XII/2023			
		4	Hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh stakeholders.	Y	Hasil asurans GRC telah dimanfaatkan oleh stakeholders, antara lain: 1. Percepatan pengesahan kebijakan, sosialisasi dan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan; 2. Melakukan evaluasi atas struktur organisasi dan tugas pokok fungsi terkait Manajemen Risiko; 3. Akan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Inspektorat Jenderal; 4. Akan melakukan pemantauan terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal; 5. Menyusun pedoman reviu atas proses Manajemen Risiko.			
KEGIATAN KONSULTASI								
4	Jasa Konsultansi (Consulting Services) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	Simpulan Pemenuhan	Y					
	Aktivitas Pengawasan	1	APIP memberikan jasa konsultansi sesuai kewenangan dalam IAC dan pedoman/petunjuk pelaksanaan jasa konsultansi, dengan:				https://bit.ly/operasiayanan2024	
		(1)	menetapkan metodologi dan jenis jasa konsultansi (misalnya apakah dikombinasikan dengan penugasan asurans atau dilakukan terpisah).	Y	Metodologi dan jenis jasa konsultansi yang telah dilaksanakan dituangkan dalam <i>Term of Reference</i> (TOR)			

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
4	Jasa Konsultansi (Consulting Services) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	(2)	berkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APIP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi.	Y	<p>Telah berkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APIP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi, hal ini termuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Undangan UM.207/I/9/DJPD/2024; - Surat Undangan UM.207/I/8/DJPD/2024; - Surat Undangan UM.207/14/I/7/DJPD/2024; - Opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan - Surat Direktur Poltekbang Makassar nomor UM.006/15/17/Poltekbang.Mks/2023 tanggal 01 November 2023 perihal permohonan opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Surat Tugas Plh. Inspektur II nomor ST-IT.II 192 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 hal melaksanakan pendampingan; - Nota Dinas Korwas V ke Inspektur II nomor 333/IT.II/XII/2023 tanggal 14 November 2023 hal Laporan Opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Surat Inspektur II ke Direktur Poltekbang Makassar nomor PS.308/2/2/ITJEN//2023 tanggal 15 November 2023 hal Laporan Opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Pendampingan dan Konsultasi HPS untuk Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Jalan Akses Stasiun Labakkang, Ma'arang dan Tanete Rilau; - Surat Kepala BPKASS nomor KU.001/1/13/BPKA-SS/2024 tanggal 22 April 2024 perihal Permohonan Pendampingan dan Konsultasi HPS; - Surat Tugas Inspektur II nomor ST-IT.II 35 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 hal melaksanakan konsultasi; - Nota Dinas Korwas V ke Inspektur II nomor 130A/IT.II/IV/2024 tanggal 26 April 2024 hal Laporan Konsultasi HPS; - Surat Inspektur II ke Kepala BPKA Sulawesi Selatan nomor PS.306/1/15/ITJEN/2024 tanggal 30 April 2024 hal Hasil Konsultasi Penyusunan HPS; - Worksop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP; - Usulan Kegiatan, KAK, Surat Tugas, dan Undangan Worksop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP sebagai data dukung administrasi kegiatan; - Nota Dinas Korwas V ke Inspektur II nomor 330/IT.II.XI/2023 tanggal 13 November 2023 hal notulen kegiatan Worksop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP; - Notas Dinas Inspektur II ke Irjen nomor 332/IT.II.XI/2023 tanggal 13 November 2023 hal Laporan kegiatan Worksop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP; - Surat Inspektur II ke UPT BPSDMP nomor PS.308/2/1/ITJEN/2023 tanggal 13 November 2023 hal Tindak Lanjut Workshop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP; - Surat kenada Sesditjen Hubla nomor PS.304/5/23/IT.JEN/2023 perihal Sharing Session Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal 	
		(3)	terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas.	Y	Jasa konsultansi kami terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas sebagaimana tercantum dalam IAC.	
		(4)	mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil	Y	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa konsultansi mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil saran yang diberikan sebagaimana tercantum dalam draft IAC Tahun 2024; - Telah ditambahkan klausul dalam surat laporan konsultasi yang disampaikan pada mitra kerja yaitu "Tim konsultasi Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tidak mengambil alih tanggungjawab manajemen dalam mengambil keputusan akibat dari pelaksanaan konsultasi." 	
		(5)	dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara <i>due profesional care</i> .	Y	Jasa konsultansi dilakukan oleh SDM yang berkompotensi dibidangnya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tugas dan Rekapitulasi Data Pelatihan Auditor	

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				LINK DATA DUKUNG	
		LEVEL 3					
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI		
4	Jasa Konsultansi (Consulting Services) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	2	Hasil jasa konsultansi yang diberikan APIP telah dikomunikasikan kepada manajemen K/L melalui laporan hasil jasa konsultansi.	Y	<p>Hasil jasa konsultansi telah dikomunikasikan kepada manajemen K/L melalui laporan hasil jasa konsultansi, sebagaimana termuat dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota Dinas Inspektorat I No.91/IT.I/II/2024 hal Penyampaian Laporan Kegiatan Bimtek Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Unit dan MR di Ditjen Laut Tahun 2024 yang menanggapi Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SM.109/2/5/DJPL/2024 hal Undangan Permohonan Menjadi Narasumber tanggal 19 Februari 2024; - Nota Dinas Korwas V ke Inspektor II nomor 333/IT.II/XII/2023 tanggal 14 November 2023 hal Laporan Opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Surat Inspektor II ke Direktur Poltekbang Makassar nomor PS.308/2/2/ITJEN/2023 tanggal 15 November 2023 hal Laporan Opini/pendampingan pembayaran prestasi pekerjaan renovasi ruang makan; - Nota Dinas Korwas V ke Inspektor II nomor 130A/IT.II/IV/2024 tanggal 26 April 2024 hal Laporan Konsultasi HPS; - Surat Inspektor II ke Kepala BPKA Sulawesi Selatan nomor PS.306/1/15/ITJEN/2024 tanggal 30 April 2024 hal Hasil Konsultasi Penyusunan HPS; - Nota Dinas Korwas V ke Inspektor II nomor 330/IT.II/XI/2023 tanggal 13 November 2023 hal notulen kegiatan Worksop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP ; - Notas Dinas Inspektor II ke Irjen nomor 332/IT.II.XI/2023 tanggal 13 November 2023 hal Laporan kegiatan Worksop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP; - Surat Inspektor II ke UPT BPSDMP nomor PS.308/2/1/ITJEN/2023 tanggal 13 November 2023 hal Tindak Lanjut Workshop Penyusunan Peta Risiko di Lingkungan BPSDMP; - Surat kepada Inspektor Jenderal nomor ND 20_IT.II_XII 2023 perihal Laporan Kegiatan Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko UPT/Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; - Surat kepada Inspektor Jenderal nomor ND 14/IT.III/XI/2023 Perihal Laporan Kegiatan Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 UPT/Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Wilayah Provinsi DKI Jakarta; - Terdapat Laporan kegiatan pada Kegiatan Coaching Clinic di Inspektorat IV; - Terdapat Laporan kegiatan pada Kegiatan Pendampingan Perhitungan Perbaikan Pekerjaan Lanjutan Pelapisan Runway Bandar Udara Gatot Subroto; - Terdapat Laporan kegiatan pada Kegiatan sebagai Narasumber Sosialisasi KM 69; - Nota dinas nomor: 086A/IT.INV/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Asistensi Persiapan dan Evaluasi terhadap Pembangunan Zona Integritas Menuju Predikat WBK/WBBM Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 	https://drive.google.com/drive/folders/1V2Qw4bOwlcSG_w_hfDyh32F5uXk8L5R3usp?usp=drive_link	
		3	Melaporkan kepada pimpinan K/L/D bila ada hasil dari kegiatan jasa konsultansi memiliki risiko (sifat dan materilitasnya) yang signifikan terhadap organisasi.	Y	<p>Telah dilaporkan kepada pimpinan K/L/D bila ada hasil dari kegiatan jasa konsultansi memiliki risiko (sifat dan materilitasnya) yang signifikan terhadap organisasi dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat UM.209/1/1/ITJEN/2024 hal penyampaian saran dan masukan tanggal 04 Januari 2024; - Surat Inspektor II kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian nomor PS.316/2/18/ITJEN/2023 tanggal 25 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Data Dukung Tindak Lanjut Temuan LHP BPK atas Pembangunan Prasarana LRT Sumatera Selatan; - Surat Inspektor II kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api nomor PS.306/3/2/ITJEN/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Tanggapan Pelaksanaan Penerimaan PNBP TAC Tahun 2023; - Surat Inspektor II kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PS.306/2/2/ITJEN/2024 tanggal 3 Mei 2024 hal Penyampaian Pendapat Atas Usulan Penambahan Nilai Kontrak Penyelesaian Pekerjaan Jalur Ganda Solo Semarang (JGSS) Paket 02 Tahun 2024; - Surat Inspektor II kepada Kepala Biro LPPBMN nomor PL.104/1/1/ITJEN/2024 tanggal 5 April 2024 hal Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan PMU Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Transportasi Perkeretaapian Direktorat Prasarana; - Surat Inspektor II kepada Direktur PTDI-STTD Bekasi nomor PS.308/1/1/ITJEN/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pendampingan untuk Langkah Akhir Tahun Pekerjaan Renovasi Ruang Makan, Dapur, dan Laundry; - Surat kepada Inspektor Jenderal nomor ND 20_IT.III_XII 2023 perihal Laporan Kegiatan Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko UPT/Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; - Surat kepada Inspektor Jenderal nomor ND 14/IT.III/XI/2023 Perihal Laporan Kegiatan Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023 UPT/Satker Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Wilayah Provinsi DKI Jakarta; - Nota Dinas Internal Nomor: 061a/NIM/IT.INV/V/2024 tentang Kegiatan Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal Zona Integritas dalam Rangka Pengusulan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2024. 		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 3				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	
4	Jasa Konsultansi (Consulting Services)	Kualitas Pengawasan				
		1	Rencana aksi (renaksi) atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultansi.	T	<p>Rencana aksi (renaksi) atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultansi telah dilaksanakan sebanyak 26 yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Jasa Konsultasi Pendampingan SPIP, telah dilakukan Penilaian Mandiri (PM) dari masing-masing Unit Kerja; 2. Dari Jasa Konsultasi Pendampingan SPIP, telah dilakukan pendampingan MR sedang dilakukan Penyusunan Profil Risiko masing-masing UPT; 3. Melakukan Standardisasi Proses Bisnis Di Lingkungan BPSDM Perhubungan Sampai Level 3 Dengan mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 19 Tahun 2018 yang dikoordinir oleh Sekretariat BPSDM Perhubungan dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan; 4. Menetapkan struktur manajemen risiko dan menunjuk koordinator pengelola risiko / Unit Pengelola Risiko (UPR); 5. Menyusun peta risiko dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang meliputi Penetapan Konteks Manajemen Risiko (dormat-1), Profil Risiko (format-5) dan Rencana Penanganan Risiko (format-8) serta melengkapi dokumen Manajemen Risiko sebagaimana dalam format-1 sampai dengan format-22; 6. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan melalui pelatihan dan/atau sertifikasi di bidang manajemen risiko yang dikoordinir oleh Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan; 7. Mengalokasikan anggaran dalam rangka penerapan manajemen risiko; 8. Telah terlaksananya penerapan manajemen risiko berupa Penyusunan Profil Risiko masing-masing UPT pada satker yang sudah mendapatkan jasa konsultasi dari Kegiatan Sharing Session Penerapan Manajemen Risiko sesuai KM 69 Tahun 2023; 9. Pelaksanaan Perbaikan Pekerjaan Lanjutan Pelapisan Runway, Turning Area dan Taxify dimulai tanggal 20 April 2023; 10. Pekerjaan Perbaikan Marking dengan progress pekerjaan sebesar 100%, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 21 Tahun 2023; 11. pekerjaan perbaikan kerusakan asphalt belum dapat dikerjakan dikarenakan alat Pneumatic Tire Roller dan Tandem Roller belum tersedia di lokasi pekerjaan. Sesuai dengan Surat Kesepakatan, batas akhir penyelesaian pekerjaan sampai dengan 17 Desember 2023; 12. Material dan aspal yang telah dilakukan pengecekan pada AMP dapat digunakan; 13. Agar DJPU dalam melakukan penyusunan risk register dan peta risiko, selain metode benchmark and comparison study, dapat juga digunakan metode induksi; 14. Untuk Inspektorat Jenderal agar menyiapkan timeline mulai dari Lini 1 sampai dengan Lini 3 kemudian melakukan sinkronisasi dan harmonisasi sehingga dapat diketahui kapan tenggat waktunya; 15. Sebaiknya para eselon I di Kementerian Perhubungan untuk mengikuti timeline penyampaian laporan pelaksanaan manajemen risiko agar pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan; 16. Menyusun Tim Pokja Pembangunan Zona Integritas dan melakukan internalisasi pembangunan zona integritas kepada seluruh pegawai di lingkungan sesditrehubdat; 17. Perlu dibuat laporan diklat tahunan yang menunjukkan persentase PNS yang telah mengikuti diklat pada tahun tersebut dibandingkan dengan 	https://drive.google.com/drive/folder/s/1VwlEnibrnZqMh6PvQED6UNzQubiX4gM?usp=drive_link
		2	APIP memberikan attensi untuk mencegah permasalahan strategis terjadi.	Y	<p>APIP telah memberikan attensi untuk mencegah permasalahan strategis sebanyak 13 attensi seperti yang tertuang dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APIP memberikan attensi untuk mencegah permasalahan strategis terjadi dalam Surat UM.209/1/1/ITJEN/2024 hal penyampaian saran dan masukan tanggal 04 Januari 2024; 2. Surat Inspektor II kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian nomor PS.316/2/18/ITJEN/2023 tanggal 25 Oktober 2023 hal Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Verifikasi Data Dukung Tindak Lanjut Temuan LHP BPK atas Pembangunan Prasarana LRT Sumatera Selatan; 3. Surat Inspektor II kepada Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api nomor PS.306/3/2/ITJEN/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Tanggapan Pelaksanaan Penerimaan PNBP TAC Tahun 2023; 4. Surat Inspektor II kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor PS.306/2/22/ITJEN/2024 tanggal 3 Mei 2024 hal Penyampaian Pendapat Atas Usulan Penambahan Nilai Kontrak Penyelesaian Pekerjaan Jalur Ganda Solo Semarang (JGSS) Paket 02 Tahun 2024; 5. Surat Inspektor II kepada Kepala Biro LPPBMN nomor PL.104/1/1/ITJEN/2024 tanggal 5 April 2024 hal Penetapan Pemenang Paket Pekerjaan PMU Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Transportasi Perkeretaapian Direktorat Prasarana; 6. Surat Inspektor II kepada Direktur PTDI-STTD Bekasi nomor PS.308/1/1/ITJEN/2024 tanggal 16 Januari 2024 hal Tanggapan atas Permohonan Pendampingan untuk Langkah Akhir Tahun Pekerjaan Renovasi Ruang Makan, Dapur, dan Laundry; 7. Surat kepada Kepala UPP Kelas II Wanci nomor PS. 304/4/20/ITJEN/2023 perihal Laporan Hasil Pendampingan Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada UPP Kelas II Wanici; 8. Surat Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor PS.304/7/2/ITJEN/2023 perihal Penyampaian Hasil Pendampingan Rekonsiliasi/Pencocokan Data Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 9. Surat Kepada Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Nomor UM.209/6/13/ITJEN/2023 Perihal Saran dan Masukan Rancangan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Prosedur Pengisian, Pemakaian dan Pengukuran (Soundign) BBM Kapal Negara Patroli Direktorat KPLP; 10. Ijen telah memagagi penyedia dan KPA UPBU Silampari untuk mengklarifikasi permasalahannya, dan berdasarkan justifikasi teknis oleh Ijen, usulan pengenaan Sanksi Daftar oleh KPA/PPK dinilai belum sesuai ketentuan. Maka dari itu, pelaksanaan perbaikan konstruksi harus menyesuaikan jangka waktu perpanjangan masa Jaminan Pemeliharaan oleh Penyedia PT. Belibis Raya Group; 11. Ijen telah mengembangkan Simarko terkait Society 5.0 yang mendukung penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan; 12. Kami selaku Inspektorat Jenderal memberi arahan supaya melakukan evaluasi risiko untuk menentukan prioritas risiko, dengan membandingkan antara level risiko yang diperoleh selama proses analisis risiko dengan selera risiko yang telah ditetapkan pemilik risiko; 13. Melaksanakan Kegiatan evaluasi atas tender bermasalah dan berdampak kerugian negara. 	

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
KEGIATAN ASURANS						
1	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>) Keterangan: APIP melakukan audit ketaatan (<i>compliance</i>) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.	Simpulan Pemenuhan	T			
		1 Audit ketaatan telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi).	T	ADTT telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi)		https://drive.google.com/drive/folders/1QtmUiTwIJFL25XtZ1BLQbJIWrJ45qlmd?usp=sharing
		2 Pedoman dan pelaksanaan audit ketaatan telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.	T	APIP telah melakukan evaluasi secara berkala terkait pedoman pelaksanaan audit ketaatan, sebagai berikut: 1. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor SK.103/KP.801/ITJEN-2016 tentang Pedoman Penugasan Audit Investigatif 2. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor SK.75/PS.302/ITJEN 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit pada Inspektorat Investigasi 3. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Jenderal		https://drive.google.com/drive/folders/1t-6BpPd8SXkGDAR55mq6IDE4lixz_UgE?usp=drive_link
		3 Audit ketaatan telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: tidak terdapat permasalahan berulang).	T	Audit Dengan Tujuan Tertentu telah menghasilkan rekomendasi dalam rangka perbaikan GRC.		https://drive.google.com/drive/folders/1RJwokh10g0r4FZif64AImykQzQML1d9?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
2	Audit Kinerja (Performance Auditing) Keterangan: APIP melaksanakan audit untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.	Simpulan Pemenuhan	T			
		1	Audit kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi).	T	<p>Audit kinerja berbasis risiko telah dilaksanakan pada tahun 2023, sebagaimana tertera dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ST-ITJEN I/1-162D Tahun 2023 Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Jawa Barat; - ST-ITJEN V/1-162C Tahun 2023 Audit Kinerja Berbasis Risiko pada BPTD Banten; - ST-ITJEN I/1-142 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 hal Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta di Provinsi DKI Jakarta; - ST-ITJEN I/1-143 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 hal Melaksanakan Audit Kinerja Berbasis Risiko Pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang di Provinsi Jawa Tengah. <p>Pada tahun 2024, pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko ditargetkan pada Triwulan III 2024. Saat ini, sedang proses penyusunan pedoman penilaian maturitas manajemen risiko yang ditargetkan selesai pada bulan Juli 2024. Setelah pedoman ditetapkan, pada bulan Agustus 2024, direncanakan akan dilaksanakan penilaian maturitas manajemen risiko kepada 18 UPT yang menjadi <i>pilot project</i> penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil penilaian maturitas manajemen risiko ini, nantinya akan dilakukan audit kinerja berbasis risiko bagi UPT yang tingkat maturitas manajemen risiko mencapai level 3.</p>	https://bit.ly/peranlayanan2024
		2	Pedoman dan pelaksanaan audit kinerja telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.	T	<p>Audit kinerja berbasis risiko dilaksanakan berpedoman pada Perirjen KP 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal. Pedoman ini disusun dengan melakukan evaluasi terhadap Keprjen SK 45 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit. Pada tahun 2023, dilaksanakan asistensi bersama Komite Audit sebagai evaluasi kesiapan penerapan pedoman.</p> <p>Implementasi pedoman audit kinerja berbasis risiko telah dilaksanakan oleh Inspektorat I dan Inspektorat II. Hasil pelaksanaan audit kinerja berbasis risiko dilakukan evaluasi bersama Komite Audit sebagaimana tercantum dalam ND.253/IT.I/XI/2023.</p> <p>Pada tahun 2024, telah dilakukan evaluasi pedoman audit kinerja berbasis risiko melalui rapat pembahasan dan permintaan saran masukan.</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1Th2oITNPiwVARNtOhMHEjzBo1ctlUcJ?usp=drive_link
		3	Audit kinerja telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: hasil audit kinerja telah terintegrasi dengan perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi).	T	<ul style="list-style-type: none"> - Telah Terdapatnya Perbaikan manajemen risiko organisasi K/L/D pada Inspektorat I berdasarkan hasil audit kinerja (LHA UPPKB Jawa Tengah dan Sumatera Selatan 2023 , PS.302/2/2/ITJEN/2023 LHE BTS, ND.118/IT.I/IV/2024 Laporan AUP TW I 2024; - APIP memberikan rekomendasi strategis Inspektorat I pada pimpinan K/L/D dari hasil konsolidasi audit kinerja mealui Berita Acara Tindak Lanjut Audit Kinerja Berbasis Risiko BPTD Jawa Barat dan Banten. 	https://drive.google.com/drive/folders/1ta1Npy_LTs0SQMVDIVcBKGS4p6vX1l?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	<p>Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>).</p> <p>Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.</p>	<p>Simpulan Pemenuhan</p> <p>T</p>	<p>1 Asurans atas GRC telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi).</p> <p>2 Pedoman dan pelaksanaan asurans atas GRC telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis.</p> <p>3 Hasil asurans atas GRC telah menghasilkan kualitas pengawasan yang konsisten dan berkelanjutan dalam rangka perbaikan GRC (contoh: hasil asurans atas GRC telah diarahkan untuk memitigasi risiko strategis organisasi).</p>	<p>T</p> <p>T</p> <p>T</p>	<p>Kami telah melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut</p> <p>Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asurans atas GRC. Aol yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti melalui Papan TL Monitoring Aol SPIP</p> <p>Hasil Assurans atas GRC telah diarahkan untuk memitigasi risiko strategis organisasi, hal ini ditunjukkan dengan disusunnya KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko atas Aol yang timbul, dan telah dilakukan kegiatan penyusunan manajemen risiko melalui aplikasi SIMARKO.</p>	https://bit.ly/peranlayanan2024 https://drive.google.com/drive/folders/1StAxsdJJunGOdv4lUhwykFn5iNeMnD?usp=drive_link https://drive.google.com/drive/folders/111znBOJGbKJuVewRZnmgZXh4VxDpQGm5?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN				
		LEVEL 4				
		No	URAIAN	Y/T	URAIAN PENILAIAN MANDIRI	LINK DATA DUKUNG
3	<p>Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC).</p> <p>Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.</p>					
KEGIATAN KONSULTASI						
4	Jasa Konsultansi (<i>Consulting Services</i>) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	Simpulan Pemenuhan	T			
		1	Pemberian jasa konsultansi telah dilaksanakan secara berkelanjutan (terinternalisasi).	T		https://bit.ly/peranlayanan2024
		2	Pedoman dan pelaksanaan pemberian jasa konsultansi telah dievaluasi dan disesuaikan secara terus menerus sesuai kebutuhan.	T		https://drive.google.com/drive/folders/10_e2uJhSJId-MSS9mTPKhP3dkoi-BkX0?usp=drive_link
		3	Manajemen menjadikan APIP sebagai mitra strategis (<i>strategic partner</i>) dengan menerima dan menggunakan pengetahuan APIP untuk meningkatkan kualitas GRC dan membantu mencapai tujuan organisasi.	T		https://drive.google.com/drive/folders/1fDe6FXMtwwMZTYzgoTt5DejCEyHDopk?usp=drive_link

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		No	URAIAN	Y/T				
KEGIATAN ASURANS								
1	Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>) Keterangan: APIP melakukan audit ketaatan (<i>compliance</i>) untuk memastikan bahwa semua prosedur/area yang diaudit telah sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan prosedur yang berlaku.	Simpulan Pemenuhan		T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. Telah dilaksanakan Audit Dengan Tujuan Tertentu yang sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.	1. Perlu ditambahkan mekanisme penilaian sistem pengendalian intern dan survei pendahuluan dalam pelaksanaan audit 2. Dalam rangka pemenuhan indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi pedoman audit secara berkelanjutan.		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		No	URAIAN	Y/T				
2	Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>) Keterangan: APIP melaksanakan audit untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan.	Simpulan Pemenuhan	1 APIP melakukan inovasi dalam praktik pengawasan audit kinerja yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil pengawasan kinerja memberikan foresight dan keyakinan bagi manajemen K/L/D dalam mencapai tujuan organisasi.	T T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. Telah dilaksanakan audit kinerja berbasis risiko, namun belum dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh audit.	1. Telah dilaksanakan audit kinerja berbasis risiko, namun perlu dilakukan secara menyeluruh; 2. Audit kinerja yang dilaksanakan perlu menambahkan mekanisme untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/kegiatan tercapai; 3. Dalam rangka memenuhi indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan audit kinerja berbasis risiko dengan memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi.		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		No	URAIAN	Y/T				
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>). Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.	Simpulan Pemenuhan	1 APIP melakukan inovasi dalam praktik asurans atas GRC yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil asurans atas GRC memberikan foresight dan keyakinan bagi manajemen K/L/D dalam memastikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal organisasi telah termanifestasi secara optimum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	T	Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. Telah dilaksanakan <i>assurance</i> atas GRC secara berkelanjutan.	Dalam rangka pemenuhan indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pelaksanaan <i>assurance</i> atas GRC secara berkelanjutan.		

NO	ELEMEN /TOPIK ELEMEN PERAN DAN LAYANAN	ASPEK PENILAIAN			SIMPULAN PEMENUHAN TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT TOPIK		
		LEVEL 5						
		No	URAIAN	Y/T				
3	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC). Keterangan: APIP melaksanakan kegiatan pengawasan dalam rangka pemberian opini atas efektivitas dan kecukupan tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian organisasi secara menyeluruh. APIP mengoordinasikan kegiatan pengawasannya agar cukup komprehensif sehingga dapat memberikan keyakinan memadai di tingkat organisasi bahwa pengawasan individual memadai dan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk memenuhi tujuan organisasi.							
KEGIATAN KONSULTASI								
4	Jasa Konsultansi (<i>Consulting Services</i>) Keterangan: APIP memberikan bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	Simulan Pemenuhan	T 1 APIP memberikan inovasi dalam praktik jasa konsultansi yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Hasil jasa konsultansi memberikan foresight dan keyakinan bagi manajemen K/L/D dalam memberikan informasi peluang dan memanfaatkan peluang tersebut bagi peningkatan nilai tambah organisasi.	T Hasil penilaian mandiri mencapai level 3. Telah dilaksanakan jasa konsultasi yang telah memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.	1. Perlu dilakukan optimisasi pelaksanaan jasa konsultansi melalui Aplikasi SITAKON sehingga dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola organisasi, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis (<i>strategic partner</i>). 2. Dalam rangka pemenuhan indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pelaksanaan jasa konsultansi secara berkelanjutan.			

KERTAS KERJA PENILAIAN HASIL AKTIVITAS PENGAWASAN (PERAN DAN LAYANAN)

KUALITAS PENGAWASAN	AKTIVITAS PENGAWASAN	PARAMETER	CARA PENGUKURAN	SIMPULAN DAN NILAI	PENILAIAN KUALITATIF PENILAI/EVALUATOR
Result 1: Keyakinan yang Memadai atas Ketataan dan 3E	Audit Ketaatan	1 Temuan dalam laporan hasil pengawasan ketataan		Y	
		- Temuan atas ketidaktaatan terhadap peraturan/ketentuan/prosedur.	(Hitung jumlah butir temuan ketidaktaatan terhadap peraturan/ketentuan/prosedur yang telah teridentifikasi dalam laporan APIP selama periode penilaian).	35	
		- Nilai penyelamatan dan potensi kerugian keuangan negara/daerah.	(Hitung nilai penyelamatan dan potensi kerugian keuangan negara/daerah selama periode penilaian).	Rp -	
		2 Tindak lanjut rekomendasi atas temuan ketidaktaatan.		Y	
		- Jumlah temuan ketidaktaatan yang ditindaklanjuti.	(Hitung jumlah temuan ketidaktaatan yang ditindaklanjuti pada periode penilaian).	7	
		- Seluruh rekomendasi atas temuan ketidaktaatan yang ditindaklanjuti.	(Hitung persentase jumlah TL atas rekomendasi ketidaktaatan pada periode penilaian).	20,00%	
		3 Hasil pengawasan ketataan dimanfaatkan oleh		Y	
		- Hasil pengawasan ketataan yang dilakukan APIP dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.	(Hitung jumlah pemanfaatan hasil pengawasan ketataan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders pada periode penilaian).	7	
		4 Temuan dalam laporan hasil audit kinerja APIP		Y	
		- Temuan atas 3E dalam LHA Kinerja.	(Hitung jumlah temuan kinerja (3E) yang telah teridentifikasi dalam Laporan Hasil Audit Kinerja pada periode penilaian).	28	
Result 3: Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola	Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D	5 Tindak lanjut atas rekomendasi kinerja dalam Laporan		Y	
		- Jumlah temuan hasil audit kinerja yang ditindaklanjuti.	(Hitung jumlah temuan hasil audit kinerja yang ditindaklanjuti pada periode penilaian).	27	
		- Seluruh rekomendasi atas temuan hasil audit kinerja yang ditindaklanjuti.	(Hitung persentase jumlah TL atas rekomendasi hasil audit kinerja pada periode penilaian).	96,43%	
		6 Hasil pengawasan kinerja dimanfaatkan oleh		Y	
		- Hasil pengawasan kinerja yang dilakukan APIP dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.	(Hitung jumlah pemanfaatan hasil pengawasan kinerja oleh stakeholders pada periode penilaian).	85	
		7 Integrasi hasil asurans GRC.		Y	
		- Hasil penilaian atau kesimpulan tentang penugasan yang diberikan oleh Pimpinan APIP secara menyeluruh memberikan tinjauan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi.	(Laporan hasil asurans GRC yang berisi opini atas proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan/atau pengendalian organisasi).	1	
		8 Temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal		Y	
		- Temuan hasil asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.	(Hitung jumlah butir temuan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal pada periode penilaian).	5	
		9 Tindak lanjut rekomendasi oleh manajemen atas saran		Y	
Result 2 : Early Warning dan Peningkatan Efektivitas MR	Jasa Konsultansi	- Jumlah temuan hasil asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal.	(Hitung jumlah temuan asurans atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang ditindaklanjuti pada periode penilaian).	5	
		- Seluruh rekomendasi APIP atas saran hasil pengawasan perbaikan GRC telah ditindaklanjuti oleh manajemen.	(Hitung jumlah persentase rekomendasi oleh APIP atas saran hasil pengawasan perbaikan GRC yang telah ditindaklanjuti oleh manajemen pada periode penilaian).	100,00%	
		10 Hasil asurans GRC dimanfaatkan oleh stakeholders.		Y	
		- Hasil asurans GRC yang dilakukan APIP dimanfaatkan oleh manajemen K/L/D dan stakeholders dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan.	(Hitung jumlah pemanfaatan hasil asurans GRC oleh stakeholders pada periode penilaian).	5	
		11 Pelaksanaan rencana aksi (renaksi) atas		Y	
		- Renaksi atas rekomendasi hasil jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh mitra.	(Jumlah renaksi atas saran/rekomendasi hasil jasa konsultansi yang dilaksanakan oleh mitra pada periode penilaian).	26	
		12 APIP memberikan atensi untuk peningkatan kualitas		Y	
		- Atensi yang diberikan untuk mencegah permasalahan yang berulang, permasalahan strategis dan penyimpangan (fraud).	(Hitung jumlah atensi yang diberikan APIP kepada manajemen untuk mencegah permasalahan strategis terjadi pada periode penilaian).	13	



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SIMPULAN HASIL PENILAIAN MANDIRI

TAHUN 2024



Lampiran Surat Dinas
Nomor :
Tanggal :

SIMPULAN HASIL PENILAIAN

ELEMEN /TOPIK	ASPEK PENILAIAN					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN		
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5					
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER) (60%)								2,1950		
PENGELOLAAN SDM (30%)										
Rekrutmen SDM APIP	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,6300		
Pengembangan SDM Profesional APIP	Y	Y	Y	T	T	3				
PRAKTIK PROFESIONAL (30%)										
Perencanaan Pengawasan	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,7200		
Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Y	Y	Y	Y	T	4				
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA (10%)										
Rencana kerja dan anggaran APIP	Y	Y	Y	Y	T	3	4	0,2250		
Pelaksanaan Anggaran	Y	Y	Y	Y	T	3				
Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Y	Y	Y	T	T	4				
Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Y	Y	Y	Y	T	3				
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI (10%)										
Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Internal APIP	Y	Y	Y	T	T	3	3	0,1800		
Hubungan APIP dengan Manajemen	Y	Y	Y	T	T	3				
Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Y	Y	Y	T	T	3				
STRUKTUR TATA KELOLA (20%)										
Mekanisme Pendanaan	Y	Y	Y	Y	T	4	4	0,4400		
Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Y	Y	Y	T	T	3				

ELEMENT /TOPIK	ASPEK PENILAIAN					SKOR TOPIK	SIMPULAN LEVEL ELEMEN	SKOR ELEMEN
	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5			
Hubungan Pelaporan	Y	Y	Y	Y	T	4		
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT) (40%)								1,2000
PERAN DAN LAYANAN								
Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3	3	1,2000
Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	Y	Y	Y	T	T	3		
Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D (<i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i>)	Y	Y	Y	T	T	3		
Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	Y	Y	Y	T	T	3		
Terdapat 4 elemen berada pada level 4, dan 2 elemen berada pada level 3. Dengan demikian, kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun 2024 berada pada Level 3 (<i>Managed</i>) Untuk mencapai level yang lebih tinggi, APIP menindaklanjuti AOL atas aspek kebijakan/implementasi/outcome yang sebagian terpenuhi (S) dan belum terpenuhi (T)							SKOR	3,3950
							LEVEL	3





AREA OF **IMPROVEMENT**

HASIL PENILAIAN MANDIRI TAHUN 2024



• • •

Lampiran Surat Dinas
Nomor :
Tanggal :

**RENCANA AKSI ATAS AREA OF IMPROVEMENT ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2024**

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
PENGELOLAAN SDM				
1. Perencanaan SDM APIP	<p>1. Perlu dilakukan evaluasi kebijakan dan implementasi terkait perencanaan SDM APIP secara berkelanjutan;</p> <p>2. Perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan terkait pola mutasi dan pola karier sesuai dengan kondisi SDM APIP.</p>	<p>1. Melaksanakan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pengelolaan SDM tahun 2024, khususnya terkait perencanaan SDM;</p> <p>2. Melaksanakan evaluasi Perirjen tentang Pedoman Manajemen Karir Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Inspektorat Jenderal Nomor SK.106/KP.406/ITJEN-2022.</p>	Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	Desember 2024
2. Pengembangan SDM Profesional APIP	<p>Dalam rangka optimalisasi pemenuhan level 4, perlu dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM secara berkelanjutan terkait kebijakan kebutuhan implementasi kebermanfaatan; SDM APIP yang terlibat dalam organisasi profesi/asosiasi/lembaga perlu mengimplementasikan praktik terbaik yang diperolehnya sebagai program perubahan di lingkungan Inspektorat Jenderal; Untuk membangun kualitas, kompetensi, dan integritas yang tinggi dalam tubuh APIP, maka setiap tahunnya perlu dilaksanakan pengembangan SDM APIP menjadi <i>role model</i> agar menginspirasi dan menjadi contoh untuk rekan kerja yang lain. 	<p>1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM per semester;</p> <p>2. Melaksanakan evaluasi kebermanfaatan pengembangan kompetensi tahun 2023;</p> <p>3. Menyusun rencana pengembangan individu, terkait pengembangan kompetensi yang akan dilakukan dan rencana aksi penerapan kompetensinya.</p>	Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	<p>1. Agustus 2024 2. Triwulan III 2024 3. Januari 2025</p>

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
PRAKTIK PROFESIONAL				
3. Perencanaan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengawasan perlu dievaluasi secara berkelanjutan, baik terkait kebijakan implementasi dan hasil; 2. Perlu mendorong implementasi manajemen risiko di tingkat kementerian serta mengevaluasi tingkat maturitas manajemen risikonya; 3. Perlu dilakukan optimalisasi perencanaan pengawasan berbasis risiko dengan memanfaatkan efektivitas pengendalian risiko audit. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi PKPT secara triwulan; 2. Penetapan pedoman penilaian maturitas manajemen risiko; 3. Melakukan penilaian maturitas manajemen risiko; 4. Pendampingan/asistensi/sosialisasi penyusunan manajemen risiko pada UPT. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 2. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas; 3. Inspektorat Investigasi; 4. Inspektorat I sampai Inspektorat IV. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Oktober 2024 dan Januari 2025; 2. Juli 2024; 3. September 2024; 4. Triwulan III 2024.
4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas				
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA				
5. Rencana kerja dan anggaran APIP				
6. Pelaksanaan Anggaran				
7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melengkapi cascading indikator kinerja pimpinan sampai dengan seluruh individu secara berjenjang di lingkungan APIP yang menggambarkan keselarasan dan dukungan atas kinerja pimpinan telah terdapat pada matriks peran hasil dapat diformalkan atau disahkan oleh pejabat berwenang; 2. Dalam rangka memenuhi indikator level 4, perlu melakukan evaluasi internal sistem informasi pengukuran kinerja organisasi (<i>e-performance</i>) dan evaluasi pengukuran kinerja individu. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan dialog kinerja untuk menetapkan matriks peran hasil dalam penyusunan SKP 2025; 2. Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pengukuran kinerja organisasi termasuk sistem informasi pengukuran kinerja organisasi; 3. Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pengukuran kinerja individu. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Inspektorat dan Bagian; 2. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 3. Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana. 	Desember 2024

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
8. Pelaporan kepada manajemen K/L/D				
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI				
9. Pengelolaan Komunikasi Internal APIP	<p>1. Untuk meningkatkan hubungan komunikasi yang efektif dan dinamis di lingkungan APIP, pelaksanaan komunikasi perlu didokumentasikan dengan lebih baik, baik komunikasi antar internal organisasi (seperti kegiatan apel pagi, dialog kinerja, pembekalan tim audit, dll) serta komunikasi eksternal organisasi (seperti keikutsertaan dalam forum Kementerian/Profesi, pemberian saran/atenasi terkait permasalahan strategis, koordinasi dengan KPK/BPK/BPKP/APIP lainnya);</p> <p>2. Dalam rangka pemenuhan level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif terkait pengelolaan komunikasi intern.</p>	<p>1. Melakukan dokumentasi pelaksanaan komunikasi internal;</p> <p>2. Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pengelolaan komunikasi internal.</p>	<p>1. Seluruh Inspektorat dan Bagian;</p> <p>2. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas.</p>	<p>1. Setelah pelaksanaan kegiatan;</p> <p>2. Desember 2024.</p>
10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Dalam rangka pemenuhan level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif terkait keterlibatan APIP dalam forum K/L.	Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil hubungan APIP dengan manajemen.	Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas.	Desember 2024
11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Dalam rangka pemenuhan level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dan komprehensif terkait koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.	Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan.	Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas.	Desember 2024
STRUKTUR TATA KELOLA				
12. Mekanisme Pendanaan				

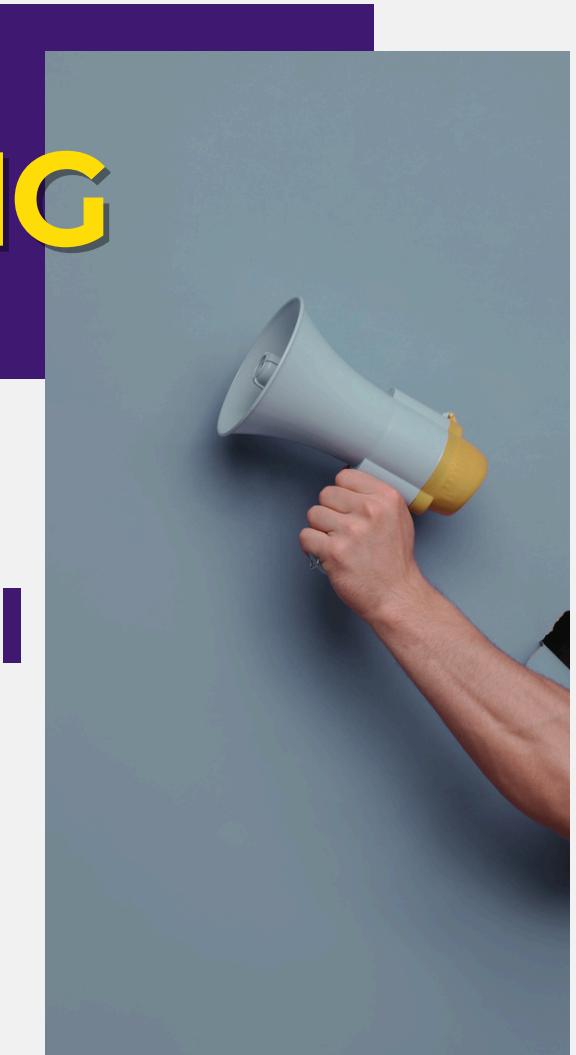
ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
13. Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	<p>APIP telah mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, namun diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendokumentasian atas implementasi tersebut; 2. Evaluasi secara berkala atas kebijakan untuk mendapatkan akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM K/L/D, implementasi dan hasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum terkait penetapan piagam pengawasan; 2. Menambahkan pernyataan "Tidak ada pembatasan akses saat penugasan" pada berita acara NHA; 3. Melakukan evaluasi terkait kebijakan, implementasi dan hasil akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM pada pelaksanaan pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas; 2. Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana; 3. Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi; 4. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agustus 2024; 2. Juli 2024; 3. Triwulan IV 2024; 4. Januari 2025.
14. Hubungan Pelaporan				
PERAN DAN LAYANAN				
15. Audit Ketaatan (<i>Compliance Auditing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu ditambahkan mekanisme penilaian sistem pengendalian intern dan survei pendahuluan dalam pelaksanaan audit 2. Dalam rangka pemenuhan indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi pedoman audit secara berkelanjutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan ADTT sesuai ketentuan 2. Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil audit dengan tujuan tertentu secara berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi; 2. Inspektorat Investigasi dan Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas. 	Desember 2024
16. Audit Kinerja (<i>Performance Auditing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan audit kinerja berbasis risiko, namun perlu dilakukan secara menyeluruh; 2. Audit kinerja yang dilaksanakan perlu menambahkan mekanisme untuk memastikan aspek efisiensi, efektivitas dan ekonomi serta pengelolaan risiko dan pengendalian dari sasaran/program/ kegiatan tercapai; 3. Dalam rangka memenuhi indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan atas kebijakan audit kinerja berbasis risiko dengan memperhatikan pemanfaatan teknologi informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penerapan audit kinerja berbasis risiko; 2. Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil audit kinerja berbasis risiko. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat I s.d Inspektorat IV; 2. Inspektorat I s.d Inspektorat IV dan Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas. 	Desember 2024

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	TARGET WAKTU
17. Asurans atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi K/L/D <i>(Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC)</i>	Dalam rangka pemenuhan indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pelaksanaan assurance atas GRC secara berkelanjutan.	Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil asurans GRC	Inspektorat I	Desember 2024
18. Jasa Konsultansi <i>(Advisory Services)</i>	<p>1. Perlu dilakukan optimalisasi pelaksanaan jasa konsultansi melalui Aplikasi SITAKON sehingga dapat memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola organisasi, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis (<i>strategic partner</i>);</p> <p>2. Dalam rangka pemenuhan indikator level 4, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil pelaksanaan jasa konsultansi secara berkelanjutan.</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi aplikasi SITAKON secara intensif, agar stakeholder yang akan melakukan konsultasi dapat memanfaatkan aplikasi tersebut.</p> <p>2. Melakukan evaluasi atas kebijakan, implementasi dan hasil jasa konsultansi</p>	<p>1. Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas</p> <p>2. Inspektorat I s.d Inspektorat Investigasi dan Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Hukum dan Humas</p>	<p>1. Setiap bulan</p> <p>2. Januari 2025</p>





MONITORING TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI TAHUN 2023



• • •



Lampiran Surat Dinas
Nomor :
Tanggal :

**PROGRES TINDAK LANJUT AREA OF IMPROVEMENT ATAS HASIL EVALUASI KAPABILITAS APIP OLEH BPKP
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUGAN TAHUN 2023**

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN			
			STATUS	PROGRES		
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER)						
PENGELOLAAN SDM						
1. Perencanaan SDM APIP	Kebijakan terkait penempatan dan pola mutasi SDM APIP serta pola karier belum diperbarui sesuai dengan kondisi SDM terbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemutakhiran data rekam jejak Auditor di Itjen dan data <i>Talent Mapping</i> sebagai bahan mutasi; 2. Menyusun pola mutasi Auditor; 3. Evaluasi Perirjen tentang Pedoman Manajemen Karier ASN di lingkungan Itjen. 	Proses	Saat ini sedang dalam proses penyusunan data rekam jejak Auditor		
2. Pengembangan SDM Profesional APIP						
PRAKTIK PROFESIONAL						
3. Perencanaan Pengawasan	Penerapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum sepenuhnya memanfaatkan register risiko audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi PKPT 2023 2. Dalam menyusun PKPT Tahun 2024, perlu diperhatikan terkait: <ol style="list-style-type: none"> a. kaitan langsung antara renstra, renja Kemenhub dengan program kerja pengawasan b. prioritas pengawasan berdasarkan tingkat kematangan MR audit 	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi PKPT tahun 2023 telah dilaksanakan untuk memastikan efektivitas dan kualitas pengawasan intern. Berdasarkan hasil evaluasi PKPT Tahun 2023. 2. Inspektorat Jenderal telah menginisiasi penyusunan Agenda Utama Pengawasan (AUP) pada PKPT 2024. AUP disusun dengan menyelaraskan (<i>cascade</i>) kinerja organisasi secara top-down dan hasil pengawasan akan disintesakan secara <i>bottom up</i> berupa informasi hasil pengawasan (Insilwas) terhadap isu strategis dan fokus pengawasan. AUP Tahun 2024 		

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
				mengarah pada 5 sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang terdiri dari 41 isu strategis dan 89 fokus pengawasan.
	Perlu mendorong implementasi manajemen risiko di tingkat kementerian, memantau dan mengevaluasi efektivitas mitigasi yang dilakukan	Melakukan sosialisasi dan pendampingan manajemen risiko yang tertuang di dalam PKPT ataupun yang sifatnya undangan/direktif pimpinan	Selesai	Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan manajemen risiko pada seluruh unit kerja di Kementerian Perhubungan
4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Mengimplementasikan penjaminan kualitas APIP secara berkesinambungan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas serta efektivitas kegiatan pengawasan intern APIP	1. Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal dilakukan setiap tahun 2. Penilaian Kapabilitas APIP	1. Selesai 2. Proses	1. Telaah Sejawat Internal (TSI) dilaksanakan tiap tahun secara berkesinambungan dan menghasilkan Laporan Hasil TSI beserta Laporan Evaluasinya. Untuk tahun 2024, sampai saat ini telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan TSI Tahun 2024. 2. Telah dilaksanakan penilaian mandiri kapabilitas APIP tahun 2024 dengan hasil skor 3,395 pada level 3
	Melakukan survei atau wawancara kepada stakeholders untuk mendapatkan gambaran atas peran layanan yang telah diberikan Inspektorat Jenderal	1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengawasan 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	Proses	1. Telah dilaksanakan rapat kick off Survei Kepuasan Pengawasan tahun 2024 2. Telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA				
5. Rencana kerja dan anggaran APIP				
6. Pelaksanaan Anggaran				
7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP				
8. Pelaporan kepada manajemen K/L/D				

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI				
9. Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Internal APIP	Melaksanakan PPM atau kegiatan sejenis yang berisi pembekalan sebelum melaksanakan tugas pengawasan (pembahasan pedoman, pemahaman proses bisnis audit, dsb.) serta PPM yang membahas tentang isu-isu strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan <i>briefing</i> atau rapat internal sebelum pelaksanaan pengawasan 2. Pelaksanaan PKS 	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan <i>briefing</i> atau rapat internal pada masing-masing Inspektorat sebelum pelaksanaan pengawasan 2. Telah dilaksanakan PKS pada masing-masing Inspektorat
10. Hubungan APIP dengan Manajemen				
11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	Mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi dan BPKP mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan	Melaksanakan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan BPK/KPK/Inspektorat Jenderal	Selesai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi koordinasi dengan pihak lain melalui koordinasi dengan BPK RI dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK agar tidak terjadi duplikasi dengan pengawasan Inspektorat Jenderal 2. Koordinasi dengan KPK dan stakeholder lembaga/ pemda lain terkait kegiatan Stranas PK, Itjen sebagai focal point; 3. Koordinasi dengan BPK RI, dan BPKP terkait tindak lanjut hasil pengawasan. dll
STRUKTUR TATA KELOLA				
12. Mekanisme Pendanaan	-			
13. Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	APIP belum memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam bentuk <i>database management system</i> untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. APIP sudah memiliki Aplikasi SIAU, SIMADU, SIMARKO 2. Pengembangan SSO untuk seluruh Aplikasi di lingkungan Inspektorat Jenderal 	Proses	Menunggu clearance dari Kementerian Komunikasi dan Informatika
14. Hubungan Pelaporan	-			
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT)				
PERAN DAN LAYANAN				

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
15. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	APIP belum melakukan pemantauan atas semua pelaksanaan tindak lanjut atas simpulan hasil dan rekomendasi dari audit ketaatan yang dilakukan	Melakukan pemantauan tindak lanjut	Selesai	Telah dilakukan monitoring TL Hasil ADTT oleh Bagian PHPHH
16. Audit Kinerja (Performance Auditing)	<p>Identifikasi sasaran, ruang lingkup dan metodologi audit di dalam kertas kerja survei pendahuluan sebelum melakukan kegiatan audit</p> <p>Lingkup Audit Kinerja diharapkan bersifat lintas unit kerja untuk mendukung program strategis kementerian</p> <p>Kegiatan pengawasan baik asurans maupun jasa konsultansi perlu memanfaatkan profil risiko yang telah dievaluasi oleh APIP</p> <p>KKA belum mengidentifikasi dan menganalisis risiko utama dan efektivitas pengendalian atas sasaran/program/kegiatan yang strategis, signifikan, bersifat lintas sektor, dan prioritas menurut Rencana Jangka Menengah Organisasi (Renstra KL atau RPJMD)</p> <p>KKA belum mengidentifikasi kinerja yang tidak optimal dan penyebab tidak optimalnya capaian kinerja tersebut (Capaian dan permasalahan 3E dan Kualitas <i>risk register</i> dan efektifitas pengendaliannya);</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan manajemen risiko pada audit; b. Menyusun Pedoman Penilaian Maturitas Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan; c. Mengevaluasi SOP Audit Kinerja; d. Mengevaluasi Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan; e. Melaksanakan bimbingan teknis/workshop/<i>coaching clinic</i> dalam rangka meningkatkan pemahaman auditor pada pelaksanaan AKB; f. Mengimplementasikan Audit Kinerja Berbasis Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Proses b. Proses c. Selesai d. Proses e. Proses f. Proses 	<ul style="list-style-type: none"> a. Akan dilaksanakan mulai bulan Mei untuk pendampingan pelaksanaan manajemen Risiko pada audit; b. Telah disusun Draft Peraturan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko dalam Mendukung pelaksanaan PIBR dan telah disampaikan Nota Dinas permintaan saran dan masukan; c. Telah dilaksanakan evaluasi SOP Audit Kinerja dan akan disusun revisi SOP Audit Kinerja; d. Telah dilaksanakan rapat pembahasan rencana revisi pedoman pelaksanaan AKB.

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
	Pelaksanaan teknik audit yang direncanakan di PKA dan KKA belum sepenuhnya selaras			
	Mendorong UKE untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Audit Kinerja.			
17. Topik Asurans atas <i>Government, Risk, and Control (GRC)</i>	Penjaminan kualitas SPIP agar memberikan Rekomendasi dan hasil Aol yang sesuai untuk perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi serta dimonitor setiap tindak lanjutnya	1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penjaminan Kualitas Pelaksanaan SPIP 2. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut Aol SPIP	1. Selesai 2. Selesai	1. Telah dilaksanakan Bimtek Penjaminan Kualitas Pelaksanaan SPIP pada 18 s.d 19 Maret 2024; 2. Telah dilaksanakan monitoring tindak lanjut Aol SPIP. Terdapat 11 Aol SPIP Kementerian Perhubungan dengan status tindak lanjut sebagai berikut: Tindak Lanjut Tuntas: 9 Tindak Lanjut Proses: 2
	Rekomendasi atas hasil asurans agar GRC fokus pada perbaikan 3E dan menjadi <i>early warning system</i>			
18. Jasa Konsultansi (<i>Advisory Services</i>)	Kegiatan layanan jasa konsultansi perlu didokumentasikan dengan baik untuk menjaga akuntabilitas layanan yang diberikan serta dimanfaatkan untuk menyusun daftar FAQ.	Layanan konsultasi didokumentasikan dalam aplikasi SITAKON	Selesai	Layanan konsultasi pada Inspektorat Jenderal didokumentasikan ke dalam aplikasi SITAKON

**PROGRES TINDAK LANJUT AREA OF IMPROVEMENT ATAS HASIL EVALUASI KAPABILITAS APIP OLEH BPKP
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023 (LEVEL 4)**

ELEMEN /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN			
			STATUS	PROGRES		
DUKUNGAN PENGAWASAN (ENABLER)						
PENGELOLAAN SDM						
1. Perencanaan SDM APIP	Belum dilakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan yang terkait pada perencanaan dan pengembangan SDM di lingkungan Itjen	Melakukan evaluasi pengelolaan SDM Itjen	Proses	Laporan masih dalam proses penyusunan		
2. Pengembangan SDM Profesional APIP	Belum dilakukan evaluasi terhadap penerapan sertifikasi kompetensi yang telah diperoleh SDM dalam melakukan kegiatan pengawasan (misalnya sertifikasi terkait CRMO dan CRMP) dalam penerapan pengelolaan risiko organisasi	Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi SDM Itjen	Proses	Laporan masih dalam proses penyusunan		
	Perlu memproyeksikan kebutuhan pengembangan SDM sejalan dengan rencana strategis organisasi	Melakukan penyusunan dokumen HCDP tahun 2024-2027 bagi seluruh Auditor namun perlu di TL dengan rencana pengembangan individu	Proses	Telah disusun dokumen proposal HCDP tahun 2024- 2027		
	Perlu memaksimalkan pemanfaatan pengetahuan yang telah diperoleh SDM APIP atas partisipasi pada Organisasi profesi agar dapat berkontribusi meningkatkan aktivitas pengawasan	Melakukan evaluasi kebermanfaatan pengembangan kompetensi bagi Auditor di lingkungan Itjen	Proses	Sedang dilakukan pembahasan finalisasi format formulir Evaluasi Kebermanfaatan pengembangan kompetensi		
PRAKTIK PROFESIONAL						
3. Perencanaan Pengawasan	Belum melakukan evaluasi terhadap pedoman penyusunan PKPT	Melaksanakan evaluasi terhadap pedoman penyusunan PKPT	Proses	Sedang dilakukan penyusunan laporan evaluasi		
	Melakukan evaluasi atas pedoman penyusunan perencanaan pengawasan intern yang telah berbasis risiko agar dapat mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan intern.					

ELEMENT /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
4. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas				
AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA				
5. Rencana kerja dan anggaran APIP	Melakukan implementasi dan evaluasi secara terus-menerus terhadap rencana kerja dan anggaran minimal selama tiga tahun, untuk memberikan keyakinan yang terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah penganggaran	Penyusunan Laporan Evaluasi Penyusunan RKA	Selesai	Telah dilakukan evaluasi terhadap RKA APIP sesuai dengan KM 186 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pada penyusunan RKA pagu berikutnya yang sudah ditetapkan menjadi DIPA POK
6. Pelaksanaan Anggaran	Melakukan evaluasi atas sistem dan pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan, selanjutnya hasil evaluasi tersebut sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan periode berikutnya.	Penyusunan Laporan Evaluasi atas Sistem dan Pelaksanaan Anggaran	Selesai	Nota Dinas Nomor: 03A KKU I ITJEN 2024 Laporan Evaluasi Sistem dan Pelaksanaan Anggaran 2023
7. Sistem Pengukuran Kinerja APIP	Perlu melakukan pemantauan secara berkala dan melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan dari tahun ke tahun	1. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja organisasi, termasuk sistem informasi pengukuran kinerja organisasi	Selesai	<p>a. Sistem Pengukuran Kinerja organisasi telah dilakukan evaluasi melalui pelaksanaan Evaluasi SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP telah ditindak lanjuti sebagaimana tertuang dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP</p> <p>b. Telah dilaksanakan kegiatan Rencana Pengembangan Aplikasi e-Performance. Hasil yang didapatkan adalah pada rencana pengembangan aplikasi, hasil pengukuran kinerja pada aplikasi e-performance ke depannya akan mempengaruhi capaian pada predikat kinerja individu.</p>

ELEMENT /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
		2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja individu, termasuk sistem informasi pengukuran kinerja individu	Proses	Pengukuran kinerja sampai dengan level individu tertuang di dalam SKP masing-masing pegawai, dan pelaporan kinerja individu disampaikan melalui Laporan Bulanan dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) masing-masing pegawai melalui aplikasi e-kinerja
8. Pelaporan kepada manajemen K/L/D	Melakukan optimalisasi pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta peningkatan kinerja tahun selanjutnya	Monitoring Capaian Kinerja Triwulan	Selesai	Telah dilaksanakan monitoring capaian kinerja secara bulanan dan triwulan
	Evaluasi secara berkelanjutan mengenai evaluasi laporan kinerja dan memonitor pencapaian target kinerja untuk mendukung proses pengambilan keputusan	Evaluasi LAKIP	Selesai	Akuntabilitas kepada manajemen K/L dilaksanakan dan dievaluasi secara terus menerus selama 3 tahun, melalui Evaluasi SAKIP. Hasil evaluasi SAKIP telah ditindak lanjuti sebagaimana tertuang dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP dan dibuktikan dengan dokumen LMCK triwulanan tahun 2021-2023 di mana di dalamnya terdapat analisis hasil kinerja, serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk perbaikan organisasi ke depan
BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI				
9. Pengelolaan Proses Bisnis Pengawasan Internal APIP		1. Melaksanakan survei pola komunikasi dan koordinasi internal APIP 2. Melakukan evaluasi pola koordinasi dan sistem komunikasi internal APIP berdasarkan hasil survei tahun sebelumnya dan dokumentasi komunikasi internal yang sudah berlangsung	Proses	1. Akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2024 2. Telah dilakukan evaluasi internal terhadap pola koordinasi dan sistem komunikasi dan sistem komunikasi internal APIP

ELEMENT /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
10. Hubungan APIP dengan Manajemen	Inspektorat Jenderal secara berkelanjutan terlibat dalam forum/komite bersama di tingkat Kementerian serta aktif membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik kepada seluruh UKE/Satuan Kerja	1. Keterlibatan Inspektorat Jenderal dalam forum/komite bersama di tingkat Kementerian 2. Menjadi narasumber berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik di tingkat Kementerian	Selesai	1. APIP terlibat dalam Satgas di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. APIP telah membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang praktik terbaik dalam pengawasan intern dan proses bisnis kepada Satker di Kementerian Perhubungan, antara lain terkait implementasi Manajemen Risiko
	Melakukan evaluasi secara berkala terkait kebijakan ataupun kegiatan tentang partisipasi APIP di dalam Forum K/L/D untuk memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas APIP	Menyusun Laporan Evaluasi	Selesai	Partisipasi APIP dalam Satgas di lingkungan Kementerian Perhubungan telah dilakukan evaluasi, antara lain evaluasi terkait keterlibatan Inspektorat Jenderal pada Satgas Monitoring Angkutan Lebaran, yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Budaya dan Hubungan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
11. Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	1. Inspektorat Jenderal secara aktif berkoordinasi dengan BPK RI/ BPKP/ KPK dan Inspektorat Lembaga/Provinsi dalam rangka menindaklanjuti hasil pengawasan 2. Melakukan evaluasi koordinasi dan sinergi dengan BPK RI/KPK/Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga/Provinsi dan BPKP yang telah berjalan untuk mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, serta menindaklanjuti hasil pengawasan	1. Keterlibatan Inspektorat dengan lembaga lain dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan/ kegiatan pengawasan lainnya 2. Menyusun Laporan Evaluasi	1. Selesai 2. Proses	1. Koordinasi dengan pihak lain antara lain koordinasi dengan BPK RI dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK agar tidak terjadi duplikasi dengan pengawasan Itjen, Koordinasi dengan KPK dan stakeholder lembaga/ pemda lain terkait kegiatan Stranas PK, Itjen sebagai focal point, dan Koordinasi dengan BPK RI, dan BPKP terkait tindak lanjut hasil pengawasan. Dll 2. Laporan evaluasi koordinasi dan sinergi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan sedang dalam proses penyusunan

ELEMENT /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (Aol)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
STRUKTUR TATA KELOLA				
12. Mekanisme Pendanaan	-			
13. Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM	Melakukan evaluasi kebijakan pengawasan khususnya menambahkan klausul pernyataan tidak ada pembatasan akses saat penugasan pada setiap penugasan pengawasan	Laporan hasil evaluasi dan perubahan kebijakan	Proses	Telah dilaksanakan evaluasi terhadap piagam audit yang menuangkan kebijakan tentang akses ke seluruh informasi organisasi, aset dan SDM Kementerian. Saat ini piagam audit sedang dalam proses revisi.
14. Hubungan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan identifikasi dan evaluasi kebijakan pelaporan yang masih berlaku secara berkelanjutan jika diperlukan 2. Melakukan reviu berjenjang atas laporan hasil pengawasan; 3. Melakukan evaluasi kebijakan dan pelaporan ikhtisar hasil pengawasan secara berkelanjutan 	Laporan hasil evaluasi kebijakan dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta Ikhtisar Hasil pengawasan	Selesai	Telah dilaksanakan evaluasi terhadap penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Semester dan Ikhtisar Hasil Pengawasan Triwulan
AKTIVITAS PENGAWASAN (DELIVERY) DAN KUALITAS PENGAWASAN (RESULT)				
PERAN DAN LAYANAN				
15. Audit Ketaatan (Compliance Auditing)	APIP belum melakukan evaluasi secara berkala terkait pedoman pelaksanaan audit ketaatan	Pelaksanaan Evaluasi Pedoman Pelaksanaan ADTT	Selesai	Telah dilaksanakan evaluasi terhadap kebijakan yang mengatur ADTT, dan telah ditetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Nomor KP-ITJEN 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di lingkungan Inspektorat Jenderal
16. Audit Kinerja (Performance Auditing)				
17. Topik Asurans atas Government, Risk, and Control (GRC)	Evaluasi atas dasar dan pedoman dalam melakukan kegiatan asurans, yang meliputi tujuan dan sasaran serta koordinasi kegiatan pengawasan yang komprehensif terkait kegiatan asurans	Pelaksanaan Evaluasi Pedoman dan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SPIP	Selesai	Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asurans atas GRC. Aol yang timbul dipantau dan ditindaklanjuti melalui Papan TL Monitoring Aol SPIP

ELEMENT /TOPIK	AREA OF IMPROVEMENT (AoI)	RENCANA AKSI	KETERANGAN	
			STATUS	PROGRES
18. Jasa Konsultansi (Advisory Services)				





INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN